

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN KEUANGAN/ *FINANCIAL STATEMENTS*

**31 Desember 2013 dan 2012/
*December 31, 2013 and 2012***



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

**DIRECTORS' STATEMENT REGARDING
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS AS AT AND FOR
THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012**

PT VALE INDONESIA Tbk

Atas nama Dewan Direksi, yang bertanda tangan di bawah ini:

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1. Nama	Nicolas D. Kanter	Name
Alamat	Plaza Bapindo, Citibank Tower, Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190	Office Address
Alamat Domisili (sesuai KTP)	Jl. Cikatomas II No. 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Address of Domicile (as per Identity Card)
Nomor Telepon	+62 21 524 9001/524 9000	Telephone
Jabatan	Presiden Direktur/President Director	Position
2. Nama	Febriany Eddy	Name
Alamat	Plaza Bapindo, Citibank Tower, Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190	Office Address
Alamat Domisili (sesuai KTP)	Jl. Senopati Raya, RT/RW 008/003 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Address of Domicile (as per Identity Card)
Nomor Telepon	+62 21 524 9002/524 9000	Telephone
Jabatan	Direktur Keuangan/Chief Financial Officer	Position

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk ("Perseroan"); | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Vale Indonesia Tbk (the "Company"); |
| 2. Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; | 2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perseroan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | 3. a. All information in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The Company's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts, and |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perseroan. | 4. We are responsible for the Company's internal control systems. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi

For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 26 Februari 2014/February 26, 2014

Presiden Direktur/President Director

Direktur Keuangan/Chief Financial Officer

(Nicolas D. Kanter)

(Febriany Eddy)

PT Vale Indonesia Tbk

Jakarta: Plaza Bapindo - Citibank Tower 22nd Floor, Jl. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190, Indonesia. T. (62) 21 524 9000 F. (62) 21 524 9000
Makassar: Jl. Sonbala Opu No. 281, Makassar 90001, Indonesia. T. (62) 411 873 731 F. (62) 411 856 157
Sorowako: Main Office: Plant Site Sorowako, Luwu Timur 92984, Sulawesi Selatan, Indonesia. T. (62) 21 524 9100 F. (62) 21 524 9565
valeindonesia.co.id



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT VALE INDONESIA TBK

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk ("Perseroan") yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Vale Indonesia Tbk (the "Company") which comprise the statement of financial position as at 31 December 2013, and the statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan

Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Vale Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2013 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Vale Indonesia Tbk as at 31 December 2013 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA
26 Februari/February 2014

Drs. Haryanto Sahari, CPA
Surat Ijin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0223

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2013	2012	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2.3, 5a	200,020	172,239	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	2.3, 5b	16,723	17,333	Restricted cash
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak-pihak berelasi	2.4, 2.23, 6, 31e	65,902	112,640	- Related parties
Persediaan	2.5, 8	150,996	152,849	Inventories
Pajak dibayar dimuka	2.14, 14a			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		83,833	45,289	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		28,008	44,333	- Other taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	2.6, 9	4,209	9,659	Prepayments and advances
Aset keuangan lancar lainnya	7, 31e	7,804	10,548	Other current financial assets
Jumlah aset lancar		557,495	564,890	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Pajak dibayar dimuka	2.14, 14a			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		17,913	79,668	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		40,229	47,217	- Other taxes
Piutang non-usaha				Non-trade receivables
- Pihak-pihak berelasi	2.4, 2.23, 31e	305	111	- Related parties
Aset tetap	2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 10, 11	1,651,762	1,624,571	Fixed assets
Aset keuangan tidak lancar lainnya	12	13,415	16,623	Other non-current financial assets
Jumlah aset tidak lancar		1,723,624	1,768,190	Total non-current assets
JUMLAH ASET		2,281,119	2,333,080	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2013 AND 2012

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2013	2012	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
- Pihak-pihak berelasi	2.21, 2.23, 13, 31f	11,211	10,888	- Related parties
- Pihak ketiga	2.21, 13	64,304	68,171	- Third parties
Akrual	2.13, 15a, 31f	29,972	31,614	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.15, 16	16,650	12,914	Short-term employee benefit liabilities
Utang pajak	2.14, 14b	6,905	4,654	Taxes payable
Bagian lancar atas pinjaman bank jangka panjang	2.20, 17	35,863	35,643	Current portion of long-term bank borrowings
				Current portion of post-employment benefit liabilities
Bagian lancar atas liabilitas imbalan pascakerja	2.15, 18	345	345	Share-based payment liabilities
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	2.15, 31f	430	14	Other current financial liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	15b	3,220	1,422	
		168,900	165,665	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka panjang	2.20, 17	183,252	219,991	Long-term bank borrowings
Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang	2.15, 18	11,557	21,875	Long-term post-employment benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	2.14, 14d	157,302	162,005	Deferred tax liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	2.12, 26	45,842	42,110	Provision for asset retirement
		397,953	445,981	Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang		397,953	445,981	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		566,853	611,646	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Share capital
- Modal dasar - 39.745.354.880 saham dengan nilai nominal Rp25 per saham (nilai penuh) pada 31 Desember 2013 dan 2012		136,413	136,413	- Authorized capital - 39,745,354,880 shares with par value Rp25 per share (full amount) as at December 31, 2013 and 2012
- Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.936.338.720 saham pada 31 Desember 2013 dan 2012	19	277,760	277,760	- Issued and fully paid capital - 9,936,338,720 shares as at December 31, 2013 and 2012
Tambahan modal disetor	21	277,760	277,760	Additional paid-in capital
Saldo Laba	2.12, 22a, 22b	47,713	12,925	Retained earnings
- Dicadangkan		1,252,380	1,294,336	- Appropriated
- Belum dicadangkan				- Unappropriated
		1,714,266	1,721,434	TOTAL EQUITY
JUMLAH EKUITAS		1,714,266	1,721,434	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		2,281,119	2,333,080	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2013	2012	
Pendapatan	2.13, 2.23, 31a	921,638	967,327	Revenue
Beban pokok pendapatan	2.13, 23	(781,744)	(800,622)	Cost of revenue
LABA BRUTO		139,894	166,705	GROSS PROFIT
Pendapatan lainnya	2.13, 25a	(455)	(564)	Other income
Beban usaha	2.13, 24	13,041	12,613	Operating expenses
Beban lainnya	2.13, 25b	57,171	47,748	Other expenses
LABA USAHA		70,137	106,908	OPERATING PROFIT
Biaya keuangan	2.12, 2.20, 17, 26	14,678	15,485	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		55,459	91,423	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	2.14, 14c	16,807	23,929	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		38,652	67,494	PROFIT FOR THE YEAR
Pendapatan komprehensif lain (Keuntungan)/Kerugian aktuarial dari program pensiun manfaat pasti dan imbalan kesehatan pascakerja, bersih	2.15, 18	(4,260)	4,737	Other comprehensive income Actuarial (gain)/loss from defined benefit plan and post- retirement medical benefits, net
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		42,912	62,757	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM				EARNINGS PER SHARE
- Dasar (dalam Dolar AS)	2.16, 29	0.004	0.007	- Basic (in US Dollars)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Tersedia untuk pemilik Perseroan/Atributable to the owners of the Company				Jumlah/ Total
			Cadangan jaminan reklamasii/ Reclamation guarantee reserve	Cadangan umum/ General reserve	Belum dicadangkan/ Unappropriated	Saldo laba/Retained earnings	
Saldo 1 Januari 2012	136,413	277,760	12,641	5,342	1,337,013	1,769,169	
Laba tahun berjalan Keuntungan/(Kerugian) aktual dari program pensiun manfaat pasti dan imbalan kesehatan pascakerja, bersih Dividen yang diumumkan Cadangan jaminan reklamasii	-	-	-	-	67,494	67,494	
Saldo 31 Desember 2012	136,413	277,760	7,583	5,342	1,294,336	1,721,434	
Laba tahun berjalan Keuntungan/(Kerugian) aktual dari program pensiun manfaat pasti dan imbalan kesehatan pascakerja, bersih Dividen yang diumumkan Cadangan jaminan reklamasii	-	-	-	-	39,652	39,652	
Saldo 31 Desember 2013	136,413	277,760	35,622	12,091	1,252,380	1,714,266	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	968,376	920,700	Receipts from customers
Pembayaran kas ke pemasok	(596,532)	(648,586)	Payments to suppliers
Pembayaran pajak penghasilan badan	(38,261)	(121,055)	Payments of corporate income tax
Pengembalian pajak penghasilan badan	40,159	-	Refunds of corporate income tax
Pengembalian pajak lainnya	8,197	41,765	Refunds of other taxes
Pembayaran ke karyawan	(100,607)	(100,130)	Payments to employees
Penerimaan lainnya	455	564	Other receipts
Pembayaran lainnya	(15,895)	(14,096)	Other payments
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	<u>265,892</u>	<u>79,162</u>	Net cash flows provided from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembayaran untuk pembelian aset tetap	(140,487)	(146,965)	Payments for acquisition of fixed assets
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	<u>(140,487)</u>	<u>(146,965)</u>	Net cash flows used for investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran dividen	(49,314)	(110,460)	Payments of dividends
Penempatan dana yang dibatasi penggunaannya	(42,244)	(43,686)	Placement of restricted cash
Penggunaan dana yang dibatasi penggunaannya	42,854	43,817	Usage of restricted cash
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(37,500)	(37,500)	Payments of long-term borrowings
Pembayaran beban keuangan	(9,192)	(10,724)	Payments of finance costs
Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan	<u>(95,396)</u>	<u>(158,553)</u>	Net cash flows used for financing activities
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	<u>30,009</u>	<u>(226,356)</u>	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	<u>172,239</u>	<u>399,155</u>	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	<u>(2,228)</u>	<u>(560)</u>	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>200,020</u>	<u>172,239</u>	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

1. Umum

PT Vale Indonesia Tbk, ("Perseroan") didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 dengan akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968, yang dibuat dihadapan Eliza Pondaag, notaris publik di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Tambahan No. 93, Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1968. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diubah dengan akta No. 75 tanggal 27 September 2011, yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., notaris di Jakarta tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 27 September 2011. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-48198.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011. Sekitar 58,73% saham Perseroan dimiliki oleh Vale Canada Limited, sekitar 20,49% oleh masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia, sekitar 20,09% oleh Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., dan oleh lainnya sekitar 0,69% (lihat Catatan 19).

Entitas induk langsung Perseroan adalah Vale Canada Limited dan entitas pengendali utama adalah Vale S.A., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil.

Pabrik Perseroan berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan dan kantor yang terdaftar berlokasi di Plaza Bapindo, Citibank Tower, Lt. 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta.

Operasi Perseroan didasarkan atas Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dan Perseroan. Kontrak Karya ini memberikan hak kepada Perseroan untuk mengembangkan dan mengoperasikan proyek nikel dan mineral-mineral tertentu lainnya di daerah yang sudah ditentukan di pulau Sulawesi. Kontrak Karya ini pada awalnya ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1968 ("Kontrak Karya 1968") dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Pada tanggal 15 Januari 1996, Perseroan dan Pemerintah menandatangani Persetujuan Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya 1968 ("Persetujuan Perpanjangan"), yang memperpanjang operasi Perseroan sampai tahun 2025.

Sebagai tambahan, Perseroan telah menyepakati, tergantung pada kelayakan ekonomis dan teknis, untuk mengembangkan potensi endapan nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Menurut Persetujuan Perpanjangan, ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi dari Kontrak Karya 1968 secara umum tetap berlaku sampai 31 Maret 2008, kecuali untuk aturan-aturan tertentu yang terkait dengan bidang fiskal. Mulai tanggal 29 Desember 1995 (ditetapkan sebagai Tanggal Efektif dalam Persetujuan Perpanjangan), ketentuan-ketentuan perpajakan tertentu dari Kontrak Karya 1968, khususnya di bidang pemotongan pajak dan kredit investasi, telah diubah untuk lebih sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ketika Persetujuan Perpanjangan ditandatangani pada 29 Desember 1995. Sejak tanggal 1 April 2008, semua ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi Persetujuan Perpanjangan diberlakukan.

Berikut adalah perubahan-perubahan prinsip dalam Persetujuan Perpanjangan yang berlaku mulai tanggal 1 April 2008:

- Royalti bijih nikel (garnierite) akan dibayarkan berdasarkan tarif tetap sebesar AS\$70,00 hingga AS\$78,00 per ton, tergantung jumlah produksi;
- Tarif sewa tanah per tahun akan naik menjadi AS\$1,50 per hektar dari AS\$1,00 per hektar;
- Aset yang tidak berhubungan dengan kegiatan ekspansi yang disepakati dalam Persetujuan Perpanjangan dan digunakan setelah tanggal 31 Maret 2008 untuk tujuan perhitungan Pajak penghasilan badan dapat diatur dengan formula depresiasi yang berbeda dari formula yang digunakan sebelumnya;

1. General

PT Vale Indonesia Tbk, ("the Company") was established on July 25, 1968 by deed No. 49 dated July 25, 1968 drawn up before Eliza Pondaag, a public notary in Jakarta. The Company's Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. J.A.5/59/18 dated July 26, 1968 and published in Supplement No. 93 to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 62 dated August 2, 1968. These Articles of Association have been amended several times with the latest amendment made by deed No. 75, dated September 27, 2011, drawn up before Poerbaningsih Adi Warsito S.H., a notary in Jakarta, to reflect amendments to the Company's Articles of Association as approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") on September 27, 2011. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. AHU-48198.AH.01.02.Tahun 2011 dated October 4, 2011. Approximately 58.73% of the Company's shares are currently owned by Vale Canada Limited, approximately 20.49% by the public through the Indonesia Stock Exchange, approximately 20.09% by Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., and by others approximately 0.69% (refer to Note 19).

The Company's immediate parent company is Vale Canada Limited and the ultimate parent entity is Vale S.A., a company established under the laws of the Federal Republic of Brazil.

The Company's plant is located in Sorowako, South Sulawesi and the registered office is located in Plaza Bapindo, Citibank Tower, 22nd floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta.

The Company's operations are conducted pursuant to a Contract of Work ("CoW") entered into by the Government of the Republic of Indonesia ("the Government") and the Company. The CoW grants the Company the right to develop and operate a project for nickel and certain other minerals in defined areas within the island of Sulawesi. The CoW originally entered into on July 27, 1968 ("the 1968 Contract") expired on March 31, 2008. On January 15, 1996, the Company and the Government signed the Agreement on Modification and Extension of the 1968 Contract ("the Extension Agreement"), extending the Company's operations to 2025.

In addition, the Company has undertaken, subject to economic and technical feasibility, to explore the potential development of its nickel deposits in Southeast Sulawesi and Central Sulawesi.

According to the Extension Agreement, the terms and conditions of the 1968 Contract generally remained in place until March 31, 2008, except for certain fiscal related provisions. Effective December 29, 1995 (defined as the Effective Date in the Extension Agreement), these provisions of the 1968 Contract, notably in the area of withholding taxes and investment credits, were modified to bring them more in line with applicable tax legislation in Indonesia when the Extension Agreement was signed on December 29, 1995. As at April 1, 2008, all of the remaining terms and conditions of the Extension Agreement took effect.

The following are the principal changes in the Extension Agreement that had immediate impact beginning on April 1, 2008:

- Royalties on nickel ore (garnierite) are payable at a fixed rate of US\$70.00 to US\$78.00 per metric ton, depending on total production;
- Land lease increased to US\$1.50 per hectare per annum from US\$1.00 per hectare;
- Assets not related to expansion undertakings agreed in the Extension Agreement and placed in service after March 31, 2008 could be subject to different formulas of depreciation for corporate income tax calculation purposes;

1. Umum (lanjutan)

- Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham pendiri hingga 31 Maret 2008 dibebaskan dari pungutan pajak. Pembayaran dividen kepada pemegang saham pendiri yang dideklarasikan antara tanggal 1 April 2008 hingga dan meliputi tanggal 1 April 2010 juga akan dibebaskan dari pemotongan pajak jika jumlahnya tidak melebihi saldo laba ditahan Perseroan seperti yang dilaporkan dalam neraca Perseroan pada tanggal 31 Maret 2008;
- Perseroan wajib membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Kontrak Karya 1968 Perseroan tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan; dan
- Perseroan membayar berbagai retribusi, pajak, beban dan pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah di area operasional Perseroan sepanjang hal tersebut disetujui oleh Pemerintah Pusat. Tarif yang dikenakan tidak boleh melebihi tarif yang berlaku pada tanggal 29 Desember 1995 (tanggal yang dimuat dalam Perjanjian Perpanjangan). Ketentuan ini berlaku untuk semua perusahaan tambang lainnya dengan ketentuan dan persyaratan yang sama.

Fasilitas pembangkit listrik tenaga air ("PLTA") Perseroan yang ada pada saat ini dibangun dan beroperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah tahun 1975. Keputusan ini, yang secara efektif juga mencakup pembangkit listrik Karebbe dan Balambano yang merupakan tambahan dari fasilitas pembangkit listrik awal Larona, yang membenarkan hak kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih fasilitas listrik tenaga air tersebut dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dua tahun sebelum pengambilalihan. Tidak ada pemberitahuan tertulis yang diterima oleh Perseroan sampai saat ini. Apabila hak tersebut digunakan, fasilitas tersebut akan dialihkan sebesar nilai bukunya dengan syarat Pemerintah menyediakan tenaga listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasi Perseroan, yang tarifnya ditentukan berdasarkan biaya ditambah dengan margin laba yang normal, selama sisa masa Kontrak Karya.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan utama Perseroan adalah dalam eksplorasi dan penambangan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran nikel beserta produk mineral terkait lainnya. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1978.

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 49,7 juta lembar saham atau 20% dari 248,4 juta lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana tersebut dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), pada tanggal 16 Mei 1990.

Saham yang diterbitkan oleh Perseroan terdiri atas saham biasa, dimana setiap satu saham memberikan satu hak suara bagi pemegang saham ataupun kuasanya yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan dan hak atas dividen dan pembagian sisa aset Perseroan dalam hal Perseroan dibubarkan, proporsional terhadap jumlah saham yang dimiliki.

Dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada 6 Juli 2004, para pemegang saham menyetujui dilakukannya pemecahan saham biasa, dari satu saham menjadi empat saham. Hal ini berlaku efektif mulai 3 Agustus 2004.

Pada RUPSLB yang diselenggarakan pada 17 Desember 2007, para pemegang saham menyetujui pemecahan saham biasa, dari satu saham menjadi sepuluh saham, yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan. Hal ini berlaku efektif di Bursa Efek Indonesia mulai 15 Januari 2008.

1. General (continued)

- Dividends paid to the founding shareholders until March 31, 2008 are exempt from withholding tax. Payment of dividends to the founding shareholders declared between April 1, 2008 up to and including April 1, 2010 will also be exempted from withholding tax, in an aggregate amount not to exceed the amount of the Company's retained earnings as reported in the Company's balance sheet on March 31, 2008;
- The Company must pay land and building taxes. Under the 1968 Contract the Company was not required to pay these taxes; and
- The Company pays levies, taxes, charges and duties imposed by local governments with jurisdiction over the Company's operational area, if approved by the Central Government. The rates must not be higher than those prevailing on December 29, 1995 (the date stipulated in the Extension Agreement) and are imposed on all other mining companies in the applicable jurisdiction on the same terms and conditions.

The Company's existing hydroelectric facilities were constructed and are currently operating pursuant to the Governmental Decree of 1975. This decree, which effectively covers the Karebbe and the Balambano power plants which are additions to the original Larona facility, provided the Government with the right to acquire the hydroelectric facilities, with two years' prior written notice to the Company. No such notice has been given to date. If this right is exercised, the facilities will be transferred at their net book value under the condition that the Government shall supply the Company with sufficient electrical power for its operations, at a rate based on cost plus a normal profit margin, for the remaining term of the CoW.

As stated in Article 3 of its Articles of Association, the Company's main activities are exploration and mining, processing, storage, transportation and marketing of nickel and associated mineral products. The Company started its commercial operations in 1978.

In 1990, the Company conducted an Initial Public Offering ("IPO") of 49.7 million shares or 20% of the 248.4 million shares issued and fully paid. The shares offered to the public in the IPO were registered on the Jakarta Stock Exchange (now the Indonesia Stock Exchange) on May 16, 1990.

The Company's shares consist of common shares, where the holder of one share or his proxy is entitled to one vote at the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and to dividends and the proceeds upon winding up of the Company in proportion to the number of and amounts paid on the shares held.

At an EGMS held on July 6, 2004, the shareholders approved a four-for-one stock split of the Company's common shares. This became effective on August 3, 2004.

At an EGMS held on December 17, 2007, the shareholders approved a ten-for-one stock split of the Company's common shares, with the objective of increasing the liquidity of the Company's shares. This became effective on the Indonesia Stock Exchange on January 15, 2008.

1. Umum (lanjutan)

Per 31 Desember 2013 dan 2012, komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

As at December 31, 2013 and 2012, the composition of the Company's Board of Commissioners, Audit Committee and Board of Directors were as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
Presiden Komisaris	Ricardo Rodrigues de Carvalho	Ricardo Rodrigues de Carvalho	President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris	Arief T. Surowidjojo*)	Arief T. Surowidjojo *)	Vice President Commissioner
Komisaris	Jennifer Anne Maki Gerd Peter Poppinga Mark James Travers Akira Nozaki Mikinobu Ogata Kevin James Graham Irwandy Arif *) Idrus Paturusi *)	Jennifer Anne Maki Gerd Peter Poppinga Mark James Travers Harumasa Kurokawa Mikinobu Ogata Conor Spollen Irwandy Arif *) Idrus Paturusi *)	Commissioners
Ketua Komite Audit	Arief T. Surowidjojo	Arief T. Surowidjojo	Chairman of Audit Committee
Anggota Komite Audit	Erry Firmansyah Sidharta Utama	Erry Firmansyah Sidharta Utama	Audit Committee Members
Presiden Direktur	Nicolas D. Kanter	Nicolas D. Kanter	President Director
Wakil Presiden Direktur	Bernardus Irmanto	Bernardus Irmanto	Vice President Director
Direktur	Febriany Eddy Josimar Souza Pires	Fabio Hilal Bechara Josimar Souza Pires Michael J. O'Sullivan	Directors

*) Komisaris Independen

*) Independent Commissioners

Perseroan mengadakan RUPST pada 23 April 2013 yang menyetujui antara lain, pembagian dividen final untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, penyisihan laba Perseroan sebagai dana cadangan sebesar AS\$6,7 juta, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

The Company held an AGMS on April 23, 2013, which approved, amongst others, distribution of the final dividend for the year ended December 31, 2012, the appropriation of US\$6.7 million of the Company's net profit to the general reserve, the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company and appointment of the public accountant who will audit the Company's financial statements for the year ending December 31, 2013.

Terkait dengan susunan Direksi, pemegang saham menyetujui penunjukan kembali anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir pada penutupan RUPST 2013, yaitu, Josimar Souza Pires sebagai Direktur, efektif sejak penutupan RUPST 2013 sampai dengan penutupan RUPST di tahun 2015. Lebih lanjut, para pemegang saham juga mengukuhkan pengunduran diri Michael J. O'Sullivan dan menyetujui penunjukan anggota Direksi baru, yaitu Febriany Eddy, efektif sejak penutupan RUPST 2013 sampai dengan penutupan RUPST di tahun 2014, yang diangkat sebagai Direktur menggantikan Fabio Hilal Bechara, yang telah secara efektif mengundurkan diri sebelum RUPST 2013. Terkait dengan susunan Dewan Komisaris, pemegang saham menyetujui penunjukan anggota baru Dewan Komisaris yaitu, Kevin James Graham, efektif sejak penutupan RUPST 2013 sampai dengan penutupan RUPST di tahun 2014, yang diangkat sebagai Komisaris menggantikan Conor Spollen yang telah secara efektif mengundurkan diri sebelum RUPST 2013.

With regard to composition of the Board of Directors, the shareholders approved the re-appointment of the member of the Board of Directors whose term of office ended at the closing of the 2013 AGMS, namely, Josimar Souza Pires as Director, effective as at the closing of the 2013 AGMS until the closing of the AGMS in 2015. Further, the shareholders also confirmed the resignation of Michael J. O'Sullivan and approved the appointment of a new member of the Board of Directors, Febriany Eddy, effective as at the closing of the 2013 AGMS until the closing of the AGMS in 2014, who was appointed as Director replacing Fabio Hilal Bechara, who effectively resigned as Director prior to the 2013 AGMS. With regard to composition of the Board of Commissioners, the shareholders approved the appointment of a new member of the Board of Commissioners, namely, Kevin James Graham, effective as at the closing of the 2013 AGMS until the closing of the AGMS in 2014, who was appointed as Commissioner replacing Conor Spollen, who has effectively resigned as Commissioner prior to the 2013 AGMS.

Pada tanggal 24 September 2013, Perseroan mengadakan RUPSLB, guna mengukuhkan pengunduran diri Harumasa Kurokawa, yang telah secara efektif mengundurkan diri sebagai Komisaris Perseroan sebelum RUPSLB. Pemegang saham juga menyetujui penunjukan anggota Dewan Komisaris baru, Akira Nozaki, efektif sejak penutupan RUPSLB sampai dengan penutupan RUPST di tahun 2014.

On 24 September 2013, the Company held an EGMS to ratify the resignation of Harumasa Kurokawa, who has effectively resigned as Commissioner prior to the EGMS. The shareholders also approved the appointment of a new member of the Board of Commissioners, Akira Nozaki, effective as at the closing of the EGMS until the closing of the AGMS in 2014.

Jumlah seluruh karyawan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah 3.183 (2012: 3.161) (tidak diaudit).

The total number of employees as at December 31, 2013 was 3,183 (2012: 3,161) (unaudited).

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan

Ikhtisar kebijakan akuntansi Perseroan yang signifikan berikut ini disajikan untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi laporan keuangan terlampir. Kebijakan akuntansi ini telah diterapkan secara konsisten dalam semua hal yang material untuk periode yang tercakup oleh laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan lain. Laporan keuangan Perseroan dibuat dan disetujui oleh Direksi pada tanggal 26 Februari 2014.

2.1. Penyajian laporan keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kontrak Karya dengan Pemerintah, pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS\$") dan dalam Bahasa Inggris.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang didasarkan pada konsep harga perolehan historis kecuali aset dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia juga mengharuskan manajemen untuk melakukan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan atau kompleksitas yang tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi merupakan hal yang signifikan dalam laporan keuangan, diungkapkan dalam Catatan 4.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi ribuan Dolar AS yang terdekat, yang merupakan mata uang penyajian dan fungsional, kecuali dinyatakan lain.

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

2.2. Penjabaran mata uang

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter yang signifikan dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada akhir periode. Penjabaran dari aset dan liabilitas lainnya umumnya dilakukan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Selama tahun berjalan, transaksi-transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku selama bulan berjalan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penjabaran dan transaksi dalam mata uang asing dibukukan pada laporan laba rugi.

2.3. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank, dan investasi jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya disajikan secara terpisah sebagai "kas yang dibatasi penggunaannya".

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengklarifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas disajikan setelah dikurangi cerukan.

2.4. Piutang usaha dan non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah yang masih harus dibayar oleh pelanggan untuk nikel dalam *matte* yang dijual dalam transaksi bisnis pada umumnya. Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang non-usaha dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Perseroan.

2. Summary of significant accounting policies

The following summary of the significant accounting policies of the Company is presented to assist the reader in evaluating the accompanying financial statements. These policies have been followed consistently in all material respects for the periods covered in the financial statements, unless otherwise stated. The Company's financial statements were prepared and approved by the Board of Directors on February 26, 2014.

2.1. Presentation of financial statements

As required by its CoW with the Government, the Company maintains its books in United States Dollars ("US Dollars" or "US\$") and in English.

The financial statements are prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, based on the historical cost concept except for financial assets and liabilities at fair value through profit or loss, and using the accrual basis except for the statements of cash flows.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. The accounting principles generally accepted in Indonesia also require management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of US Dollars, which is the presentation and functional currency, unless otherwise stated.

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates.

2.2. Translation of currencies

At each statement of financial position date, significant monetary assets and liabilities in currencies other than US Dollars are translated into US Dollars at period-end exchange rates. The translation of all other assets and liabilities are generally recognized at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions.

During the year, transactions in currencies other than US Dollars are translated at rates prevailing during each month. Gains or losses resulting from the translation and from foreign exchange transactions are included in profit or loss.

2.3. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity period of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

Cash and cash equivalents which are restricted for use, are presented separately as "restricted cash".

The statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents are presented net of overdrafts.

2.4. Trade and non-trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for nickel in *matte* sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Non-trade receivables from related parties are receivables reflecting loans given to related parties of the Company.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.4. Piutang usaha dan non-usaha (lanjutan)

Piutang usaha dan non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Penyisihan untuk penurunan nilai dari piutang usaha dan non-usaha dibuat ketika terdapat bukti objektif bahwa Perseroan tidak dapat menagih keseluruhan nilai yang terdapat pada ketentuan awal dari piutang tersebut. Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur, kemungkinan bahwa debitur mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan, dan wanprestasi atau tunggakan terhadap pembayaran dipertimbangkan sebagai indikator bahwa piutang usaha dan non-usaha mengalami penurunan nilai. Nilai dari penyisihan adalah selisih antara nilai tercatat piutang dengan nilai kini dari perkiraan arus kas dimasa datang, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga efektif awal. Nilai tercatat dari aset dikurangi pos cadangan, dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi. Ketika piutang usaha dan non-usaha tidak dapat tertagih, piutang usaha dan non-usaha dihapus terhadap pos cadangan untuk piutang usaha dan non-usaha. Pemulihan jumlah tertagih yang sebelumnya dihapus dikreditkan pada laporan laba rugi.

2.5. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai dari persediaan barang jadi nikel dan nikel dalam proses dinilai dengan metode biaya produksi rata-rata dan persediaan bahan pembantu (*supplies*) dinilai dengan metode harga pembelian rata-rata.

Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya overhead yang terkait secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

2.6. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar di muka dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaatnya.

2.7. Aset tetap – kepemilikan langsung

Aset tetap yang diperoleh secara langsung diakui berdasarkan harga perolehan historis, dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Biaya pengembangan tambang merupakan biaya-biaya yang terjadi di area penambangan sebelum aktivitas penambangan dimulai. Termasuk kedalam biaya ini adalah biaya-biaya untuk pembuatan jalan yang memberikan akses ke area-area tambang.

Biaya-biaya selanjutnya dikursertakan kedalam nilai tercatat aset atau diakui sebagai aset terpisah, jika memadai, hanya ketika besar kemungkinan masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang terkait dengan aset tetap akan mengalir kedalam Perseroan dan biaya dari aset tetap tersebut dapat diukur secara andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihentikan pengakuannya. Keseluruhan perbaikan dan perawatan dibebankan kedalam laporan laba rugi pada periode keuangan dimana hal tersebut terjadi.

Biaya eksplorasi dibebankan pada saat terjadinya.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi sebagai akibat dari penghapusan aset tetap tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.4. Trade and non-trade receivables (continued)

Trade and non-trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less provision for impairment. A provision for impairment of trade and non-trade receivables is established when there is objective evidence that the Company will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. Significant financial difficulties of the debtor, the probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganization, and default or delinquency in payments are considered indicators that the trade and non-trade receivable is impaired. The amount of the provision is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account, and the amount of the loss is recognized in profit or loss. When a trade and non-trade receivable is uncollectible, it is written off against the allowance account for trade and non-trade receivables. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited to profit or loss.

2.5. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost of finished nickel inventory and nickel in process is determined on an average production cost basis and supplies at an average purchase cost basis.

Cost of finished goods and work in progress is comprised of materials, labor and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads. Net realizable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the costs of completion and the estimated selling expenses.

2.6. Prepayments

Prepaid expenses are charged to profit or loss on a straight-line basis over the expected period of benefit.

2.7. Fixed assets – direct ownership

Fixed assets directly acquired are stated at historical cost, less accumulated depreciation. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

Mine development costs represent expenditures incurred in a mining area before mining activities commence. Included in these costs is construction of roads providing access to mining areas.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that the future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Exploration costs are expensed as incurred.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognized in profit or loss.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.8. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset-aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Apabila dalam suatu kontrak sewa porsi yang signifikan atas risiko dan manfaat kepemilikan aset tetap berada di tangan *lessor*, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dibebankan ke laporan laba rugi atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Sewa aset tetap dimana Perseroan memiliki secara substansi seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini pembayaran sewa minimum.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara bagian yang merupakan pelunasan liabilitas dan bagian yang merupakan beban keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo pembiayaan. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dengan metode penyusutan aset tetap yang dimiliki sendiri. Jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Perseroan akan mendapatkan kepemilikan atas aset pada akhir masa sewa, aset tersebut disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset dan masa sewa.

2.9. Aset tetap dalam penyelesaian

Akumulasi biaya dari konstruksi bangunan dan instalasi mesin dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam penyelesaian. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke dalam aset tetap ketika konstruksi telah selesai. Depresiasi dibebankan sejak tanggal dimana aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Biaya keuangan dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat, dikapitalisasi sampai proses pembangunan tersebut selesai. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu yang memenuhi syarat. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang seluruh biaya pinjaman atas seluruh pinjaman yang belum dibayarkan, diluar pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset dalam penyelesaian tertentu yang memenuhi syarat.

2.10. Penyusutan, deplesi dan amortisasi

Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus yang didasarkan atas laksanakan masa manfaat suatu aset, estimasi masa produksi cadangan bijih, atau selama masa berlakunya Kontrak Karya yang mana yang lebih dulu. Pengecualian terhadap kebijakan ini adalah untuk fasilitas bendungan air yang penyusutannya dilakukan selama masa manfaat 40 tahun berdasarkan Keputusan Pemerintah Indonesia tahun 1975, seperti yang dijelaskan pada Catatan 1 atas laporan keuangan ini.

Estimasi masa manfaat untuk penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	5 - 40
Jalan dan jembatan	5 - 30
Bangunan	5 - 30
Pengembangan tambang	5 - 30
Pabrik dan mesin	5 - 30
Perabotan dan peralatan kantor	5

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.8. Leases

Determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on substance of the arrangement and assessment of whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases are charged to profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

Leases of fixed assets where the Company has substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased property and the present value of the minimum lease payments.

Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate of interest on the finance balance outstanding. Fixed assets acquired under finance leases are depreciated similarly to owned assets. If there is no reasonable certainty that the Company will hold the ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term.

2.9. Construction in progress

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of machinery are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

Finance and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expended on the qualifying asset. The capitalization rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specially for the purpose of obtaining a qualifying asset under construction.

2.10. Depreciation, depletion and amortization

Depreciation of fixed assets is calculated on the straight-line method based on the earlier of the estimated useful life of the asset, the estimated period of production from ore reserves, or the period of the CoW. An exception to this policy is the hydroelectric dam facilities, which are depreciated over a 40-year useful life based on the 1975 Decree of the Indonesian Government, as referred to in Note 1 to these financial statements.

The estimated useful lives of fixed assets used for depreciation are as follows:

	Years
Hydroelectric dam buildings and facilities	5 - 40
Roads and bridges	5 - 30
Buildings	5 - 30
Mine development	5 - 30
Plant and machinery	5 - 30
Furniture and office equipment	5

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.10. Penyusutan, deplesi dan amortisasi (lanjutan)

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Perseroan mengalokasikan bagian dari aset tetap yang biaya perolehannya signifikan dan mendepresiasi komponen tersebut secara terpisah jika bagian tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda.

Amortisasi biaya pemugaran dihitung berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.11. Penurunan nilai dari aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas - sebagai contoh, goodwill atau aset tak berwujud yang belum siap digunakan - tidak diamortisasi dan dilakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan. Aset yang diamortisasi atau disusutkan ditelaah untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan dalam keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan selain goodwill yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain goodwill, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan standar akuntansi lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dibalik lagi.

2.12. Pengeluaran untuk lingkungan hidup

Operasi Perseroan telah, dan di masa akan datang mungkin akan dipengaruhi oleh secara berbeda dari waktu ke waktu perubahan-perubahan dalam peraturan perundangan mengenai lingkungan hidup. Kebijakan Perseroan adalah memenuhi atau, jika mungkin, melampaui semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut, dengan menerapkan langkah-langkah yang secara teknis telah terbukti dan layak secara ekonomis.

Pengeluaran-pengeluaran yang bertubung dengan program lingkungan hidup dan reklamasi yang sedang berjalan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, atau dikapitalisasi dan disusutkan tergantung pada masa manfaat ekonomisnya. Cadangan Jaminan Reklamasi juga telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku (lihat Catatan 22a). Disamping itu, provisi atas penghentian pengoperasian aset telah diakui sebesar taksiran biaya penutupan area tambang, penghentian dan pembongkaran fasilitas.

Provisi atas penghentian pengoperasian aset dicatat untuk mengakui kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian penggunaan aset tetap yang berasal dari akuisisi, pembangunan atau pengembangan darat atau operasi normal aset tetap. Penghentian penggunaan aset tetap ini adalah penarikan selain penghentian sementara pemakaian termasuk penjualan, penelantaran, pendaur-ulangan/penghapusan dengan cara lainnya.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.10. Depreciation, depletion and amortization (continued)

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

The Company allocates significant parts of the fixed asset costs and depreciates separately each significant part if those parts have different useful lives.

Amortization of refurbishment costs is calculated on the estimated economic useful life of the refurbishment using a straight-line method.

2.11. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life - for example, goodwill or intangible assets not ready to use - are not subject to amortization and are tested annually for impairment. Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognized in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other accounting standards. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

2.12. Environmental expenditures

The operations of the Company have been, and may in the future be affected from time to time to varying degrees by changes in environmental regulations. The Company's policy is to meet or, if possible, surpass the requirements of all applicable regulations issued by the Government by the application of technically proven and economically feasible measures.

Expenditures that relate to ongoing environmental and reclamation programs are charged to profit or loss as incurred, or capitalized and depreciated depending on their future economic benefits. A Reclamation Guarantee Reserve has also been set up in accordance with applicable Government requirements (refer to Note 22a). In addition, a provision for asset retirement has been recognized for the estimated costs of mine closure, decommissioning and dismantling of facilities.

The provision for asset retirement is provided for legal or constructive obligations associated with the retirement of a tangible long-lived asset that results from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of a long-lived asset. The retirement of a long-lived asset is its other than temporary removal from service including its sale, abandonment, recycling or disposal in some other manner.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.12. Pengeluaran untuk lingkungan hidup (lanjutan)

Provisi atas penghentian pengoperasian aset diakui sebagai liabilitas pada saat kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian pengoperasian sebuah aset timbul, dan pada awalnya diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Disamping itu, biaya penghentian pengoperasian aset dalam jumlah yang sama dengan jumlah liabilitasnya dikapitalisasi sebagai bagian dari aset yang berkaitan yang kemudian disusutkan nilainya sepanjang masa manfaat aset tersebut. Peningkatan kewajiban ini sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan. Kewajiban ini dibebankan pada lebih dari satu periode pelaporan, jika kejadian yang menimbulkan kewajiban itu timbul dalam lebih dari satu periode pelaporan. Misalnya, bila ada sebuah fasilitas yang ditutup untuk selamanya tetapi rencana penutupan ditetapkan lebih dari satu periode pelaporan, biaya penutupan tersebut akan diakui selama periode pelaporan sampai rencana penutupan selesai.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban tersebut yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada periode berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laporan laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Perseroan akan memperimbangakan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Perseroan akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan mencatat kerugian dari penurunan nilai, jika ada.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penghentian pengoperasian aset, dimana Perseroan merupakan pihak yang bertanggung jawab dan diidentifikasi adanya suatu liabilitas serta jumlahnya dapat diukur, maka Perseroan akan mencatat estimasi liabilitas tersebut. Dalam menentukan keberadaan liabilitas yang berkaitan dengan lingkungan, Perseroan mengacu pada kriteria pengakuan liabilitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2.13. Pengakuan pendapatan dan beban

Penjualan merupakan penghasilan yang diperoleh dari penjualan produk Perseroan. Penjualan diakui sebagai penghasilan ketika terjadi pengalihan risiko kepada pelanggan berdasarkan ketentuan dalam kontrak penjualan, dan:

- Produk tersebut berada dalam kondisi yang layak untuk dikirimkan dan tidak diperlukan proses lebih lanjut oleh, atau atas nama, Perseroan;
- Besar kemungkinan Perseroan memperoleh manfaat ekonomis dari transaksi tersebut;
- Produk telah diserahkan kepada pelanggan dan secara fisik sudah tidak berada dalam pengendalian Perseroan (atau kepemilikan atas produk telah terlebih dahulu beralih ke pelanggan); dan
- Harga dan serta biaya penjualan dapat ditentukan dengan tingkat akurasi yang memadai.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan metode akrual.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.12. Environmental expenditures (continued)

Provisions for asset retirement are recognized as liabilities when a legal or constructive obligation with respect to the retirement of an asset is incurred, with the initial measurement of the obligation measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects the current market assessment of the time value of money and the risks specific to the obligation. In addition, an asset retirement cost equivalent to the liabilities is capitalized as part of the related asset's carrying value and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life. The increase in these obligations due to passage of time is recognized as finance costs. These obligations are incurred over more than one reporting period when the events that create the obligation occur over more than one reporting period. For example, if a facility is permanently closed but the closure plan is developed over more than one reporting period, the cost of the closure of the facility is incurred over the reporting periods when the closure plan is finalized.

The changes in the measurement of these obligations that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits (e.g. cash flows) required to settle the obligation, or a change in the discount rate will be added to or deducted from, the cost of the related asset in the current period. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognized immediately in profit or loss. If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Company will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If there is such an indication, the Company will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will account for any impairment loss incurred, if any.

For environmental issues that may not involve the retirement of an asset, where the Company is a responsible party and it is determined that a liability exists, and amounts can be quantified, the Company accrues the estimated liability. In determining whether a liability exists in respect of such environmental issues, the Company applies the criteria for liability recognition under applicable accounting standards.

2.13. Revenue and expense recognition

Sales represent revenue earned from the sale of the Company's products. Sales are recognized as revenue when there has been passing of the risk of ownership to the customer, based on the terms of the contract, and:

- The product is in a form suitable for delivery and no further processing is required by, or on behalf of, the Company;
- Economic inflow related to the transaction is probable;
- The product has been dispatched to the customer and is no longer under the physical control of the Company (or ownership in the product has earlier been passed to the customer); and
- The selling price and expenses can be determined with reasonable accuracy.

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.14. Pajak penghasilan

2.14. Income taxes

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak itu berkaitan dengan kejadian atau transaksi yang diakui pada laba komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas. Pada kasus ini, masing-masing beban pajak juga diakui pada laba komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas. Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca dalam negara dimana Perseroan beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam laporan pajak terkait dengan situasi dimana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi. Provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan untuk dibayarkan pada otoritas pajak.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax expense is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively. The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date in the country where the Company operates and generates taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which an applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan memakai metode "balance sheet liability", untuk semua perbedaan temporer yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan antara dasar perpajakan untuk aset dan liabilitas dengan nilainya dalam laporan keuangan. Untuk menentukan jumlah pajak penghasilan tangguhan digunakan tarif pajak yang berlaku saat ini atau yang secara substansial telah berlaku.

Deferred income taxes are provided, using the "balance sheet liability method", for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values in the financial statements. Currently enacted or substantively enacted tax rates are used to determine deferred income taxes.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dimanfaatkan.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilized.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan Perseroan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan banding, pada saat keputusan banding tersebut ditetapkan.

Amendments to the Company's taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is determined.

2.15. Liabilitas imbalan kerja

2.15. Employment benefit liabilities

a. Imbalan pensiun

a. Pension benefits

Perseroan memiliki program pensiun imbalan pasti dan program pensiun iuran pasti yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan/atau kebijakan yang dimiliki oleh Perseroan. Program pensiun imbalan pasti pada umumnya didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun yang besarnya ditentukan dengan perhitungan aktuarial berkala. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menyatakan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi. Program pensiun imbalan pasti ini kemudian dirubah menjadi program pensiun iuran pasti pada akhir 2012. Lihat Catatan 18 tentang proses pembubaran Dana Pensiun International Nickel Indonesia ("DPI").

The Company has maintained both defined benefit and defined contribution pension plans in accordance with prevailing labor-related laws and regulations and/or the Company's policies. The defined benefit pension plan was previously funded through payments to trustee-administered funds as determined by periodic actuarial calculations. A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension benefits to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service or compensation. The defined benefit pension plan was subsequently replaced by a defined contribution pension plan at the end of 2012. Refer to Note 18 regarding the liquidation process of Dana Pensiun International Nickel Indonesia ("DPI").

Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal posisi keuangan dikurangi dengan nilai wajar aset program, setelah disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi Pemerintah yang berkualitas tinggi (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan saat jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan saat jatuh tempo liabilitas pensiun yang bersangkutan.

The liability recognized in the statements of financial position in respect of the defined benefit pension plan is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and past service costs. The defined benefit pension plan liability is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit pension plan liabilities is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality Government bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the term of the related pension liability.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada pos pendapatan komprehensif lainnya pada periode terjadinya. Akibat dari perubahan metode pengakuan, kerugian atau keuntungan aktuarial dari periode sebelum 1 Januari 2012 diakui segera ke pos ekuitas pada pendapatan komprehensif lainnya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period of which they arise. Due to the change in method of recognition, the actuarial gain or loss from the period before January 1, 2012 was recognized immediately to equity in other comprehensive income.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.15. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

a. Imbalan pensiun (lanjutan)

Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak (*vested*). Jika belum menjadi hak (*non-vested*) akan diakui sebagai beban selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested* dengan metode garis lurus.

Sebagaimana dijelaskan diatas, program pensiun iuran pasti berlaku semenjak akhir 2012. Program pensiun iuran pasti merupakan program pensiun yang dibayarkan oleh Perseroan dengan metode iuran tetap kepada pengelola dana pensiun baik yang wajib, berdasarkan kontrak maupun sukarela. Namun, dikarenakan Undang-undang ("UU") Ketenagakerjaan No. 13/2003 mewajibkan Perseroan untuk memberikan imbalan kepada karyawan dalam usia pensiun dengan jumlah manfaat tertentu berdasarkan masa kerjanya, ada kemungkinan bahwa Perseroan harus melakukan pembayaran imbalan tambahan apabila jumlah akumulasi dana iuran pensiun pada program pensiun iuran pasti lebih kecil dari jumlah imbalan pensiun yang diharuskan berdasarkan UU Ketenagakerjaan (lihat Catatan 18).

Perseroan mengakui kelebihan pembayaran (jika ada) yang akan diperlukan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, atas program pensiun iuran pasti, sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan, akun liabilitas imbalan pascakerja.

Perhitungan kewajiban atas imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris independen menunjukkan bahwa perkiraan imbalan pensiun yang disediakan oleh program pensiun Perseroan yang ada akan memenuhi persyaratan minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan.

Termasuk di dalam liabilitas imbalan pensiun ini adalah bonus masa kerja yaitu tambahan imbalan yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan yang mencapai usia pensiun normal (55 tahun). Imbalan ini merupakan tambahan dari program pensiun reguler. Besarnya imbalan ini dihitung oleh Perseroan berdasarkan golongan dan usia karyawan.

b. Imbalan kesehatan pascakerja

Perseroan memberikan imbalan kesehatan pascakerja untuk para karyawan yang telah pensiun. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan dipekerjakan sebelum Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") ditandatangani pada bulan Januari 2011. Perkiraan biaya imbalan ini diakui sebagai akrual sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. Liabilitas ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang berkualifikasi.

c. Imbalan pesangon

Pesangon adalah pemutusan hubungan kerja terhutang pada saat karyawan diberhentikan sebelum usia pensiun normal. Perseroan mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja pada saat Perseroan menunjukkan komitmennya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih 12 bulan setelah tanggal posisi keuangan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kininya.

d. Program bagi laba dan bonus

Perseroan mengakui liabilitas dan beban untuk bonus dan pembagian laba, berdasarkan rumus-rumus tertentu yang mempertimbangkan berbagai aspek kinerja Perseroan. Perseroan mengakui adanya provisi ini apabila terdapat kewajiban kontraktual atau apabila praktik di masa lalu telah menimbulkan kewajiban ini.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.15. Employment benefit liabilities (continued)

a. Pension benefits (continued)

Past service costs are directly expensed if benefits are already vested. Where benefits are not yet vested the past service costs are recognized over the average vesting period under a straight-line method.

As mentioned above, the defined contribution pension plan is applicable starting from the end of 2012. The defined contribution pension plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions to trustee-administered pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Labor Law No. 13/2003 requires the Company to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount, as required by the Labor Law, in particular when the cumulative contributions are less than that amount (refer to Note 18).

The Company recognizes the excess (if any) of the payments that would be required under the Labor Law, over the defined contributions paid, as a liability in the statements of financial position, accounted for as post-employment benefit liabilities.

The calculation of the pension benefit obligation performed by the independent actuary, shows that the expected pension benefits provided by the Company's pension plan will meet the minimum requirements of the Labor Law.

Included in the liabilities recognized for pension benefits, is an additional benefit provided by the Company, referred to as a service bonus, which is provided to employees who reach normal retirement age (55 years). This benefit is in addition to the regular pension benefit provided under the plan. The Company has calculated this benefit based on the grade and age of employees.

b. Post-retirement medical benefits

The Company provides post-retirement healthcare benefits to eligible retirees. The entitlement to these benefits is usually given to those employees who remain in service up to retirement age and were hired prior to the signing of the Collective Labor Agreement ("CLA") in January 2011. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to that for defined benefit pension plans. A qualified independent actuary values this liability annually.

c. Termination benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date. The Company recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan with low possibility of withdrawal. Termination benefits payable more than 12 months after the financial position date are discounted to reflect present value.

d. Profit sharing and bonus plans

The Company recognizes a liability and an expense for bonuses and profit sharing, based on the applicable formulas which consider various aspects of the Company's performance. The Company recognizes a provision where it is contractually obligated or when a past practice has created a constructive obligation.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.15. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

e. Pembayaran berbasis saham

Perseroan memberikan imbalan opsi saham kepada karyawan tertentu yang besarnya setara dengan kas, sebesar selisih antara harga pasar saham dengan harga opsi saham pada tanggal jatuh tempo. Biaya imbalan ini dicatat ketika harga pasar melebihi harga opsi saham, sebesar selisih antara kedua harga tersebut. Perubahan yang terjadi pada harga pasar saham antara tanggal pemberian imbalan dan tanggal pencatatan akan dicatat sebagai perubahan estimasi biaya imbalan tersebut dan diakui pada laporan laba rugi.

2.16. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang tersedia untuk pemegang saham dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

2.17. Pelaporan segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2.18. Aset keuangan

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori berikut (i) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman dan piutang, dan (iii) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Pengklasifikasian tergantung kepada tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangannya saat pengakuan awal. Pengakuan atas pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan – tanggal dimana Perseroan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

(i) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diklasifikasikan untuk tujuan diperdagangkan. Aset keuangan akan diklasifikasikan untuk tujuan diperdagangkan apabila tujuan utama perolehannya adalah untuk dijual atau dibeli kembali dalam jangka pendek dan terdapat bukti aktual akan adanya pola pengambilan keuntungan dalam jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai diperdagangkan kecuali jika mereka ditujukan dan berlaku efektif sebagai instrumen lindung nilai. Aset pada kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan; jika tidak, aset tersebut diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2013, tidak ada aset keuangan yang dikategorikan sebagai diperdagangkan (2012: nil).

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.15. Employment benefit liabilities (continued)

e. Share-based payments

The Company awards certain employees share option equivalents to receive cash, equal to the excess of the market price of the Company's shares at the exercise date over the option price. The cost is measured as the amount by which the quoted market value of the vested shares covered by the grant exceeds the option price. The changes in the quoted market value of the shares between the date of the grant and the measurement date result in a change in the estimate of the compensation and are recognized in profit or loss.

2.16. Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing income for the year attributable to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding for the relevant year.

2.17. Segment reporting

An operating segment is a component of an enterprise:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to the transactions with different components within the same entity);
- whose operating results are regularly reviewed by the enterprise's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

2.18. Financial assets

The Company classifies its financial assets into the categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, and (iii) available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition. Recognition of regular purchases and sale of financial assets are recognized on the trade-date – the date on which the Company commits to purchase or sell the asset.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets classified as held for trading. A financial asset is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments. Assets in this category are classified as current assets if they are expected to be settled within 12 months; otherwise, they are classified as non-current.

As at December 31, 2013 there are no financial assets categorized as held for trading (2012: nil).

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.18. Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap dan dapat ditentukan dan tidak diperdagangkan pada pasar aktif. Piutang dan pinjaman awalnya diakui pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar, kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang ini dimasukkan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman dan piutang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, piutang pihak berelasi non-usaha dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

(iii) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual merupakan aset keuangan yang diperoleh dan disimpan untuk periode tidak dapat ditentukan, dimana dapat dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, nilai tukar atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo maupun aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual dimasukkan sebagai aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud melepasnya dalam kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual diakui awalnya pada nilai wajar, ditambah dengan biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada nilai wajar dengan laba atau ruginya dilaporkan pada pendapatan komprehensif lainnya, kecuali untuk rugi penurunan nilai dan laba atau rugi selisih kurs, sampai aset bersangkutan dihentikan pengakuannya. Jika suatu aset keuangan yang tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lainnya akan diakui pada laporan laba rugi. Akan tetapi, bunga akan dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan laba atau rugi selisih kurs untuk aset moneter yang diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual akan diakui pada laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2013, tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual (2012: nil).

Liabilitas keuangan

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba atau rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

(i) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan akan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk diperdagangkan apabila pada saat perolehan awalnya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam jangka pendek dan terdapat bukti aktual akan adanya pola pengambilan keuntungan dalam jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai diperdagangkan kecuali jika mereka ditujukan dan berlaku efektif sebagai instrument lindung nilai.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada nilai wajarnya, dimana keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2013, tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas pada nilai wajar melalui laba rugi (2012: nil).

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.18. Financial assets (continued)

(ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed and determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. They are included in current assets, except for maturities greater than 12 months after the end of reporting period. These are classified as non-current assets. Loans and receivables consist of cash and cash equivalents, trade receivables, other current financial assets, non-trade receivables from related parties and other non-current assets.

(iii) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are financial assets that are intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity investments or financial assets at fair value through profit or loss. They are included in non-current assets unless the investment matures or management intends to dispose of it within 12 months of the end of the reporting period.

Available-for-sale financial assets are initially recognized at fair value, plus transaction costs, and measured subsequently at fair value with gains and losses being recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets are derecognized. If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. However, interest is calculated using the effective interest rate method and foreign currency gains or losses on monetary assets classified as available-for-sale are recognized in profit or loss.

As at December 31, 2013, there are no financial assets classified as available-for-sale financial assets (2012: nil).

Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities into the categories of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

(i) Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss are financial liabilities classified as held for trading. A financial liability is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments.

Financial liabilities carried at fair value through profit or loss are initially recognized at fair value and subsequently carried at fair value, with gains and losses recognized in profit or loss.

As at December 31, 2013, there are no financial liabilities classified as liabilities at fair value through profit or loss (2012: nil).

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.18. Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi akan masuk ke dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah utang lainnya, biaya yang masih harus dibayar dan pinjaman.

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar dari instrumen keuangan yang diperdagangkan pada pasar aktif ditentukan melalui kuotasi harga pasar pada tanggal posisi keuangan. Kuotasi harga pasar yang terdaftar digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki Perseroan adalah harga penawaran saat ini, sedangkan untuk liabilitas keuangan, digunakan harga pemintaannya.

Nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan melalui teknik valuasi. Perseroan menggunakan arus kas yang didiskontokan dan menggunakan asumsi yang didasarkan pada kondisi pasar pada setiap tanggal posisi keuangan dimana digunakan juga untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan lainnya.

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

2.19. Penurunan nilai aset keuangan

(i) Aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Pada setiap tanggal posisi keuangan Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang Perseroan gunakan untuk menentukan bahwa ada bukti objektif dari suatu penurunan nilai meliputi:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan kerlinganan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.18. Financial assets (continued)

(ii) Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss fall into this category and are measured at amortized cost. Financial liabilities measured at amortized cost are other payables, accrued expenses and borrowings.

Fair value estimation

The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the financial position date. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price while for financial liabilities it uses offer price.

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined by using valuation techniques. The Company uses discounted cash flow methods and makes assumptions that are based on market conditions existing at each financial position date which are used to determine the fair value of the remaining financial instruments.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously.

2.19. Impairment of financial assets

(i) Assets carried at amortized cost

The Company assesses at each balance sheet date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The criteria that the Company uses to determine that there is objective evidence of an impairment loss include:

- significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- the lenders, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider, if the borrower did not experience such difficulty;
- it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:
 - adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
 - national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.19. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

(i) Aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

(ii) Aset yang tersedia untuk dijual

Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam ekuitas dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

2.20. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perseroan mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran untuk paling tidak 12 bulan setelah tanggal posisi keuangan.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.19. Impairment of financial assets (continued)

(i) Assets carried at amortized cost (continued)

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the carrying amount of the asset and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the original effective interest rate of the financial asset. The carrying amount of the asset is reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in profit or loss.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognized impairment loss will be reversed either directly or by adjusting an allowance account. The reversal will not result in the carrying value of the financial asset exceeding what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date of the impairment reversal. The reversal amount will be recognized in profit or loss.

(ii) Assets classified as available-for-sale

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized directly in equity and there is objective evidence that the assets are impaired, the cumulative loss that had been recognized in equity will be reclassified from equity to profit or loss even though the financial asset has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified from equity to profit or loss will be the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

The impairment losses recognized in profit or loss for an investment in an equity instrument classified as available-for-sale will not be reversed through profit or loss.

If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available-for-sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss, the impairment loss is reversed through profit or loss.

2.20. Borrowings

Borrowings are recognized initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortized cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognized in profit or loss over the period of the borrowings, using the effective interest rate method.

Fees paid on establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until draw-down occurs. To the extent there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalized as a pre-payment for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the balance sheet date.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.21. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam transaksi bisnis pada umumnya. Utang usaha dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2.22. Dividen

Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan Perseroan pada periode dimana dividen tersebut dideklarasikan.

2.23. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Seorang individu atau anggota keluarga dekat dari individu tersebut akan berelasi dengan entitas pelapor ketika individu bersangkutan:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- (iii) merupakan manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh individu berelasi seperti didefinisikan diatas.
- (vii) Orang yang memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

3. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

3.1. Standar baru dan revisi yang diadopsi oleh Perseroan yang wajib diterapkan untuk pertama kali pada tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013

- Penyempurnaan tahunan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 60 - Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Perkembangan dari standar ini terutama berhubungan dengan pengungkapan aset keuangan, termasuk penghapusan beberapa pengungkapan yang diwajibkan sebelumnya.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.21. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

2.22. Dividends

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognized as a liability in the Company's statements of financial position in the period in which the dividends are declared.

2.23. Related party transactions

A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:

- (i) has control or joint control over the reporting entity;
- (ii) has significant influence over the reporting entity; or
- (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself is such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a related person as identified above.
- (vii) A person that has control or joint control over the reporting entity that has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

3. Changes in accounting policies and disclosure

3.1. New and amended standards adopted by the Company that are mandatory for the first time for the financial year beginning on January 1, 2013

- Annual improvement of Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 60 - Financial Instruments: Disclosures

The improvement of this standard mainly relates to the disclosure of financial assets, including the removal of some previously required disclosures.

3. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

3.2. Standar dan interpretasi baru dan revisi yang wajib diterapkan untuk pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 atau periode setelahnya, tetapi saat ini tidak material dan/atau tidak relevan terhadap Perseroan (meskipun dapat mempengaruhi akuntansi untuk transaksi dan peristiwa masa depan)

- PSAK No. 38 - Kombinasi Bisnis pada Entitas Sepengendali.

Pencabutan standar akuntansi

Pencabutan standar dan interpretasi ini tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak material atas jumlah yang dilaporkan atas periode berjalan atau periode sebelumnya:

- PSAK No. 51 - Akuntansi Kuasi-Reorganisasi.

3.3. Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, tetapi berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014 dan tidak diterapkan lebih awal

- Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 29 - Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka.

ISAK No. 29 menetapkan akuntansi untuk biaya pembuangan material *overburden* (pengupasan) dalam tahap produksi tambang. Interpretasi ini dikembangkan untuk mengatasi keragaman saat ini dalam praktik. Beberapa entitas telah mengakui semua biaya pengupasan sebagai biaya produksi sementara entitas lain memanfaatkan sebagian atau seluruh biaya pengupasan tanah sebagai aset.

Interpretasi ini mungkin memerlukan entitas pertambangan untuk menghapus aset pengupasan untuk saldo laba jika aset tidak dapat dikaitkan dengan komponen utama yang diidentifikasi. Interpretasi tersebut juga mungkin memerlukan entitas yang saat ini mengalokasikan biaya pengupasan tanah mereka sebagai biaya produksi untuk meninjau kembali pendekatan mereka dan mengkapitalisasi sebagian dari biaya mereka.

Perseroan sedang mengevaluasi dampak atas standar ini terhadap kebijakan akuntansinya saat ini, yang mengakui biaya pengupasan tanah semata-mata sebagai biaya produksi. Interpretasi ini berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014, dimana penerapan dini atas interpretasi ini diperbolehkan.

Berikut adalah interpretasi standar baru yang berlaku efektif untuk pertama kalinya pada tahun buku yang akan dimulai 1 Januari 2014, yang tidak akan berdampak material terhadap laporan keuangan Perseroan:

- ISAK No. 27 - Pengalihan Aset dari Pelanggan; dan
- ISAK No. 28 - Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas.

Pada saat penerbitan laporan keuangan ini, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar/interpretasi ini dan pengaruhnya pada laporan keuangan Perseroan.

3. Changes in accounting policies and disclosure (continued)

3.2. New and amended standards and interpretations mandatory for the first time for financial years beginning on or after January 1, 2013 or later periods, but not currently material and/or not relevant to the Company (although they may affect the accounting for future transactions and events)

- SFAS No. 38 - Business Combination on Entities under Common Control.

Withdrawal of accounting standards

The withdrawal of these standards and interpretations did not result in significant changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial period:

- SFAS No. 51 - Quasi Reorganization.

3.3. New standards, amendments and interpretations issued but effective for financial years beginning on or after January 1, 2014 and not early adopted

- Interpretation of Statement of Financial Accounting Standards ("ISFAS") No. 29 - Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine.

ISFAS No. 29 sets out the accounting for overburden waste removal (stripping) costs in the production phase of a mine. The interpretation was developed to address current diversity in practice. Some entities have judged all stripping costs as a cost of production while other entities capitalize some or all stripping costs as an asset.

The interpretation may require mining entities to write off existing stripping assets to opening retained earnings if the assets cannot be attributed to an identifiable component of an ore body. The interpretation may also require entities that presently allocate their stripping costs as a production cost to revisit their approach and capitalize a portion of their costs.

The Company is currently assessing the impact that this standard will have on its existing accounting policy, which is to treat stripping costs solely as production costs. This interpretation is effective for annual periods beginning on or after January 1, 2014, wherein earlier application of this interpretation is allowed.

Below are the new ISFAS that are effective for the first time for the financial year beginning on January 1, 2014 that expected will not have a material impact for the Company's financial statements:

- ISFAS No. 27 - Transfer of Assets from Customers; and
- ISFAS No. 28 - Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments.

As at the issuance of these financial statements, management is still evaluating the impact of these revised standards/interpretations and their effect on the Company's financial statements.

3. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

3.4 Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, tetapi berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan tidak diterapkan lebih awal

- PSAK No. 65 - Laporan Keuangan Konsolidasian *);
- PSAK No. 66 - Pengaturan Bersama *);
- PSAK No. 67 - Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain *);
- PSAK No. 68 - Pengukuran Nilai Wajar *);
- PSAK No. 1 (Revisi 2013) - Penyajian Laporan Keuangan *);
- PSAK No. 4 (Revisi 2013) - Laporan Keuangan Tersendiri *);
- PSAK No. 15 (Revisi 2013) - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama *); dan
- PSAK No. 24 (Revisi 2013) - Imbalan Kerja *).

Pada saat penerbitan laporan keuangan ini, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar/interpretasi ini dan pengaruhnya pada laporan keuangan Perseroan.

*) Penerapan dini revisi dan standar baru diatas sebelum 1 Januari 2015 tidak diijinkan.

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjen pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi dan penilaian tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa mendatang yang memungkinkan berdasarkan kondisi yang ada.

Perseroan telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut di mana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan di mana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan dalam periode mendatang.

Rincian lebih lanjut mengenai sifat dari asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi tersebut dapat ditemukan dalam catatan yang relevan atas laporan keuangan.

4.1. Estimasi cadangan

Cadangan adalah estimasi jumlah produk yang dapat secara ekonomis maupun legal diekstraksi dari aset Perseroan. Untuk memperkirakan cadangan bijih nikel, perlu ditentukan asumsi mengenai faktor-faktor geologis, teknis dan ekonomis termasuk jumlah produksi, teknik produksi, nisbah kupasan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga-harga komoditas dan nilai tukar mata uang.

Memperkirakan jumlah dan/atau kadar cadangan membutuhkan ukuran, bentuk dan kedalaman lapisan bijih atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu, dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Perseroan dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi dapat berubah jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Provisi untuk aktivitas puma operasi, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

3. Changes in accounting policies and disclosure (continued)

3.4 New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2015 and not early adopted

- SFAS No. 65 - Consolidated Financial Statements *);
- SFAS No. 66 - Joint Arrangements *);
- SFAS No. 67 - Disclosure of Interests in Other Entities *);
- SFAS No. 68 - Fair Value Measurement *);
- SFAS No. 1 (Revised 2013) - Presentation of Financial Statements *);
- SFAS No. 4 (Revised 2013) - Separate Financial Statements *);
- SFAS No. 15 (Revised 2013) Investment in Associates and Joint Ventures *); and
- SFAS No. 24 (Revised 2013) Employee Benefits *).

As at the issuance of these financial statements, management is still evaluating the impact of these revised standards/interpretations and their effect on the Company's financial statements.

*) Early adoption of these new and revised standards prior to January 1, 2015 is not permitted.

4. Critical accounting estimates and judgements

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Company has identified the following critical accounting policies under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the financial position reported in future periods.

Further details of the nature of these assumptions and conditions may be found in the relevant notes to the financial statements.

4.1. Reserve estimates

Reserves are estimates of the amount of product that can be economically and legally extracted from the Company's properties. In order to estimate nickel ore reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

Estimating the quantity and/or grade of reserves requires the size, shape and depth of ore bodies or fields to be determined by analyzing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgements to interpret the data.

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Company's financial results and financial position in a number of ways, including:

- Carrying values of assets may be affected due to changes in estimated future cash flows.
- Depreciation and amortization charged in the profit or loss may change where the useful economic lives of assets change.
- Decommissioning, site restoration and environmental provisions may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.
- The carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting (lanjutan)

4. Critical accounting estimates and judgements (continued)

4.2. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

4.2. Provision for asset retirement

Kebijakan akuntansi Perseroan atas pengakuan provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang dan penghentian dan pembongkaran fasilitas membutuhkan penggunaan estimasi dan asumsi yang signifikan seperti: persyaratan kerangka hukum dan peraturan yang relevan; besarnya kemungkinan kontaminasi atau kerusakan serta waktu, luas dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan perbedaan antara jumlah pengeluaran aktual di masa depan dan jumlah yang disisihkan pada saat ini. Provisi yang diakui pada setiap lokasi di tinjau secara berkala dan diperbarui berdasarkan fakta-fakta dan keadaan pada saat itu.

The Company's accounting policy for the recognition of provisions for environmental reclamation and mine closure and decommissioning and dismantling of facilities requires the use of significant estimates and assumptions such as: requirements of the relevant legal and regulatory framework; the magnitude of possible contamination or disturbance and the timing, extent and costs of required environmental reclamation and mine closure activities. These uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The provision recognized for each site is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at the time.

4.3. Pajak penghasilan

4.3. Income taxes

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan beban tertentu selama estimasi provisi pajak penghasilan untuk setiap perusahaan dalam Perseroan. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Judgement and assumptions are required in determining capital allowances and the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for the Company. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, these differences will have an impact on the current income tax and deferred income tax provisions in the period in which the determination was made.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kumulatif rugi fiskal, penyisihan modal, dan perbedaan temporer, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas dimasa depan. Hal ini bergantung pada estimasi produksi, volume penjualan barang, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi tambang, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen lainnya di masa depan.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future production, sales volumes, commodity prices, reserves, operating costs, closure and rehabilitation costs, capital expenditure, dividends and other capital management transactions.

4.4. Penurunan nilai aset non-keuangan

4.4. Impairment of non-financial assets

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap periode pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut, akan dilakukan perkiraan atas nilai aset yang dapat kembali dan kerugian akibat penurunan nilai akan diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan kembali dari aset tersebut. Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

In accordance with the Company's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated at every reporting period to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss is recognized to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai membutuhkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas produksi yang diharapkan dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi cadangan' di atas), biaya operasi, biaya reklamasi lingkungan dan penutupan tambang serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'Reserve estimates' above), operating costs, environmental reclamation and mine closure costs, and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may impact the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired, or the impairment charge reduced, with the impact recorded in the profit or loss.

4.5. Imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja

4.5. Pension benefits and post-retirement medical benefits

Nilai kini kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dan aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya (pendapatan) bersih untuk imbalan dimaksud termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

The present value of the pension benefits and post-retirement medical benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for the pension benefits and post-retirement medical benefits include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension benefits and post-retirement medical benefits.

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting (lanjutan)

4. Critical accounting estimates and judgements (continued)

4.5. Imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja (lanjutan)

4.5. Pension benefits and post-retirement medical benefits (continued)

Perseroan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Perseroan menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi Pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the retirement benefits and post-retirement medical benefits. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of high-quality corporate bonds (or Government bonds, if there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which those benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related retirement benefits and post-retirement medical benefits.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

Other key assumptions for the pension benefit and post-retirement medical benefit obligations are based in part on current market conditions.

Jika tingkat diskonto yang digunakan berbeda 1% dari estimasi manajemen, pada tanggal 31 Desember 2013 nilai tercatat kewajiban pensiun diestimasi akan menjadi lebih rendah sebesar AS\$1,2 juta atau lebih tinggi AS\$1,7 juta (2012: lebih rendah sebesar AS\$2,9 juta atau lebih tinggi AS\$3,6 juta) (nilai penuh).

Were the discount rate used to differ by 1% from management's estimates, as at December 31, 2013 the carrying amount of pension obligations would be an estimated US\$1.2 million lower or US\$1.7 million higher (2012: US\$2.9 million lower or US\$3.6 million higher) (full amount).

5a. Kas dan setara kas

5a. Cash and cash equivalents

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Kas	8	26	Cash on hand
Bank:			Cash in bank:
Pihak ketiga			Third parties
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
JP Morgan Chase Bank N.A.	66,154	1,871	JP Morgan Chase Bank N.A.
Citibank N.A.	8,911	17,757	Citibank N.A.
Pihak ketiga			Third parties
Dalam mata uang Rupiah			Denominated in Rupiah
Citibank N.A.	6,803	4,669	Citibank N.A.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	2,339	1,547	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	65	409	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
	84,272	26,253	
Deposito berjangka:			Time deposits:
Pihak ketiga			Third parties
Dalam mata uang Dolar AS			Denominated in US Dollars
ANZ Bank	43,012	28,321	ANZ Bank
Standard Chartered Bank	42,728	98,494	Standard Chartered Bank
Bank of America	30,000	-	Bank of America
JP Morgan Chase Bank N.A.	-	19,142	JP Morgan Chase Bank N.A.
Pihak ketiga			Third parties
Dalam mata uang Rupiah			Denominated in Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
	115,740	145,960	
Jumlah	200,020	172,239	Total
Rata-rata suku bunga deposito berjangka di atas adalah:			The average interest rates on the above time deposits are as follows:
31 Desember	2013	2012	December 31
Deposito Dolar AS	0.2%	0.2%	US Dollar deposits
Deposito Rupiah	5.0%	5.0%	Rupiah deposits

Tidak ada kas dan setara kas pada pihak-pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalents held with related parties.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana dijabarkan diatas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above.

5b. Kas yang dibatasi penggunaannya

5b. Restricted cash

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Dalam mata uang Dolar AS Union Bank N.A.	16,723	17,333	Denominated in US Dollars Union Bank N.A.

Rekening Union Bank N.A. tersebut ditujukan untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhutang. Rekening ini dibuka untuk memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior ("SEFA") antara Perseroan dengan Mizuho Corporate Bank, Ltd. dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. untuk Proyek Karebbe (lihat Catatan 17).

The account with Union Bank N.A. is intended for payment of loan principal and interest payable. This account was established to fulfill the requirement of the Senior Export Facility Agreement ("SEFA") between the Company and Mizuho Corporate Bank, Ltd. and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. for the Karebbe Project (refer to Note 17).

6. Piutang usaha

6. Trade receivables

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pihak-pihak berelasi	65,902	112,640	Related parties

Karena jatuh temponya yang pendek, jumlah tercatat piutang usaha kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

Due to the short-term nature of trade receivables, their carrying amount approximates their fair values.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang sebagaimana dijabarkan diatas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of receivables mentioned above.

Pada tanggal 31 Desember 2013, piutang usaha sebesar AS\$65,3 juta (2012: AS\$95,4 juta) (nilai penuh) belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Piutang tersebut akan jatuh tempo dalam 30 hari ke depan.

As at December 31, 2013, trade receivables of US\$65.3 million (2012: US\$95.4 million) (full amount) are not yet past due nor impaired. Those receivables will be due within 30 days.

Pada tanggal 31 Desember 2013, piutang usaha sebesar AS\$0,6 juta (2012: AS\$17,2 juta) (nilai penuh) telah lewat jatuh tempo sampai dengan 60 hari namun tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2013, trade receivables of US\$0.6 million (2012: US\$17.2 million) were past due up to 60 days but not impaired.

Berdasarkan hasil penefaahan keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Based on a review of the status of each customer's receivable accounts at the end of the period, the Company's management believes that no provision for impairment is necessary to provide for losses from the potential non-collection of these accounts as at December 31, 2013 and 2012.

Tidak ada piutang usaha yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2013 (2012: nil).

There were no trade receivables pledged as collateral as at December 31, 2013 (2012: nil).

Lihat Catatan 31e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31e for details of related party balances and transactions.

7. Aset keuangan lancar lainnya

7. Other current financial assets

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pinjaman kepada karyawan	6,893	9,195	Loans to employees
Tagihan kepada kontraktor	809	1,251	Receivables from contractors
Lainnya	102	102	Others
Jumlah	7,804	10,548	Total

Karena jatuh temponya yang pendek, jumlah nilai tercatat kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

Due to the short-term nature, the carrying amount approximates their fair values.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang sebagaimana dijabarkan diatas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of receivables mentioned above.

7. Aset keuangan lancar lainnya (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2013, aset keuangan lancar lainnya belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Analisis umur aset keuangan lancar lainnya adalah sebagai berikut:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Sampai dengan 3 bulan	2,161	1,781	Up to 3 months
3 bulan sampai 1 tahun	5,643	8,767	3 months to 1 year
Jumlah	7,804	10,548	Total

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan setiap akun pada akhir periode, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya nilai di atas pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

7. Other current financial assets (continued)

As at December 31, 2013, other current financial assets are not yet past due nor impaired. The ageing analysis of these other current financial assets is as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Sampai dengan 3 bulan	2,161	1,781	Up to 3 months
3 bulan sampai 1 tahun	5,643	8,767	3 months to 1 year
Jumlah	7,804	10,548	Total

Based on a review of the status of each account at the end of the period, the Company's management believes that no provision for impairment is necessary to provide for losses from the potential non-collection of these accounts as at December 31, 2013 and 2012.

Lihat Catatan 31e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31e for details of related party balances and transactions.

8. Persediaan

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Nikel			Nickel
Dalam proses	40,699	38,391	In process
Barang jadi	10,993	13,282	Finished
	51,692	51,673	
Bahan pembantu	101,528	102,268	Supplies
Dikurangi: Penyisihan untuk bahan pembantu usang	(2,224)	(1,092)	Less: Provision for obsolete supplies
	99,304	101,176	
Jumlah	150,996	152,849	Total

Mutasi penyisihan bahan pembantu usang adalah sebagai berikut:

Movement in the provision for obsolete supplies is as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal – 1 Januari	(1,092)	(1,164)	Beginning balance – January 1
(Penyisihan)/Pemulihan untuk bahan pembantu usang	(1,132)	72	(Provision)/Recovery for obsolete supplies
Saldo akhir	(2,224)	(1,092)	Ending balance

Manajemen Perseroan yakin bahwa penyisihan untuk bahan pembantu usang telah mencukupi terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari bahan pembantu usang. Tidak ada persediaan yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2013 (2012: nil).

The Company's management believes that the provision for obsolete supplies is adequate to cover possible losses from obsolete supplies. There were no inventories pledged as collateral as at December 31, 2013 (2012: nil).

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam "beban pokok pendapatan" sebesar AS\$782 juta (2012: AS\$801 juta) (nilai penuh).

The cost of inventories recognized and included in "cost of revenue" amounted to US\$782 million (2012: US\$801 million) (full amount).

Pada tanggal 31 Desember 2013, semua aset Perseroan termasuk persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri berikut, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanis atau listrik dan termasuk gangguan usaha lainnya. Jumlah pertanggungan untuk aset Perseroan dan eksposur atas risiko gangguan usaha terkait per 31 Desember 2013 adalah AS\$5.990 juta (2012: AS\$3.359 juta), dengan batasan sebesar AS\$700 juta per kejadian (2012: AS\$500 juta) (nilai penuh). Bahan pembantu diasuransikan sebesar biaya penggantian, nikel dalam proses sebesar biaya bahan baku bijih dan tenaga kerja ditambah proporsi tertentu atas biaya tidak langsung, sedangkan untuk barang jadi nikel dalam *matte* sebesar mana yang lebih tinggi antara harga jual tunai bersih atau biaya memproduksinya kembali. Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

As at December 31, 2013, all of the Company's assets including inventories were insured against the risk of direct physical loss or damage caused by industrial all risks, including but not limited to earthquake, fire and electrical or mechanical breakdown and including related business interruption. The total insured value of the Company's assets and related business interruption exposure as at December 31, 2013 was US\$5,990 million (2012: US\$3,359 million), with policy limits of US\$700 million per occurrence (2012: US\$500 million) (full amount). Supplies are insured at replacement cost, nickel in process at the cost of ore raw materials and labor expended plus a proper proportion of overhead charges, while nickel in *matte* finished goods are insured at the regular net cash selling price or at reproduction cost, whichever is higher. In management's opinion, the insurance is adequate to cover possible losses from such risks.

9. Biaya dibayar dimuka dan uang muka

9. Prepayments and advances

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Asuransi dibayar dimuka	3,270	2,764	Prepaid insurance
Uang muka ke kontraktor dan pemasok	939	6,895	Advance to contractors and suppliers
Jumlah	4,209	9,659	Total

10. Aset tetap

10. Fixed assets

	1 Januari/ January 1, 2013	Penambahan/ Additions	Transfer/ Transfers	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2013	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Harga perolehan					Cost	
Pemilikan langsung					Direct ownership	
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	928,616	--	1,210	--	929,826	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	35,074	--	4,937	--	40,011	Roads and bridges
Bangunan	577,927	--	23,468	--	601,395	Buildings
Pabrik dan mesin	1,291,163	--	139,899	(1,628)	1,429,434	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	32,602	--	287	--	32,889	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	26,639	--	3,031	--	29,670	Mine development
Aset tetap dalam penyelesaian *)	210,710	137,939	(172,832)	--	175,817	Construction in progress *)
Jumlah	3,102,731	137,939	--	(1,628)	3,239,042	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation	
Pemilikan langsung					Direct ownership	
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(240,739)	(23,830)	--	--	(264,569)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(16,815)	(2,073)	--	--	(18,888)	Roads and bridges
Bangunan	(393,846)	(15,638)	--	--	(409,484)	Buildings
Pabrik dan mesin	(784,155)	(67,555)	--	1,628	(850,082)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(32,378)	(177)	--	--	(32,555)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(10,227)	(1,475)	--	--	(11,702)	Mine development
Jumlah	(1,478,160)	(110,748)	--	1,628	(1,587,280)	Total
Nilai buku bersih	1,624,571				1,651,762	Net book value

*) Lihat Catatan 11 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

*) Refer to Note 11 for details of construction in progress.

10. Aset tetap (lanjutan)

10. Fixed assets (continued)

	1 Januari/ January 1, 2012	Penambahan/ Additions	Transfer/ Transfers	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2012		
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)	
Harga perolehan						Cost	
Pemilikan langsung						Direct ownership	
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	895,198	-	33,418	-	928,616	Hydroelectric dam buildings and facilities	
Jalan dan jembatan	35,074	-	-	-	35,074	Roads and bridges	
Bangunan	577,314	-	613	-	577,927	Buildings	
Pabrik dan mesin	1,185,121	-	106,042	-	1,291,163	Plant and machinery	
Perabotan dan peralatan kantor	32,579	-	23	-	32,602	Furniture and office equipment	
Pengembangan tambang	24,703	-	1,936	-	26,639	Mine development	
Aset tetap dalam penyelesaian *)	205,236	147,506	(142,032)	-	210,710	Construction in progress *)	
Jumlah	2,955,225	147,506	-	-	3,102,731	Total	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation	
Pemilikan langsung						Direct ownership	
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(215,328)	(25,411)	-	-	(240,739)	Hydroelectric dam buildings and facilities	
Jalan dan jembatan	(14,816)	(1,999)	-	-	(16,815)	Roads and bridges	
Bangunan	(379,230)	(14,616)	-	-	(393,846)	Buildings	
Pabrik dan mesin	(725,270)	(58,885)	-	-	(784,155)	Plant and machinery	
Perabotan dan peralatan kantor	(32,181)	(197)	-	-	(32,378)	Furniture and office equipment	
Pengembangan tambang	(9,049)	(1,178)	-	-	(10,227)	Mine development	
Jumlah	(1,375,874)	(102,286)	-	-	(1,478,160)	Total	
Nilai buku bersih	1,579,351					1,624,571	Net book value

*) Lihat Catatan 11 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

*) Refer to Note 11 for details of construction in progress.

Seluruh biaya penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dibebankan ke biaya produksi.

All depreciation expenses for the years ended December 31, 2013 and 2012 were allocated to production costs.

Pada tanggal 31 Desember 2013, semua aset Perseroan termasuk aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri dan, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanis atau listrik termasuk gangguan usaha lainnya. Jumlah pertanggungan untuk aset Perseroan dan eksposur atas risiko gangguan usaha terkait per 31 Desember 2013 adalah AS\$5.990 juta (2012: AS\$3.359 juta), dengan batasan sebesar AS\$700 juta per kejadian (2012: AS\$500 juta) (nilai penuh). Sebagian besar dari aset tetap diasuransikan sebesar biaya penggantian. Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Tidak ada aset tetap yang dijamin pada tanggal 31 Desember 2013 (2012: nil).

As at December 31, 2013, all of the Company's assets including fixed assets were insured against the risk of direct physical loss or damage caused by industrial all risks, including but not limited to earthquake, fire and electrical or mechanical breakdown and including related business interruption. The total insured value for the Company's assets and related business interruption exposure as at December 31, 2013 was US\$5,990 million (2012: US\$3,359 million), with policy limits of US\$700 million per occurrence (2012: US\$500 million) (full amount). The fixed assets are mostly insured at replacement cost. In management's opinion, the insurance is appropriate and adequate to cover possible losses arising from such risks. There were no fixed assets pledged as collateral as at December 31, 2013 (2012: nil).

Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar AS\$214,8 juta (2012: AS\$285 juta). Aset tetap yang tidak dipakai sementara pada tanggal 31 Desember 2013 dengan nilai buku bersih AS\$0,3 juta (2012: nil) (nilai penuh).

The gross carrying value of each fixed asset that is fully depreciated and still in use was US\$214.8 million (2012: US\$285 million). There were temporary idle fixed assets as at December 31, 2013 with a net book value of US\$0.3 million (2012: nil) (full amount).

Perseroan telah melakukan pengkajian kembali atas masa manfaat aset tetap dan berdasarkan pengkajian tersebut, Perseroan tidak mengidentifikasi adanya perubahan atas masa manfaat aset tetap yang ada.

The Company has performed a review of the useful lives of the Company's fixed assets and based on that review, the Company did not identify any changes in the useful lives of the fixed assets.

Pelepasan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 adalah AS\$1,6 juta (2012: nil) (nilai penuh).

Disposals of fixed assets for the year ended December 31, 2013 were US\$1.6 million (2012: nil) (full amount).

11. Aset tetap dalam penyelesaian

11. Construction in progress

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari proyek yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan.

Construction in progress represents capital projects that have not been completed at the statements of financial position dates.

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

The construction in progress is as follows:

31 Desember	2013	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated completion date		December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US Dollars, in thousands)
Perbaikan Jalan Tambang Petea	22,020	93	2014	Petea Haul Road Upgrade	
Perbaikan Tanur Listrik #1	19,969	27	2015	Electric Furnace #1 Rebuild	
Reaktor Adaptif Tanur Listrik	18,379	98	2014	Adaptive Reactor Furnace	
Lainnya di bawah AS\$10 juta	115,449	-	-	Others below US\$10 million	
Jumlah	175,817			Total	

31 Desember	2012	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated completion date		December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US Dollars, in thousands)
Konversi Batubara Tahap I	48,827	70	2013	Coal Conversion Phase I	
Reaktor Adaptif Tanur Listrik	17,361	93	2013	Adaptive Reactor Furnace	
Perbaikan Jalan Tambang Petea	15,495	66	2013	Petea Haul Road Upgrade	
Proyek Pengangkutan Batu Bara	14,271	35	2013	Coal Transportation Project	
Lainnya di bawah AS\$10 juta	114,756	-	-	Others below US\$10 million	
Jumlah	210,710			Total	

12. Aset keuangan tidak lancar lainnya

12. Other non-current financial assets

31 Desember	2013	2012		December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)				
Pinjaman kepada karyawan	20,308	25,818	Loans to employees	
Dikurangi: Bagian jangka pendek (Catatan 7)	(6,893)	(9,195)	Less: Current portion (Note 7)	
Bagian jangka panjang	13,415	16,623	Non-current portion	

Lihat Catatan 31e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31e for details of related party balances and transactions.

13. Utang usaha

13. Trade payables

31 Desember	2013	2012		December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)				
Pihak-pihak berelasi			Related parties	
Dalam mata uang Dolar AS	11,181	10,868	Denominated in US Dollars	
Dalam mata uang Yen Jepang	30	20	Denominated in Japanese Yen	
	11,211	10,888		
Pihak ketiga			Third parties	
Dalam mata uang Dolar AS	51,676	47,863	Denominated in US Dollars	
Dalam mata uang Rupiah Indonesia	6,496	16,036	Denominated in Indonesian Rupiah	
Dalam mata uang Euro	3,063	1,215	Denominated in Euro	
Dalam mata uang Dolar Australia	1,035	597	Denominated in Australian Dollars	
Dalam mata uang lainnya (di bawah AS\$1 juta)	2,034	2,460	Denominated in other currencies (below US\$1 million)	
	64,304	68,171		
Jumlah	75,515	79,059	Total	

13. Utang usaha (lanjutan)

Utang usaha timbul dari pembelian barang dan jasa. Jumlah yang disebutkan di atas adalah lancar sesuai dengan ketentuan pembayaran seperti yang tertuang dalam perjanjian yang bersangkutan, sehingga nilai wajar utang usaha sama dengan nilai tercatatnya.

Rincian pemasok dengan saldo melebihi 10% dari jumlah utang usaha, selain saldo pihak-pihak berelasi yang dijelaskan di Catatan 31f adalah sebagai berikut:

13. Trade payables (continued)

The trade payables arose from the purchase of goods and services. The amounts are current within the payment terms as set out in the relevant agreement, as such, the carrying value of trade payables approximates their fair value.

Details of suppliers that make up more than 10% of the trade payables balance, other than related party balances disclosed in Note 31f, are:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pihak ketiga			Third parties
Kuo Oil (S) Pte Ltd.	11,447	12,657	Kuo Oil (S) Pte Ltd.

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perseroan atas utang usahanya pada tanggal 31 Desember 2013 (2012: nil).

There were no guarantees made by the Company for its payables as at December 31, 2013 (2012: nil).

14. Perpajakan

14. Taxation

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pajak Penghasilan ("PPH")			Corporate income tax ("CIT")
- PPh Badan 2011	-	45,289	- CIT 2011
- PPh Badan 2012	83,833	79,668	- CIT 2012
- PPh Badan 2013	13,002	-	- CIT 2013
	96,835	124,957	
Pajak lainnya			Other taxes
- Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	16,609	24,502	- Value added tax ("VAT")
- Pajak dalam proses banding *)	54,799	67,048	- Taxes in dispute *)
- Pajak impor	1,740	-	- Import tax
	73,148	91,550	
Jumlah	169,983	216,507	Total
Bagian jangka pendek	(111,841)	(89,622)	Current portion
Bagian jangka panjang	58,142	126,885	Non-current portion

*) Lihat Catatan 14e untuk rincian pajak dalam proses banding.

*) Refer to Note 14e for details of taxes in dispute.

b. Utang pajak

b. Taxes payable

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Utang pajak lainnya			Other taxes payable
- PPN terhutang	3,564	3,117	- VAT payable
- PPh pasal 23 dan 26	1,979	619	- Withholding tax ("WHT") articles 23 and 26
- PPh pasal 21	1,362	918	- WHT article 21
Jumlah	6,905	4,654	Total

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The income tax expense for the years ended December 31, 2013 and 2012 were as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Kini	21,093	29,115	Current
Tanggungan	(6,129)	(5,186)	Deferred
Penyesuaian periode sebelumnya	1,843	-	Prior period adjustment
Jumlah	16,807	23,929	Total

Perhitungan pajak penghasilan kini adalah berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Jumlah tersebut mungkin disesuaikan ketika surat pemberitahuan pajak tahunan disampaikan ke kantor pajak.

Current income tax calculations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when annual tax returns are filed with the tax authorities.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax as shown in these financial statements and the estimated taxable income for the years ended December 31, 2013 and 2012 is as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Laba sebelum pajak penghasilan	55,459	91,423	Profit before income tax
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Perbedaan antara penyusutan dan amortisasi komersial dan fiskal	16,073	12,121	Difference between commercial and tax depreciation and amortization
Liabilitas imbalan pascakerja	(4,617)	10,494	Post-employment benefit liabilities
Penyisihan untuk bahan pembantu usang	1,132	(72)	Provision for obsolete supplies
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	3,732	2,305	Provision for asset retirement
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	416	(29)	Share-based payment liabilities
Akrual/Provisi lain-lain	7,777	(4,075)	Other accruals/provisions
	79,972	112,167	
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Pendapatan keuangan kena pajak final	(127)	(82)	Finance income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	4,525	4,375	Non-deductible expenses
	4,398	4,293	
Penghasilan kena pajak	84,370	116,460	Taxable income
Pajak penghasilan – kini, pada tarif 25%	21,093	29,115	Income tax – current, at 25%
Pajak dibayar dimuka	(34,095)	(108,783)	Prepaid tax
Lebih bayar pajak	(13,002)	(79,668)	Overpayment of tax

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan teoritis dan laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The reconciliation of income tax expense to the theoretical tax amount on the Company's profit before income tax for the years ended December 31, 2013 and 2012 is as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Laba sebelum pajak penghasilan	55,459	91,423	Profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung pada tarif 25%	13,865	22,856	Income tax calculated at 25%
Pendapatan keuangan kena pajak final	(32)	(21)	Finance income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1,131	1,094	Non-deductible expense
Jumlah	14,964	23,929	Total
Penyesuaian periode sebelumnya	1,843	-	Prior period adjustment
Beban pajak penghasilan	16,807	23,929	Income tax expense

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

d. Liabilitas pajak tangguhan

d. Deferred tax liabilities

Perubahan liabilitas pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012:

Changes in the deferred tax liabilities for the years ended December 31, 2013 and 2012 are shown below:

	1 Januari/ January 1, 2013	(Dikreditkan/ Dibebankan ke laporan laba rugi/ (Credited/ Charged to profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	31 Desember/ December 31, 2013	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)					
Penyusutan dan amortisasi	181,446	(4,018)	-	177,428	Depreciation and amortization
Liabilitas imbalan pascakerja	(5,556)	1,154	1,426	(2,976)	Post-employment benefit liabilities
Penyisihan untuk bahan pembantu usang	(273)	(283)	-	(556)	Provision for obsolete supplies
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(10,528)	(933)	-	(11,461)	Provision for asset retirement
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(4)	(104)	-	(108)	Share-based payment liabilities
Akrual/Provisi lain-lain	(3,080)	(1,945)	-	(5,025)	Other accruals/provisions
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	162,005	(6,129)	1,426	157,302	Deferred tax liabilities, net

	1 Januari/ January 1, 2012	(Dikreditkan/ Dibebankan ke laporan laba rugi/ (Credited/ Charged to profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	31 Desember/ December 31, 2012	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)					
Penyusutan dan amortisasi	184,476	(3,030)	-	181,446	Depreciation and amortization
Liabilitas imbalan pascakerja	(2,932)	(2,624)	-	(5,556)	Post-employment benefit liabilities
Penyisihan untuk bahan pembantu usang	(291)	18	-	(273)	Provision for obsolete supplies
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(9,952)	(576)	-	(10,528)	Provision for asset retirement
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(11)	7	-	(4)	Share-based payment liabilities
Akrual/Provisi lain-lain	(4,099)	1,019	-	(3,080)	Other accruals/provisions
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	167,191	(5,186)	-	162,005	Deferred tax liabilities, net

e. Surat ketetapan pajak

e. Tax assessment letters

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2008

Tax audit results for 2008 fiscal year

PPH Badan 2008

CIT 2008

Pada tanggal 26 Maret 2010, Perseroan menerima surat hasil pemeriksaan pajak untuk PPh Badan tahun 2008 yang menyetujui kelebihan pembayaran pajak sebesar ASS68,5 juta dibandingkan dengan ASS71,7 juta nilai awal yang ditagihkan dan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka pada laporan keuangan 31 Desember 2009 (nilai penuh). Pembayaran oleh Direktorat Jendral Pajak ("DJP") telah diterima pada tanggal 14 April 2010 yang terdiri dari penerimaan kas sebesar IDR603,7 milyar (setara dengan ASS66,3 juta) (nilai penuh) dan beberapa pemindahbukuan berkaitan dengan hasil pemeriksaan pajak tahun 2008 lainnya sebesar IDR22,4 milyar (setara dengan ASS2,2 juta) (nilai penuh). Perseroan telah menyetujui hasil pemeriksaan sebesar ASS1,3 juta dan mengakuinya sebagai beban di laporan laba rugi, sementara untuk sisa tagihan sebesar ASS1,9 juta telah dikirimkan surat keberatan ke DJP pada tanggal 24 Juni 2010 (nilai penuh). Jumlah keberatan atas kelebihan pembayaran pajak untuk PPh Badan ini dicatat pada akun pajak dalam proses banding di bagian pajak dibayar dimuka (lihat Catatan 14a).

On March 26, 2010, the Company received a tax assessment letter for CIT 2008 which confirmed a CIT overpayment of US\$68.5 million compared to the US\$71.7 million originally claimed by the Company and booked in its financial statements as prepaid taxes as at December 31, 2009 (full amount). Payment of US\$68.5 million by the Directorate General of Tax ("DGT") was received on April 14, 2010 which consisted of a cash transfer amounting to IDR603.7 billion (equivalent to US\$66.3 million) (full amount) and several overbookings related to other 2008 tax assessments of IDR22.4 billion (equivalent to US\$2.2 million) (full amount). While the Company has agreed with part of the assessment amounting to US\$1.3 million which was recognized as an expense in profit or loss, the remaining US\$1.9 million has been objected to by the Company in its objection letter to the DGT submitted on June 24, 2010 (full amount). This objected amount of CIT overpayment is currently recognized as part of the tax in dispute account under prepaid taxes (refer to Note 14a).

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

e. Tax assessment letters (continued)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2008 (lanjutan)

Tax audit results for 2008 fiscal year (continued)

PPH Badan 2008 (lanjutan)

CIT 2008 (continued)

Pada tanggal 26 Februari 2013, Pengadilan Pajak telah menolak permohonan banding Perseroan terkait dengan PPh Badan 2008. Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dikirimkan ke Perseroan pada tanggal 15 Maret 2013. Perseroan telah menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung pada tanggal 12 Juni 2013. Oleh karenanya, Perseroan masih mempertahankan kelebihan pembayaran pajak atas PPh Badan 2008 sebagai piutang.

On February 26, 2013, the Tax Court rejected the Company's appeal against the Decision Letter from the DGT in relation to the CIT 2008 matter. The decision was sent to the Company on March 15, 2013. The Company has submitted a Reconsideration Request to the Supreme Court on June 12, 2013. Therefore, the Company still maintains the CIT overpayment for 2008 as a receivable.

Pajak-pajak lainnya - 2008

Other taxes - 2008

Pada tanggal 26 Maret 2010, Perseroan juga menerima beberapa surat pemeriksaan pajak lainnya berkaitan dengan pajak penghasilan lainnya dan PPN sebesar AS\$25,2 juta dengan rincian sebagai berikut:

On March 26, 2010, the Company also received several other tax assessment letters concerning the underpayment of several withholding taxes and VAT totaling US\$25.2 million as follows:

Jenis pajak/Tax article	Kurang bayar (IDR nilai penuh)/ Underpayment (IDR full amount)	Setara AS\$ (nilai penuh)/ Equivalent US\$ (full amount)	Jumlah yang disetujui (setara AS\$ nilai penuh)/ Amount agreed (equivalent US\$ full amount)	Jumlah yang diajukan keberatan (AS\$ nilai penuh)/ Amount objected (US\$ full amount)	Jumlah keberatan yang ditolak (AS\$ nilai penuh)/ Objection amount rejected (US\$ full amount)	Jumlah yang diajukan banding (AS\$ nilai penuh)/ Amount to be appealed (US\$ full amount)
PPH pasal 15/ WHT article 15	50,463,553	4,137	4,137	-	-	-
PPH pasal 23/ WHT article 23	5,201,652,257	426,438	1,782	424,656	-	-
PPH pasal 26/ WHT article 26	296,887,634,509	24,339,202	1,367,952	22,971,250	22,971,250	22,971,250
PPH pasal 4(2)/ WHT article 4(2)	13,263,097	1,087	1,087	-	-	-
PPN/VAT	5,579,010,679	457,374	225,123	232,251	49,699	-
Jumlah/Total	307,732,024,095	25,228,238	1,600,081	23,628,157	23,020,949	22,971,250

Jumlah yang telah disetujui di atas telah diakui sebagai biaya pada laporan laba rugi dan pembayaran ke DJP dilakukan melalui pemindahbukuan (lihat penjelasan PPh Badan 2008 di atas). Selain jumlah yang telah disetujui seperti dijelaskan di atas, manajemen berkeyakinan bahwa hasil pemeriksaan tidak memiliki dasar yang kuat. Terutama interpretasi Kontrak Karya mengenai keharusan pemotongan PPh pasal 26 untuk dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham pendiri. Manajemen percaya bahwa interpretasi Perseroan atas klausul di Kontrak Karya saat ini telah tepat yang didukung oleh pendapat penasehat hukum Perseroan. Lebih lanjut, praktik Perseroan saat ini telah konsisten dengan praktik-praktik di tahun-tahun sebelumnya tanpa sanggahan dari DJP.

The amount agreed by the Company has been recognized as an expense in profit or loss and payment to the DGT was made through several overbookings (refer to explanation for CIT 2008 above). Other than the agreed amounts noted above, management believes that these assessments are without merit. In particular, the disputed portion of the WHT article 26 assessment relates to the DGT's interpretation of a clause in the Company's CoW relating to WHT to be applied to dividends paid to founding shareholders of the Company. Management believes that the Company's interpretation of the clause is correct, and the Company has received legal advice to that effect. Furthermore, the Company's treatment is consistent with the treatment that has been adopted in previous years without challenge from the DGT.

Pada tanggal 7 Februari 2011, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") No. KEP-62/WP.19/BD.05/2011 tanggal 2 Februari 2011 yang menolak keberatan kurang bayar pajak untuk PPh pasal 26 mengenai pengenaan PPh atas pembayaran dividen kepada pemegang saham pendiri sebesar IDR278 milyar atau setara dengan AS\$22,8 juta (nilai penuh).

On February 7, 2011, the Company received a Tax Decision Letter No. KEP-62/WP.19/BD.05/2011 dated February 2, 2011 which rejected the Company's objection to the tax underpayment for WHT article 26 regarding the WHT on the dividend payments to the founding shareholders amounting to IDR278 billion or equivalent to US\$22.8 million (full amount).

Pada akhir bulan Maret 2011, Perseroan juga menerima Surat Keputusan Keberatan tanggal 28 Februari 2011 dan 24 Maret 2011, yang menolak keberatan atas SKP PPh pasal 26 mengenai perjanjian bantuan manajemen (*Management Assistance Agreement*/"MAA"), SKP PPh Badan mengenai MAA, dan SKP PPh pasal 23 atas jasa yang diberikan oleh Vale Technology Development (Canada) Limited ("VTDCL") karena dianggap sebagai Bentuk Usaha Tetap ("BUT") di Indonesia. Jumlah keberatan yang ditolak terkait SKP-SKP ini adalah ekuivalen dengan AS\$3,1 juta (nilai penuh).

At the end of March 2011, the Company also received Tax Objection Decision Letters dated February 28, 2011 and March 24, 2011 that rejected the Company's objection to Tax Assessment Letters for WHT article 26 regarding Management Assistance Agreement ("MAA"), Tax Assessment Letter for CIT regarding MAA and Tax Assessment Letters for article 23 for services that have been delivered by Vale Technology Development (Canada) Limited ("VTDCL") which the DGT considered to have a Permanent Establishment ("PE") in Indonesia. Total objections that have been declined related to these Tax Assessment Letters is equivalent to US\$3.1 million (full amount).

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

e. Tax assessment letters (continued)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2008 (lanjutan)

Tax audit results for 2008 fiscal year (continued)

Pajak-pajak lainnya - 2008 (lanjutan)

Other taxes - 2008 (continued)

Perseroan telah mengajukan banding ke pengadilan pajak pada tanggal 27 April 2011, 27 Mei 2011, dan 20 Juni 2011 atas seluruh keberatan diatas. Perseroan juga telah melakukan pembayaran sebesar IDR139 milyar atau setara dengan AS\$11,4 juta (nilai penuh) (50% dari jumlah SKPKB untuk PPh pasal 26 atas dividen kepada pemegang saham pendiri) pada tanggal 15 April 2011 sebagai persyaratan pengajuan banding ke Pengadilan Pajak. Pembayaran sebesar 50% juga dilakukan atas SKP PPh pasal 23 atas jasa yang diberikan oleh VTDCI.

The Company has submitted appeal letters on April 27, 2011, May 27, 2011 and June 20, 2011 for the above objections. The Company has made a payment of IDR139 billion or equivalent to US\$11.4 million (full amount) (i.e. 50% of the total tax underpayment assessment from WHT article 26 on dividend payments to founding shareholders) on April 15, 2011 as a prerequisite of appeal submission to the Tax Court. Payment in the amount of 50% was also made for Tax Assessment Letters on WHT article 23 for the services provided by VTDCI.

Perseroan mengakui pembayaran ini sebagai bagian dari pajak dibayar dimuka (lihat Catatan 14a) dikarenakan Perseroan berharap agar pembayaran tersebut dapat dikembalikan dari Kantor Pajak setelah keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Perseroan. Sidang pengadilan yang terkait dengan semua kasus di atas telah dilakukan dan sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perseroan telah menerima putusan Pengadilan Pajak atas semua sengketa banding tahun 2008.

The Company recognised these payments as part of prepaid taxes (refer to Note 14a) as it is expected to be refunded once a decision is issued in the Company's favour. The court hearings related to all cases above have been conducted and as of the date of these financial statements, the Company has received Tax Court decision for all 2008 tax cases.

Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa banding PPh pasal 23 dibacakan pada tanggal 23 Juli 2013 yang menyatakan Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya banding Perseroan. Oleh karenanya, atas pembayaran 50% nilai sengketa yang diajukan sebesar IDR2,6 milyar (setara dengan AS\$212 ribu) (nilai penuh), telah dikembalikan kepada Perseroan pada tanggal 17 September 2013.

The Tax Court decision on the tax dispute of WHT article 23 received on July 23, 2013 states that the Tax Court accepted all of the Company's appeals. Therefore the payment of 50% of the value of the dispute at an amount of IDR2.6 billion (equivalent to US\$212 thousand) (full amount), has been refunded to the Company on September 17, 2013.

Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa banding PPh pasal 26 sehubungan dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham pendiri tertanggal 12 Desember 2013 yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Perseroan. Atas pembayaran sebesar IDR139 milyar (setara AS\$11,4 juta) yang merupakan 50% dari total SKPKB sebesar IDR278 milyar (setara AS\$22,8 juta) (nilai penuh), Perseroan memperkirakan akan menerima pengembalian di kuartal pertama 2014.

The Tax Court decision on the tax dispute of WHT article 26 related to the dividend payment to founding shareholders received on December 12, 2013 states that the Tax Court accepted all of the Company's appeal. For the Company's payment of IDR139 billion (equivalent to US\$11.4 million), which was 50% of total underpayment assessment of IDR278 billion (equivalent to US\$22.8 million), the Company expects to receive the refund in the first quarter of 2014.

Terkait dengan sengketa banding PPh pasal 26 sehubungan dengan Pembayaran MAA, Pengadilan pajak memuluskan menolak permohonan banding Perseroan melalui putusan Pengadilan Pajak tertanggal 29 Nopember 2013. Tidak terdapat sengketa nilai atas banding ini yang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka, karena lebih terkait sengketa jenis objek transaksi, dimana DJP memandang sebagai pembayaran dividen, sementara Perseroan menganggap sebagai pembayaran royalti. Putusan atas sengketa banding PPh pasal 26 ini sejalan dengan putusan atas sengketa PPh Badan yang sudah dipulus terlebih dahulu. Manajemen sedang mempertimbangkan untuk menyampaikan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

With regard to the tax dispute of WHT article 26 related to the MAA payment, the Tax Court decision dated November 29, 2013 rejected the Company's appeal. No dispute amount was recorded as prepaid taxes since the dispute is more related to the nature of transaction, in which the DGT views them as dividends while the Company views them as royalties. The decision on the tax dispute of WHT article 26 is in line with the decision on the dispute on CIT. Management is considering submission of a Reconsideration Request to the Supreme Court on this case.

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun pajak 2004 dan 2006

Tax audit results for 2004 and 2006 fiscal years

Pada tanggal 1 Maret 2011, Perseroan menerima surat ketetapan pajak dari Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar Satu untuk tahun-tahun pajak 2004 dan 2006 tanggal 22 dan 24 Februari 2011, secara berturut-turut. Surat pemeriksaan pajak ini menyatakan kurang bayar pajak sebesar AS\$12,8 juta untuk tahun pajak 2004 dan AS\$28,3 juta untuk tahun pajak 2006. Pada tanggal 17 Maret 2011, Perseroan juga telah menerima surat ketetapan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo untuk PPh pasal 21 tahun-tahun pajak 2004 dan 2006 tanggal 7 Maret 2011. Surat pemeriksaan pajak ini menyatakan kurang bayar pajak sebesar AS\$0,4 juta untuk tahun pajak 2004 dan AS\$1,2 juta untuk tahun pajak 2006.

On March 1, 2011, the Company received tax assessment letters from the Large Taxpayer Office One for the 2004 and 2006 fiscal years dated February 22 and 24, 2011, respectively. These tax assessment letters indicated tax underpayments of US\$12.8 million for the 2004 fiscal year and US\$28.3 million for the 2006 fiscal year. On March 17, 2011, the Company also received a tax decision letter from Palopo Tax Office for the 2004 and 2006 fiscal years for WHT article 21 dated March 7, 2011. The tax letter indicated tax underpayment of US\$0.4 million for the 2004 fiscal year and US\$1.2 million for the 2006 fiscal year.

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

e. Tax assessment letters (continued)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun pajak 2004 dan 2006
(lanjutan)

Tax audit results for 2004 and 2006 fiscal years (continued)

Jenis pajak/Tax article	Kurang bayar (IDR nilai penuh/ Underpayment (IDR full amount))	Setara AS\$ (nilai penuh/ Equivalent US\$ (full amount))	Jumlah yang disetujui (setara AS\$ nilai penuh/ Amount agreed (equivalent US\$ full amount))	Jumlah yang diajukan keberatan/banding (AS\$ nilai penuh/ Amount to be appealed (US\$ full amount))
PPH Badan/CIT	-	5,005,780	1,488,942	3,516,838
PPH pasal 15/WHT article 15	512,598,073	42,023	42,023	-
PPH pasal 23/WHT article 23	183,786,080	15,067	15,067	-
PPH pasal 26/WHT article 26	85,570,290,753	7,015,154	1,575,393	5,439,761
PPH pasal 4(2)/WHT article 4(2)	28,370,801	2,326	2,326	-
PPN JKP LN/VAT on Offshore Service	8,688,169,590	712,266	712,266	-
Penalti atas PPN JKP LN/ Tax Penalty from Offshore Service VAT	106,310,508	8,715	8,715	-
Jumlah/Total	95,089,525,805	12,801,331	3,844,732	8,956,599
PPH pasal 21/WHT article 21	5,431,101,672	445,248	-	445,248
Tambahan keputusan keberatan PPh pasal 21/Additional WHT article 21 assessment as per objection result	7,090,293,338	581,271	-	581,271
Audit pajak 2006/2006 Tax Audit				
PPH Badan/CIT	-	7,790,035	1,850,019	5,940,016
PPH pasal 15/WHT article 15	185,158,881	15,180	15,180	-
PPH pasal 23/WHT article 23	158,803,106	13,019	13,019	-
PPH pasal 26/WHT article 26	197,126,302,498	16,160,649	2,682,658	13,477,991
PPN Barang dan Jasa/VAT on Goods and Services	35,500,667,606	2,910,387	8,444	2,901,943
PPN Wajib Pungut/VAT Collector	5,906,016,201	484,182	-	484,182
PPN JKP LN/VAT on Offshore Service	10,303,250,094	844,673	-	844,673
Penalti atas PPN JKP LN/ Tax Penalty from Offshore Service VAT	1,232,144,159	101,013	101,013	-
Jumlah/Total	250,412,342,545	28,319,138	4,670,333	23,648,805
PPH pasal 21/WHT article 21	14,571,825,622	1,194,616	-	1,194,616
Tambahan keputusan keberatan PPh pasal 21/Additional WHT article 21 assessment as per objection result	6,726,124,516	551,416	-	551,416

Perseroan telah melakukan pembayaran atas seluruh kurang bayar pajak berdasarkan surat ketetapan pajak dari Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar Satu yang ada pada tabel di atas pada tanggal 21 Maret 2011. Dari jumlah AS\$43,9 juta, Perseroan telah menyetujui kurang bayar pajak sebesar AS\$8,5 juta (nilai penuh) dan mengakuinya sebagai beban di laporan laba rugi. Saat ini, Perseroan telah mengajukan surat keberatan kepada Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar tanggal 20 Mei 2011 untuk sisa kurang bayar pajak sebesar AS\$35,4 juta (nilai penuh) dan mengakuinya sebagai pajak dibayar dimuka (lihat Catatan 14a).

The Company has paid the total tax underpayments based on the tax assessment letters from the Large Taxpayer Office One as noted in the table above on March 21, 2011. From the total of US\$43.9 million (full amount) of tax underpayments, the Company has accepted US\$8.5 million (full amount) of the underpayments and recognized the amount as an expense in profit or loss. The Company has filed an objection letter to the Regional Large Taxpayer Office on May 20, 2011 for the remaining underpayments assessed of US\$35.4 million (full amount) and recognized the amount as prepaid taxes (refer to Note 14a).

14. Perpajakan (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun pajak 2004 dan 2006
(lanjutan)

Perseroan telah melakukan pembayaran alas kurang bayar PPh pasal 21 berdasarkan surat ketetapan pajak dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ("Kanwil DJP") Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang ada pada label diatas pada tanggal 4 April 2011. Perseroan juga telah mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo tanggal 6 Juni 2011 untuk kurang bayar pajak sebesar AS\$1,6 juta dan mengakuinya sebagai pajak dibayar dimuka (lihat Catatan 14a). Pada tanggal 4 Juni 2012, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara telah menerbitkan Keputusan Keberatan yang isinya menolak Permohonan Keberatan dan menambah kurang bayar pajak PPh pasal 21 tahun 2004 dan 2006 berturut-turut dari yang sebelumnya sebesar IDR5,431,101,672 (setara dengan AS\$445,248) dan IDR14,571,825,622 (setara dengan AS\$1,194,616) menjadi IDR12,521,395,101 (setara dengan AS\$1,026,519) dan IDR21,297,950,138 (setara dengan AS\$1,746,032). Perseroan telah mengajukan banding atas putusan keberatan ini pada tanggal 3 September 2012. Atas tambahan kekurangan pembayaran pajak ini, Perseroan juga telah melakukan pembayaran seluruhnya pada tanggal 3 Juli 2012.

Selama Januari hingga Desember 2012, Perseroan telah menerima surat keputusan keberatan atas :

- SKPKB PPh Badan tahun pajak 2004
- SKPKB PPh Badan tahun pajak 2006
- SKPKB PPN Barang dan Jasa tahun pajak 2006
- SKPKB PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri tahun pajak 2006
- SKPKB PPN Pemungut tahun pajak 2006
- SKPKB PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri tahun pajak 2004
- SKPKB PPh pasal 26 tahun pajak 2004
- SKPKB PPh pasal 26 tahun pajak 2006
- SKPKB PPh pasal 21 tahun pajak 2004
- SKPKB PPh pasal 21 tahun pajak 2006

Seluruh hasil putusan keberatan di atas pada dasarnya menolak permohonan keberatan Perseroan. Perseroan telah mengajukan permohonan banding atas seluruh hasil keputusan keberatan di atas sesuai batas waktu tanggal keputusan keberatan (tiga bulan dari tanggal keputusan keberatan).

Pada tanggal 9 Oktober 2012, Perseroan menerima Hasil Putusan Pengadilan Pajak atas PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri tahun pajak 2004 sebesar AS\$712,266 (nilai penuh) yang menyatakan bahwa permohonan banding Perseroan ditolak karena alasan formal. Perseroan menerima hasil putusan ini dan karenanya telah membiayakan jumlah tersebut di atas beserta penallinya dalam laporan keuangan Perseroan. Sementara atas upaya banding-banding lainnya yang diajukan, tetap diproses dalam persidangan dan tidak ada penolakan karena alasan formal.

Terkait dengan Banding PPh Badan tahun 2004 dan 2006, Perseroan telah memutuskan untuk melakukan pencabutan Banding PPh Badan tahun 2004 dan 2006 dan saat ini sedang melakukan Permohonan *Mutual Agreement Procedure ("MAP")* melalui otoritas Pajak Kanada dan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. MAP ini dilakukan untuk menilai koreksi atas biaya MAA, yang dianggap sebagai beban yang tidak dapat dikurangkan, oleh Pemeriksa Pajak. Sementara atas koreksi-koreksi biaya lainnya yang sebelumnya juga diajukan banding bersama dengan MAA, Perseroan telah melakukan reklasifikasi dari Pajak dibayar dimuka menjadi biaya. Total reklasifikasi tersebut untuk tahun 2004 dan 2006 berturut-turut adalah US\$1,1 juta dan US\$466 ribu (nilai penuh), dan ini diakui di kuartal kedua 2013.

Manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki dasar yang kuat bahwa upaya banding akan diterima dan oleh sebab itu tidak ada kewajiban untuk jumlah sisa kurang bayar pajak tersebut yang perlu diakui dalam laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2013.

14. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

Tax audit results for 2004 and 2006 fiscal years
(continued)

The Company has paid the underpayment of WHT article 21 based on the tax assessment letters from the Directorate General of Tax Regional Office – South, West and Southeast Sulawesi as noted in the table above on April 4, 2011. The Company has also filed an objection letter to the Palopo Tax Office on June 6, 2011 for the underpayments of US\$1.6 million and recognized this amount as prepaid taxes (refer to Note 14a). On June 4, 2012, the Directorate General of Tax Regional Office – South, West and Southeast Sulawesi issued an objection decision which rejected the Company's objection and added tax underpayment of tax assessment for WHT article 21 for the years 2004 and 2006 from IDR5,431,101,672 (equivalent to US\$445,248) and IDR14,571,825,622 (equivalent to US\$1,194,616) to IDR12,521,395,010 (equivalent to US\$1,026,519) and IDR21,297,950,138 (equivalent to US\$1,746,032). The Company has submitted an appeal on this objection decision on September 3, 2012. On the additional underpayment assessment, the Company has paid taxes on July 3, 2012.

During January to December 2012, the Company received objection decision letters on :

- Tax Assessment of CIT for the year 2004
- Tax Assessment of CIT for the year 2006
- Tax Assessment of VAT on Goods and Services year 2006
- Tax Assessment of VAT on Offshore Services year 2006
- Tax Assessment of VAT Collector year 2006
- Tax Assessment of VAT on Offshore Services year 2004
- Tax Assessment of WHT article 26 year 2004
- Tax Assessment of WHT article 26 year 2006
- Tax Assessment of WHT article 21 year 2004
- Tax Assessment of WHT article 21 year 2006

The above objection decision results were basically to reject the Company's objections. The Company has submitted an appeal letter for several objections and is preparing for the others in accordance to the due date of objection decision (3 months from the objection decision date).

On October 9, 2012, the Company received a Tax Court Decision for the year 2004 VAT on Offshore Services of US\$712,266 (full amount) which stated that the appeal against the Directorate General of Taxation was rejected due to formality reasons. The Company agreed with the result and subsequently charged such amount to expense along with the tax penalty amount. Meanwhile, the other appeal letters which have been submitted, are still in the court process and no rejection has arisen due to formality reasons.

In relation to the appeal on CIT year 2004 and 2006, the Company has decided to withdraw the appeal and change the strategy by applying for a Mutual Agreement Procedure ("MAP") to the Tax Authority of Canada and Indonesia according to the tax regulation. The MAP was intended to assess the correction from the Tax Auditor related to MAA, which was treated as non deductible. While on the other expenses which were appealed together with the MAA, the Company has made a reclassification from prepaid taxes to expense. Total reclassification for the year 2004 and 2006 was US\$1.1 million and US\$466 thousand (full amount) respectively, and this was recognized in the second quarter of 2013.

Management believes that the Company has strong grounds to believe that the appeals will be accepted and as such no liability for the remaining amount of tax underpayment has been recognized in the financial statements as at December 31, 2013.

14. Perpajakan (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2011

Pada tanggal 10 April 2013, Perseroan menerima SKP dari Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar Satu untuk 2011. SKP ini terkait dengan Pemeriksaan Pajak untuk tahun 2011 karena Perseroan melaporkan kelebihan pembayaran pajak sebesar AS\$45,3 juta (nilai penuh). Berdasarkan hasil pemeriksaan, nilai yang menjadi kelebihan bayar pajak PPh Badan Perseroan adalah sebesar AS\$40,2 juta (nilai penuh). Koreksi-koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak, sebagian besar berkaitan dengan MAA, biaya bunga dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pinjaman SEFA.

Atas SKPLB PPh Badan sebesar AS\$40,2 juta tersebut, Perseroan telah menerima pengembalian pada tanggal 1 Mei 2013 dalam rupiah sebesar IDR390,5 milyar setelah memperhitungkan SKPKB atas PPN sebesar IDR487,7 juta (setara dengan AS\$44 ribu) (nilai penuh).

Terkait dengan koreksi-koreksi PPh Badan yang terkait dengan MAA, biaya bunga, dan biaya-biaya lain yang terkait pinjaman SEFA, Perseroan telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 1 Juli 2013. Jumlah keberatan atas SKPLB PPh Badan ini dicatat pada akun pajak dalam proses banding di bagian pajak dibayar dimuka (lihat Catatan 14a).

f. Administrasi

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Perseroan menyampaikan surat pemberitahuan pajak berdasarkan metode *self-assessment* (menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang serta melaporkannya). Sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Karya 1968, Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan pemeriksaan pajak dan menerbitkan surat ketetapan dalam kurun waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak (sepuluh tahun berdasarkan Persetujuan Perpanjangan efektif 1 April 2008). Dalam Kontrak Karya 1968 juga disebutkan bahwa pajak penghasilan harus dihitung dan dibayar dalam Dolar AS. Hal ini dipertegas lagi dalam Persetujuan Perpanjangan yang menyatakan bahwa perhitungan dan pembayaran pajak Perseroan harus dilakukan dalam Dolar AS berdasarkan pendapatan bersih kena pajak yang juga dinyatakan dalam Dolar AS. Kelebihan cicilan pembayaran pajak penghasilan atas pajak yang terhutang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka.

g. Revaluasi nilai sengketa pajak

Sebagaimana dinyatakan dalam Catatan 14e, Perseroan telah mengukur kembali nilai sengketa pajak yang dibayarkan dalam Rupiah sebagai akibat fluktuasi Rupiah terhadap mata uang Dolar AS. Melemahnya nilai Rupiah terhadap Dolar AS telah menyebabkan nilai sengketa pajak dalam Dolar AS yang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka menurun dibandingkan nilai sebelumnya. Penurunan ini menyebabkan Perseroan mengakui kerugian selisih nilai tukar atas revaluasi pajak dibayar dimuka (kurs yang digunakan pada tanggal neraca 31 Desember 2013 adalah AS\$1 (nilai penuh) = IDR12.198, sementara kurs pada saat pencatatan awal adalah berkisar AS\$1 (nilai penuh) = IDR8.800).

14. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

Tax audit results for 2011 fiscal year

On April 10, 2013, the Company received a Tax Assessment Letter from the Large Taxpayer Office One for 2011. This assessment related to the Tax Audit Result for 2011 since the Company reported a CIT overpayment of US\$45.3 million (full amount). Based on the tax assessment, the amount of overpayment of CIT 2011 was US\$40.2 million (full amount). The correction made by tax office, mainly related to the MAA, interest expenses, and other costs related to the SEFA loan.

With regard to the overpayment assessment on CIT amounting to US\$40.2 million, the Company received the refund on May 1, 2013 in rupiah of IDR390.5 billion after deducting a VAT underpayment assessment of IDR487.7 million (equivalent to US\$44 thousand) (full amount).

With regard to the correction of CIT related to the MAA, interest expenses, and other costs related to SEFA loan, the Company has submitted an objection letter to the Director General of Taxation on July 1, 2013. The objected amount on the CIT overpayment assessment is recorded as part of the tax in dispute account under prepaid taxes (refer to Note 14a).

f. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on a self-assessment basis. As provided under the 1968 Contract, the tax authorities may audit the tax returns and issue an assessment within five years (ten years under the Extension Agreement effective April 1, 2008) from the due date of the tax liability. Also under the terms of the 1968 Contract, corporation taxes should be calculated in US Dollars and paid in US Dollars. It was confirmed in the Extension Agreement that the calculation of the tax payment to be made by the Company in any year will be made in US Dollars based on the net taxable income of the Company expressed in US Dollars, and that all payments of income tax should be made in US Dollars. Installments paid in excess of tax payable are classified as prepaid taxes.

g. Revaluation on tax dispute

As mentioned in Note 14e, the Company has remeasured the tax disputes paid in IDR as a result of fluctuations of Rupiah to US Dollars. The weakening of the Rupiah to US Dollars has resulted in a lower tax in dispute amount recorded as prepaid taxes from its original conversion. The Company has recognised a loss on the currency translation adjustment on revaluation of prepaid tax (exchange rate used in December 31, 2013 is US\$1 (full amount) = IDR12,198, while exchange rate used in original record is approximately US\$1 (full amount) = IDR8,800).

15a. Akruai

15a. Accruals

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Barang dan jasa	20,741	21,505	Goods and services
Royalti, retribusi air, sewa tanah, dan lain-lain	4,929	4,011	Royalties, water levy, land rent and others
Beban keuangan	2,630	3,316	Finance costs
Barang modal	1,672	2,782	Capital items
Jumlah	29,972	31,614	Total

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar dari akrual diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Due to their short-term nature, the carrying amount of accruals approximates their fair value.

Lihat Catatan 31f untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31f for details of related party balances and transactions.

15b. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya

15b. Other current financial liabilities

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Utang dividen	1,798	1,032	Dividends payable
Utang non-operasional lainnya	1,422	-	Other non-operational payable
Uang jaminan yang ditahan	-	338	Guarantee retention
Lainnya	-	52	Others
Jumlah	3,220	1,422	Total

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar dari liabilitas keuangan jangka pendek lainnya diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Due to their short-term nature, the carrying amount of other current financial liabilities approximates their fair value.

16. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

16. Short-term employee benefit liabilities

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Gaji, upah, dan manfaat karyawan lainnya	16,650	12,914	Salaries, wages and other employee benefits

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar dari liabilitas imbalan kerja jangka pendek diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Due to their short-term nature, the carrying amount of short-term employee benefit liabilities approximates their fair value.

Lihat Catatan 31f untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31f for details of related party balances and transactions.

17. Pinjaman bank jangka panjang

17. Long-term bank borrowings

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.	150,000	175,000	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.
Mizuho Corporate Bank, Ltd.	75,000	87,500	Mizuho Corporate Bank, Ltd.
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(5,885)	(6,866)	Unamortized debt issuance costs
	219,115	255,634	
Bagian lancar:			Current portion:
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.	(25,000)	(25,000)	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.
Mizuho Corporate Bank, Ltd.	(12,500)	(12,500)	Mizuho Corporate Bank, Ltd.
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	1,637	1,857	Unamortized debt issuance costs
	(35,863)	(35,643)	
Bagian jangka panjang	183,252	219,991	Non-current portion

17. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

Nilai wajar pinjaman bank jangka panjang saat ini mendekati nilai tercatatnya.

Biaya keuangan yang dibebankan pada laporan laba rugi selama tahun berjalan sebesar AS\$10,95 juta (2012: AS\$13,2 juta) (nilai penuh).

Pada tanggal 30 Nopember 2009, Perseroan ("Peminjam") menandatangani SEFA dengan Mizuho Corporate Bank, Ltd. dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. ("Pemberi Pinjaman"), dengan Vale S.A. (entitas pengendali utama Perseroan) bertindak sebagai penjamin ("Penjamin").

Fasilitas sebesar AS\$300 juta (terdiri dari pinjaman dari bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. sebesar AS\$200 juta dan Mizuho Corporate Bank, Ltd. sebesar AS\$100 juta) (nilai penuh) dibebani tingkat bunga LIBOR ditambah 1,5% per tahun untuk tiap periode pembayaran bunga yang di mulai dari tanggal 19 Februari 2010. Pokok utang akan dibayar dalam 16 kali tengah tahunan mulai tanggal 19 Februari 2012.

Pada saat penarikan pinjaman pada tahun 2009, Peminjam telah membayar biaya dimuka dan biaya agen sebesar AS\$4,5 juta; premi asuransi yang terikat kepada perjanjian ini sebesar AS\$5,7 juta; dan biaya-biaya lainnya sebesar AS\$240 ribu (nilai penuh).

Biaya-biaya berikut merupakan biaya yang harus dibayar sepanjang umur pinjaman:

- Biaya agen kepada *Facility Agent* sebesar AS\$20 ribu (nilai penuh) per tahun yang dibayarkan setiap tanggal 30 Nopember sampai seluruh pinjaman dilunasi.
- Biaya jaminan kepada Penjamin dihitung dari 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman yang belum dilunasi (lihat Catatan 31f).

Fasilitas tersebut terikat pada persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain:

- Untuk menyerahkan kepada *Facility Agent* dalam jangka waktu masing-masing 180 hari dan 90 hari pada setiap akhir tahun dan setiap kuartal, laporan keuangan yang telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan laporan keuangan kuartalan yang tidak diaudit.
- Dana dari pinjaman akan digunakan hanya untuk membiayai konstruksi, pembangunan dan pengoperasian dari Proyek Karebbe.
- Memastikan paling tidak perlakuan *pari passu* dengan semua pinjaman senior lain yang dimiliki Penjamin baik yang tidak dijamin maupun yang bersifat *unsubordinated* yang ada saat ini maupun di masa datang (Pemberi Pinjaman dan Penjamin).
- Sehubungan dengan Periode Penilaian (setiap enam bulan), nilai pasar dari *Designated Off-take Agreement* (setiap perjanjian ekspor awal dan setiap perjanjian ekspor lainnya yang dibentuk oleh Peminjam dari waktu ke waktu) tidak kurang dari 110% *debt service* (bunga ditambah dengan pokok angsuran).
- Selalu menjaga agar nilai pasar dari *Designated Off-take Agreement* tidak kurang dari 110% jumlah komitmen ditambah dengan jumlah pokok pinjaman dan jumlah *debt service coverage*.
- Peminjam akan memerintahkan JP Morgan Chase Bank, N.A. untuk mentransfer cicilan sebagai berikut:
 - Periode bulan kalender pertama bunga 20%
 - Periode bulan kalender kedua bunga 40%
 - Periode bulan kalender ketiga bunga 60%
 - Periode bulan kalender keempat bunga 80%
 - Periode bulan kalender kelima bunga 100%

17. Long-term bank borrowings (continued)

The fair value of the long-term bank borrowings approximates the carrying amount.

Finance costs charged to the profit or loss during the year amounting to US\$10.95 million (2012: US\$13.2 million) (full amount).

On November 30, 2009, the Company (the "Borrower") entered into a SEFA with Mizuho Corporate Bank, Ltd. and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., with Vale S.A. (the Company's ultimate parent entity) acting as the guarantor (the "Guarantor").

The facility of US\$300 million (consisting of loans from the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. of US\$200 million and from Mizuho Corporate Bank, Ltd. of US\$100 million) (full amount) is subject to interest at LIBOR plus 1.5% per annum for the relevant interest period; interest is payable commencing February 19, 2010. The principal will be repaid in 16 semi-annual installments commencing February 19, 2012.

On draw-down of the facility in 2009, the Borrower paid upfront fees and agency fees of US\$4.5 million; insurance premium tied to the agreement of US\$5.7 million; and other fees of US\$240 thousand (full amount).

The following fees are to be paid over the life of the loan by the Company:

- Agency fee to the Facility Agent, amounting to US\$20 thousand (full amount) per annum, paid on every November 30, until all loans have been paid in full.
- Guarantee fee to the Guarantor of 1.5% per annum on the outstanding loan amount (refer to Note 31f).

The facility is subject to certain covenants, among others:

- To furnish to the Facility Agent within 180 days and 90 days of the end of each fiscal year and quarter, respectively, the audited financial statements with an unqualified opinion and the unaudited quarterly financial statements.
- Proceeds of the loan will be used solely to finance the construction, development and operation of the Karebbe Project.
- Ensure at least *pari passu* ranking with all other present and future senior unsecured and unsubordinated indebtedness of the Obligor (Borrower and Guarantor).
- With respect to each Measurement Period (six-month basis), the market value of the Designated Off-take Agreements (each of the initial Export Agreements and each other Export Agreement from time to time designated by the Borrower) will be not less than 110% of the debt service amount (interest plus principal installment).
- At all times the market value of the Designated Off-take Agreements will be not less than 110% of the sum of the commitments plus the outstanding principal amount of the loans together with the debt service coverage amount.
- The Borrower will instruct JP Morgan Chase Bank, N.A. to transfer the installment portion as follows:
 - in the 1st calendar month of the interest period 20%
 - in the 2nd calendar month of the interest period 40%
 - in the 3rd calendar month of the interest period 60%
 - in the 4th calendar month of the interest period 80%
 - in the 5th calendar month of the interest period 100%

17. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

- Peminjam tidak akan memberikan hak atas penjaminan asetnya kepada Pemberi Pinjaman lain selain dari Pemberi Pinjaman yang disebutkan dalam Perjanjian Penjaminan.
- Peminjam dan Penjamin tidak akan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain atau memindahkan keseluruhan atau bagian signifikan dari asetnya ke pihak lain, tanpa ijin dari Pemberi Pinjaman.
- Tidak diperbolehkan menghapus aset yang berkaitan dengan Proyek Karebbe tanpa mendapat ijin terlebih dahulu.
- Penjamin akan menjaga, agar setiap akhir periode semester fiskal dan Penjamin, persyaratan posisi keuangan sebagai berikut:
 - Rasio Utang terhadap Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi ("LBPDA") yang telah disesuaikan tidak lebih dari 4,5 : 1,0.
 - Rasio LBPDA yang telah disesuaikan terhadap biaya bunga tidak kurang dari 2,0 : 1,0.

Kejadian *default*: tidak membayar pokok pinjaman; tidak membayar *fee* atau bunga; tidak memenuhi persyaratan perjanjian; kebangkrutan atau tidak solven.

Pada tanggal 25 Maret 2011, Peminjam melakukan penarikan tambahan atas sisa fasilitas kredit sebesar AS\$150 juta (nilai penuh) (tidak ada biaya pinjaman tambahan yang harus dibayar oleh Peminjam untuk penarikan tersebut). Sehingga, pada tanggal 31 Desember 2013, Peminjam telah melakukan penarikan atas keseturuhan fasilitas kredit SEFA sebesar AS\$300 juta (nilai penuh).

Fasilitas kredit diatas digunakan untuk mendanai Proyek Karebbe. Pada tanggal 31 Desember 2013, Peminjam telah mematuhi persyaratan-persyaratan perjanjian fasilitas kredit ini.

SEFA telah diubah pada Nopember 2012 sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/20/PBI/2011 mengenai Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri melalui Bank Devisa dimana penempatan dana dilakukan melalui sistem perbankan Indonesia.

18. Liabilitas imbalan pascakerja

Perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. Kep-434/KM.17/1997, tertanggal 31 Juli 1997 seperti diumumkan dalam Berita Negara No. 73/1997 tanggal 12 September 1997 untuk mendirikan DPI, suatu dana pensiun yang dikelola secara tersendiri, dimana karyawan tertentu yang diterima sebagai karyawan sebelum 1 Januari 2011 yang telah memenuhi persyaratan masa kerja yang disyaratkan berhak untuk memperoleh tunjangan pensiun berdasarkan manfaat pasti, apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia.

Pada tanggal 17 Desember 2012, Perseroan menerima surat dari Menteri Keuangan No.733/KM.10/2012 mengenai persetujuan untuk likuidasi DPI.

Dengan dilikuidasinya DPI, program dana pensiun karyawan Perseroan telah dipindahkan dan dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang telah ditunjuk oleh Perseroan. Hal ini termasuk dana pensiun yang telah ada yang sebelumnya dikelola oleh DPI maupun dana pensiun yang akan datang yang dibayarkan berdasarkan program *defined contribution* ("DC"). Seluruh karyawan Perseroan yang sebelumnya merupakan peserta DPI dalam program DB akan diikutsertakan dalam program DC yang dikelola oleh DPLK tersebut. Proses likuidasi ini saat ini sedang berlangsung.

17. Long-term bank borrowings (continued)

- The Borrower will not create or permit to exist any lien on any collateral, except for the lien created by the Security Agreement.
- The Borrower and Guarantor will not consolidate with or merge into any other corporation or convey or transfer all or significant part of its assets to any other parties, without the consent of the Lenders.
- No disposal of assets related to Karebbe Project without prior consent.
- The Guarantor will maintain, for each financial test period ending on the last day of each fiscal semester of the Guarantor, the following financial covenants:
 - Debt to Adjusted Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ("EBITDA") ratio of not more than 4.5 : 1.0.
 - Adjusted EBITDA to Interest Expense ratio of not less than 2.0 : 1.0.

Events of default: non-payment of principal; non-payment of fee or interest; failure to satisfy any covenant; involuntary proceedings for bankruptcy or insolvency.

On March 25, 2011, the Borrower made an additional drawdown of the remaining credit facility of US\$150 million (full amount) (there was no additional borrowing cost to be paid by the Borrower for the drawdown). Therefore, as at December 31, 2013, the Borrower has fully drawn down the SEFA facility of US\$300 million (full amount).

The above credit facilities were utilized for financing the Karebbe Project. As at December 31, 2013, the Borrower was in compliance with the covenants under this facility.

The SEFA was amended on November 2012 in accordance with the Bank Indonesia Regulation No. 13/20/PBI/2011 concerning Receipt of Export Proceeds and Withdrawal of Foreign Exchange from External Debt through Foreign Exchange Banks in which placement of funds conducted through the Indonesian banking system.

18. Post-employment benefit liabilities

The Company obtained the approval from the Minister of Finance ("MoF") of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. Kep-434/KM.17/1997 dated July 31, 1997, as published in the State Gazette No. 73/1997 dated September 12, 1997, to establish DPI, a separate trustee established to administer the pension fund, whereby certain employees hired prior to January 1, 2011 after serving for a certain period, are entitled to a defined benefit ("DB") pension fund upon retirement, disability or death.

On December 17, 2012 the Company received a letter from The Minister of Finance No.733/KM.10/2012 regarding the approval for the liquidation of DPI.

As a consequence of liquidating DPI, the pension plan funds of the Company's employees have been transferred and managed by a pension fund financial institution ("DPLK") that has been appointed by the Company. This will include the current pension funds previously managed by DPI and future pension funds paid based on a defined contribution ("DC") approach. All of the Company's employees who were previously participants of DPI DB plan will be included in the DC plan managed by the DPLK. The liquidation process is currently in progress.

18. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

18. Post-employment benefit liabilities (continued)

Liabilitas atas imbalan kerja 31 Desember 2013 dan 2012 dihitung oleh PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris independen yang laporannya masing-masing tertanggal 12 Februari 2014 dan 29 Januari 2013. Liabilitas pada laporan posisi keuangan terdiri dari:

The employee benefit liabilities as at December 31, 2013 and 2012 were calculated by PT Towers Watson Purbajaga, an independent actuary with its reports dated February 12, 2014 and January 29, 2013. The liability in the statements of financial position consists of:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Imbalan kesehatan pascakerja	8,415	15,555	Post-retirement medical benefits
Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan	3,487	6,665	Pension and Labor Law benefits
Jumlah	11,902	22,220	Total
Bagian lancar	(345)	(345)	Current portion
Bagian jangka panjang	11,557	21,875	Non-current portion

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
Asumsi ekonomi:			Economic assumptions:
Tingkat diskonto	9.00%	6.00%	Discount rate
Pengembalian yang diharapkan dari aset program	5.00%	6.75%	Expected return on plan assets
Kenaikan gaji di masa depan	6.00%	4.50%	Future salary increases
Asumsi lainnya :			Other assumptions:
Tingkat mortalita	TMI III 2011	TMI III 2011	Rates of mortality
Tingkat cacat	10% dari tingkat mortalita/	10% dari tingkat mortalita/	Disability rate
	10% of mortality rate	10% of mortality rate	
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal retirement age

Perseroan mengakui keuntungan/(kerugian) aktuarial secara keseluruhan melalui pendapatan komprehensif lainnya pada laporan keuangan tahunan.

The Company uses the OCI approach for the recognition of actuarial gains/(losses) in its annual financial statements.

Kewajiban imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The post-employment benefits obligation recognized in the statements of financial position is determined as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		Jumlah/ Total		December 31
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)					
Nilai kini dari kewajiban	(3,387)	(6,532)	(8,830)	(16,459)	(12,217)	(22,991)	Present value of obligations
Nilai wajar dari aset program	-	-	290	726	290	726	Fair value of plan assets
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(100)	(133)	125	178	25	45	Unrecognized past service cost
	(3,487)	(6,665)	(8,415)	(15,555)	(11,902)	(22,220)	

16. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

18. Post-employment benefit liabilities (continued)

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movement of post-employment benefits obligation recognized in the statements of financial position is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		Jumlah/ Total		December 31
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)							
Pada awal tahun	(6,665)	(1,720)	(15,555)	(10,006)	(22,220)	(11,726)	At the beginning of the year
Beban tahun berjalan	2,382	(5,467)	1,915	(692)	4,297	(6,159)	Expense for the year
Surplus pembenahan	-	-	(19)	21	(19)	21	Employer's contributions
Imbalan yang dibayarkan	335	381	19	-	354	381	Benefits paid
Keuntungan/(Kerugian) aktuarial yang belum diakui pada tanggal 1 Januari dan dibebankan pada laba komprehensif lain	-	365	-	(6,595)	-	(6,230)	Unrecognized actuarial gains/(losses) as at January 1 and charged to other comprehensive income
(Kerugian)/Keuntungan aktuarial di tahun berjalan yang dibebankan pada laba rugi komprehensif lain	461	(224)	5,225	1,717	5,686	1,493	Actuarial (losses)/gains for the year charged to other comprehensive income
	(3,487)	(6,665)	(8,415)	(15,555)	(11,902)	(22,220)	

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dari tanggal 1 Januari 2012 dibebankan ke laba rugi komprehensif lainnya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions incurred from January 1, 2012 are charged to other comprehensive income.

Biaya bersih yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expenses recognized in the profit or loss is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		Jumlah/ Total		December 31
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)							
Biaya jasa kini	(888)	4,630	(3,140)	400	(4,028)	5,030	Current service cost
Biaya bunga	266	3,335	888	319	1,154	3,654	Interest cost
Hasil aset program yang diharapkan	-	(2,987)	(27)	(1,566)	(27)	(4,553)	Expected return on plan assets
Biaya jasa lalu	(1,760)	287	81	1,539	(1,679)	1,826	Past service cost
Penyesuaian lainnya	-	-	283	-	283	-	Other adjustments
Biaya kurtailmen	-	202	-	-	-	202	Cost of curtailments
	(2,382)	5,467	(1,915)	692	(4,297)	6,159	

(Pemulihan)/Beban imbalan pascakerja pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar AS\$4,3 juta dan 2012: AS\$6,2 juta (nilai penuh) dialokasikan ke beban pokok pendapatan.

The post-employment benefits (recovery)/expenses for the years ended December 31, 2013 and 2012 amounting to US\$4.3 million and US\$6.2 million, respectively, (full amount) were allocated to cost of revenue.

Hasil aktual aset program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2013 adalah nil (2012: AS\$1,8 juta) (nilai penuh).

The actual return on plan assets of the defined benefit pension plan as at December 31, 2013 was nil (2012: US\$1.8 million) (full amount).

Mutasi nilai kini kewajiban adalah sebagai berikut:

The movement in the present value of obligations is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		Jumlah/ Total		December 31
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)							
Pada awal tahun	(6,532)	(54,623)	(16,459)	(19,500)	(22,991)	(74,123)	At beginning of the year
Biaya jasa kini	888	(4,630)	3,140	(400)	4,028	(5,030)	Current service cost
Biaya bunga	(266)	(3,335)	(888)	(319)	(1,154)	(3,654)	Interest cost
Imbalan yang dibayarkan	335	4,985	19	280	354	5,265	Benefits paid
Kurtailmen	-	58,459	-	-	-	58,459	Curtailments
(Kerugian)/Keuntungan aktuarial bersih yang diakui selama tahun berjalan	461	(7,388)	5,358	3,400	5,819	(3,908)	Net actuarial (losses)/gains recognized during the year
Perubahan program	1,727	-	-	-	1,727	-	Plan change
	(3,387)	(6,532)	(8,830)	(16,459)	(12,217)	(22,991)	

18. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

18. Post-employment benefit liabilities (continued)

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets is as follows:

31 Desember	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		Jumlah/ Total		December 31
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)							
Pada awal tahun	-	48,775	726	1,181	726	49,956	At beginning of the year
Hasil aktual aset program	-	2,038	(1)	(196)	(1)	1,842	Actual return on plan assets
Iuran pemberi kerja	-	-	(19)	21	(19)	21	Employer's contributions
Imbalan yang dibayarkan	-	(4,604)	19	(280)	19	(4,884)	Benefits paid
Penyesuaian lainnya	-	-	(435)	-	(435)	-	Other adjustments
Kurtailmen	-	(46,209)	-	-	-	(46,209)	Curtailments
	-	-	290	726	290	726	

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan atas dasar pengembalian yang diharapkan tersedia oleh aset yang berasal dari kebijakan investasi masa kini. Tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi atas bunga tetap didasarkan oleh pengembalian kotor di akhir periode pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas menggambarkan tingkat pengembalian oleh pasar yang bersangkutan.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets' underlying current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the end of the reporting period. Expected returns on equity investments reflect long-term real rates of return experienced in the respective markets.

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pascakerja untuk sisa periode yang berakhir pada 2014 adalah sebesar AS\$0,2 juta (nilai penuh).

Expected contributions to post employment benefit plans for the remainder of 2014 are US\$0.2 million (full amount).

Karena likuidasi DPI, tidak terdapat aset program untuk program manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Due to the liquidation of DPI, there are no plan assets for the defined benefit plan as at December 31, 2013 and 2012.

Penyesuaian pengalaman dalam periode lima tahun adalah sebagai berikut:

The five year history of experience adjustments is as follows:

31 Desember	2013	2012	2011	2010	2009	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(12,217)	(22,991)	(74,123)	(66,370)	(44,457)	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	290	726	49,956	62,592	52,364	Fair value of plan assets
Status pendanaan	(11,927)	(22,265)	(24,167)	(3,778)	7,907	Funded status
Penyesuaian pengalaman pada aset program	26	2,711	5,568	(6,685)	(5,868)	Experience adjustments on plan assets
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	5,715	3,908	8,932	19,088	(208)	Experience adjustments on plan liabilities

19. Modal saham

19. Share capital

Pemegang saham Perseroan, jumlah kepemilikan saham dan nilai nominal IDR25 (nilai penuh) per saham pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The Company's shareholders, number of shares and the related par value IDR25 (full amount) per share as at December 31, 2013 and 2012 were as follows:

31 Desember 2013	Jumlah saham/ Total shares	Ribuan AS\$/ US\$ in thousands	%	December 31, 2013
Vale Canada Limited	5,835,607,960	80,115	58.73	Vale Canada Limited
Publik	2,036,346,880	27,957	20.49	Public
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1,996,281,680	27,406	20.09	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Vale Japan Limited	54,083,720	743	0.55	Vale Japan Limited
Sumitomo Corporation	14,018,480	192	0.14	Sumitomo Corporation
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh	9,936,338,720	136,413	100	Total shares issued and fully paid

19. Modal saham (lanjutan)

19. Share capital (continued)

31 Desember 2012	Jumlah saham/ Total shares	Ribuan AS\$/ US\$ in thousands	%	December 31, 2012
Vale Canada Limited	5,835,607,960	80,115	58.73	Vale Canada Limited
Publik	2,036,332,880	27,957	20.49	Public
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	1,996,281,680	27,406	20.09	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Vale Japan Limited	54,083,720	743	0.55	Vale Japan Limited
Sumitomo Corporation	14,018,480	192	0.14	Sumitomo Corporation
Michael J. O'Sullivan	14,000	-	-	Michael J. O'Sullivan
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh	9,936,338,720	136,413	100	Total shares issued and fully paid

Tidak ada pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

No public shareholder owned more than 5% of the total shares issued and fully paid.

20. Deklarasi dividen

20. Dividends declared

Dividen yang telah diumumkan selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Dividends declared during the years ended December 31, 2013 and 2012 were as follows:

	Tanggal dideklarasikan/ Date declared	Tanggal pembayaran/ Date paid	Dividen per lembar saham AS\$ (nilai penuh)/ Dividend per share US\$ (full amount)	Jumlah AS\$, dalam ribuan/ Amount US\$, in thousands	
Dividen Interim 2013	12 Nopember/ November 12, 2013	18 Desember/ December 18, 2013	0.00252	25,040	Interim dividend for 2013
Dividen final 2012	23 April/ April 23, 2013	31 Mei/ May 31, 2013	0.00252	25,040	Final dividend for 2012
Dividen interim 2012	13 Nopember/ November 13, 2012	27 Desember/ December 27, 2012	0.00252	25,040	Interim dividend for 2012
Dividen akhir 2011	25 April/ April 25, 2012	1 Juni/ June 1, 2012	0.00860	85,452	Final dividend for 2011

21. Tambahan modal disetor

21. Additional paid-in capital

Perseroan mempunyai saldo Tambahan Modal Disetor senilai AS\$277,76 juta (2012: AS\$277,76 juta) (nilai penuh) merupakan sisa atas surplus yang terjadi akibat penerbitan saham di atas nilai nominal dan penurunan nilai nominal saham yang terjadi di tahun 1983. Di tahun 1983, Perseroan melakukan restrukturisasi modal (kuasi-reorganisasi) sehingga terjadi alokasi bersih sebesar AS\$205,9 juta (nilai penuh) ke Akumulasi Defisit pada saat itu.

The Company has an Additional Paid-in Capital balance of US\$277.76 million (2012: US\$277.76 million) (full amount) representing the remaining surplus arising from the issuance of shares in excess of par value and a reduction in the par value of its shares in 1983. In 1983, the Company underwent a capital restructuring (quasi reorganization) that resulted in the allocation of a net amount of US\$205.9 million (full amount) to the Accumulated Deficit at the time.

22. Cadangan modal

22. Capital reserves

a. Cadangan jaminan reklamasi

a. Reclamation guarantee reserve

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Saldo awal	7,583	12,641	Beginning balance
Ditransfer ke/(dari) cadangan pada tahun berjalan	28,039	(5,058)	Transferred to/(from) reserve during the year
Jumlah	35,622	7,583	Total

22. Cadangan modal (lanjutan)

a. Cadangan jaminan reklamasi (lanjutan)

Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 ("PP 78/2010") yang mengharuskan Perseroan menyediakan jaminan keuangan atau jaminan reklamasi. Peraturan tersebut mengharuskan setiap perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan studi tahunan yang memperkirakan besarnya jumlah biaya reklamasi dan melaporkan rencana reklamasinya kepada Pemerintah. Rencana tersebut mencakup perkiraan biaya dari pekerjaan untuk pemulihan lahan tambang bila dikerjakan oleh kontraktor luar. Untuk setiap pekerjaan yang tidak dilaksanakan sendiri oleh perusahaan sesuai dengan rencana pada periode tersebut, Pemerintah dapat menuntut pembayaran untuk pekerjaan yang masih harus dikerjakan oleh para kontraktor. Jaminan tersebut dapat berupa rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi atau, pada kondisi tertentu yang menyangkut perusahaan-perusahaan publik, dapat berupa cadangan akuntansi yang dicatat dalam buku Perseroan.

Sebelum dikeluarkannya PP 78/2010 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan No. 336.K/271/DDJP/1996 pada tanggal 1 Agustus 1996, Perseroan membentuk cadangan pada tahun 1998 dengan cara mengalokasikan dari saldo laba suatu jumlah yang dianggap cukup untuk menutup biaya langsung dan biaya tidak langsung yang direncanakan untuk reklamasi pada lima tahun mendatang.

Kegiatan reklamasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 telah disetujui oleh Pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. 961/30/DJB/2012 tanggal 12 Maret 2013 untuk wilayah Sorowako dan Surat Keputusan No. 4166/37/DJB/2011 tanggal 8 Desember 2011 untuk wilayah Pomalaa. Selama tahun 2012, Perseroan memindahkan sejumlah ASS5.058 ribu (nilai penuh) dari cadangan jaminan reklamasi ke saldo laba untuk merefleksikan pengurangan cadangan seperti yang diharuskan dalam surat di atas.

Pada tanggal 10 Oktober 2013, Perseroan menerima surat keputusan mengenai penetapan cadangan jaminan reklamasi untuk periode 2013 – 2017 untuk wilayah Sorowako dari Pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. 1718/30/DJB/2013. Perseroan juga menerima surat keputusan mengenai penetapan cadangan jaminan reklamasi untuk periode 2012 - 2016 untuk wilayah Pomalaa dari Pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. 786/37/DJB/2013 tanggal 8 Mei 2013. Berdasarkan surat tersebut, Perseroan telah memindahkan sejumlah ASS28,0 juta (nilai penuh) dari saldo laba ke cadangan jaminan reklamasi untuk merefleksikan penambahan cadangan seperti yang diharuskan dalam surat di atas.

b. Cadangan umum

Sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Perseroan membentuk cadangan umum sebesar ASS12,1 juta (2012: ASS5,3 juta), berdasarkan jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar IDR248.408.468.000 (nilai penuh) atau setara dengan ASS136,4 juta.

Pada tanggal 23 April 2013, pemegang saham menyetujui mengalokasikan sebagian dari laba bersih Perseroan pada tahun 2012 sebagai tambahan dana cadangan umum sebesar ASS6.749.337 (nilai penuh).

22. Capital reserves (continued)

a. Reclamation guarantee reserve (continued)

A financial surety, or reclamation guarantee, is required under Government Regulation No. 78 ("GR 78") of 2010. The regulation requires that an annual study be undertaken by a mining company operating in Indonesia to estimate its reclamation costs and that a plan be submitted to the Government. The plan includes an estimate of the cost of performing the rehabilitation work by an outside contractor. For any work a company does not carry out in the period pursuant to the plan, the Government can require payment for the outstanding work to be carried out by the contractor. The surety can be in the form of a joint account, time deposit, bank guarantee or, in certain circumstances involving public companies, an accounting reserve recorded in the accounts of the Company.

Prior to the issuance of GR 78/2010 in accordance with the Decision Letter of the Director General of Mining No. 336.K/271/DDJP/1996 dated August 1, 1996, the Company established in 1998 a financial reserve, by transferring from retained earnings, an amount sufficient to cover its planned direct and indirect costs of reclamation for the next five years.

The reclamation activities were agreed upon with the Government for the year ended December 31, 2012, as set out in the Decision Letters of the Directorate General of Minerals and Coal No. 961/30/DJB/2012 dated March 12, 2012 for Sorowako area and the Decision Letter No. 4166/37/DJB/2011 dated December 8, 2011 for the Pomalaa area. During 2012, the Company transferred US\$5,058 thousand (full amount) from the reclamation guarantee reserve to retained earnings to reflect the reduction in the reserve as required in the above mentioned letters.

On October 10, 2013, the Company received a decision letter regarding the establishment of the reclamation guarantee reserve for the period 2013 – 2017 for the Sorowako area from the Government in accordance with its Decision Letters of the Directorate General of Minerals and Coal No. 1718/30/DJB/2013. The Company also received a decision letter regarding the establishment of the reclamation guarantee reserve for the period 2012 – 2016 for the Pomalaa area from the Government in its Decision Letters of the Directorate General of Minerals and Coal No. 786/37/DJB/2013 dated May 8, 2013. Based on the letters, the Company transferred US\$28.0 million (full amount) from retained earnings to the reclamation guarantee reserve to reflect the addition in the reserve as required in the above mentioned letters.

b. General reserve

In accordance with Indonesian Limited Company Law No. 40/2007, the Company set up a reserve amounting to US\$12.1 million (2012: US\$5.3 million), based upon the issued and paid up capital of IDR248,408,468,000 (full amount) or equivalent to US\$136.4 million.

On April 23, 2013, the shareholders approved the allocation of US\$6,749,337 (full amount) of the Company's net profit in 2012 as an additional general reserve.

23. Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

23. Cost of revenue

Cost of revenue for the years ended December 31, 2013 and 2012 were as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Bahan bakar minyak dan pelumas	290,665	305,350	Fuels and lubricants
Bahan pembantu	141,095	131,947	Supplies
Depresiasi, amortisasi, dan deplesi	110,748	102,286	Depreciation, amortization and depletion
Biaya karyawan	100,360	105,979	Employee costs
Kontrak dan jasa	88,608	90,240	Services and contracts
Pajak dan asuransi	27,191	24,920	Taxes and insurance
Royalti	7,093	5,663	Royalties
Lainnya	16,003	17,936	Others
	781,763	784,321	
Persediaan dalam proses			In process inventory
Persediaan awal	38,391	56,900	Beginning balance
Persediaan akhir	(40,699)	(38,391)	Ending balance
Beban pokok produksi	779,455	802,830	Cost of production
Barang jadi			Finished goods
Persediaan awal	13,282	11,074	Beginning balance
Persediaan akhir	(10,993)	(13,282)	Ending balance
Beban pokok pendapatan	781,744	800,622	Cost of revenue

Lihat Catatan 31d untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31d for details of related party balances and transactions.

Rincian pemasok dengan transaksi pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian:

Details of suppliers having transactions representing more than 10% of total purchases:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pihak ketiga			Third parties
Kuo Oil (S) Pte Ltd.	246,325	278,538	Kuo Oil (S) Pte Ltd.

24. Beban usaha

Rincian beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

24. Operating expenses

The components of operating expenses for the years ended December 31, 2013 and 2012 were as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti	8,760	-	Management service, license and royalty fees
Beban bantuan manajemen dan teknis	-	4,658	Management and technical assistance fees
Biaya Karyawan	1,706	1,346	Employee costs
Biaya jasa profesional	1,125	3,570	Professional fees
Lainnya	1,450	3,039	Others
Jumlah	13,041	12,613	Total

Lihat Catatan 31c untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 31c for details of related party balances and transactions.

25a. Pendapatan lainnya

Rincian pendapatan lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pendapatan keuangan	(455)	(564)	Finance income

25b. Beban lainnya

Rincian beban lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Biaya pengembangan proyek	36,484	38,704	Project development costs
Rugi selisih kurs	22,505	6,353	Loss on currency translation adjustments
Lainnya	(1,818)	2,691	Others
Jumlah	57,171	47,748	Total

Lihat Catatan 31d untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

25a. Other income

The components of other income for the years ended December 31, 2013 and 2012 were as follows:

25b. Other expenses

The components of other expenses for the years ended December 31, 2013 and 2012 were as follows:

Refer to Note 31d for details of related party balances and transactions.

26. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

Beban akresi diakui sebagai bagian dari beban keuangan dalam laporan laba rugi komprehensif. Pergerakan di saldo provisi atas penghentian pengoperasian aset adalah sebagai berikut:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Saldo awal	42,110	39,805	Beginning balance
Beban akresi	3,732	2,305	Accretion expense
Saldo akhir	45,842	42,110	Ending balance

26. Provision for asset retirement

Accretion expense is recognized as part of finance costs in the statement of comprehensive income. Movement in the provision for the asset retirement balance is as follows:

27. Pengeluaran untuk lingkungan hidup lainnya

Pada tahun 1993, Perseroan memperoleh persetujuan Pemerintah atas Studi Evaluasi Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemanfaatan Lingkungan Hidup. Laporan-laporan tersebut memberikan informasi dan rencana-rencana pendahuluan kepada Pemerintah mengenai program-program pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan Perseroan saat ini. Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2013, sejumlah inisiatif, yang merupakan sebagian dari komitmen Perseroan di dalam rencana-rencana tersebut, telah diselesaikan, sementara yang lainnya masih sedang berlangsung. Inisiatif-inisiatif yang kini sedang terus berlangsung termasuk penghijauan daerah puma tambang untuk menyeimbangkannya dengan tingkat pembukaan wilayah tambang yang baru.

Pengeluaran untuk lingkungan hidup yang dibebankan ke laporan laba rugi adalah sebesar AS\$6,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (2012: AS\$7,08 juta) (nilai penuh). Pengeluaran barang modal yang berhubungan dengan proyek lingkungan hidup berjumlah AS\$9,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (2012: AS\$1,85 juta) (nilai penuh). Di samping itu, Cadangan Jaminan Reklamasi telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku (lihat Catatan 22a).

27. Other environmental expenditures

In 1993, the Company received approval from the Government for its Environmental Evaluation Study, Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan. These reports provided the Government with information and preliminary plans regarding the Company's current environmental programs. During the year ended December 31, 2013, a number of initiatives, representing part of the Company's commitments under these plans, were completed while others were still in progress. Ongoing initiatives include the revegetation of mined-out areas to match the stripping rates of new mining areas.

Environmental expenditures charged to the profit or loss were US\$6.0 million for the year ended December 31, 2013 (2012: US\$7.08 million) (full amount). Capital expenditures for environmental projects were US\$9.3 million for the year ended December 31, 2013 (2012: US\$1.85 million) (full amount). In addition, a Reclamation Guarantee Reserve has been set up in accordance with applicable Government requirements (refer to Note 22a).

28. Biaya karyawan

Jumlah biaya karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar ASS104,3 juta (2012: ASS112,5 juta) (nilai penuh).

28. Employee costs

Total employee costs for the year ended December 31, 2013 amounted to US\$104.3 million (2012: US\$112.5 million) (full amount).

29. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi jumlah laba yang diperuntukkan kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan. Tidak ada laba per saham yang terdilusi.

29. Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing total profit attributable to the shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during the period.

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai laba per saham dasar)			(US Dollars, in thousands, except basic earnings per share)
Jumlah laba tahun berjalan yang tersedia bagi pemegang saham	38,652	67,494	Total profit for the year attributable to the shareholders
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar (dalam ribuan)	9,936,339	9,936,339	Weighted average number of ordinary shares outstanding (in thousands)
Laba per saham dasar (dalam ASS)	0.004	0.007	Basic earnings per share (in US\$)

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

As at December 31, 2013 and 2012, there were no existing instruments which could result in the issue of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share are equivalent to basic earnings per share.

30. Ikatan dan perjanjian-perjanjian penting yang signifikan

Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting seperti disebutkan di bawah ini :

30. Significant commitments and agreements

The Company has entered into various significant agreements as mentioned below :

Pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Jenis perjanjian/ Agreement type	Periode perjanjian/ Agreement period
Kuo Oil (S) Pte. Ltd.	Pembelian Minyak Berkadar Sulfur Tinggi/ Purchase of High Sulphur Fuel Oil (HSFO)	1 Januari 2014 - 31 Maret 2014/ January 1, 2014 - March 31, 2014
PT Pertamina (Persero)	Pembelian Solar Berkecepatan Tinggi/ Purchase of High Speed Diesel (HSD)	1 Januari 2014 - 30 April 2014/ January 1, 2014 - April 30, 2014
PT Marunda Graha Mineral	Pembelian batu bara/ Purchase of coal	1 Januari 2013 - 31 Maret 2014/ January 1, 2013 - March 31, 2014
PT Trakindo Utama	Pembelian suku cadang/ Purchase of spare parts	31 Desember 2013 - 31 Mei 2014/ December 31, 2013 - May 31, 2014
Halcon Primo Logistics Pte. Ltd.	Jasa freight forwarding global/ Global freight forwarding	1 Nopember 2010 - 30 Nopember 2014/ November 1, 2010 - November 30, 2014

Catatan atas Laporan Keuangan
PT Vale Indonesia Tbk
31 Desember 2013 dan 2012

Notes to the Financial Statements
PT Vale Indonesia Tbk
December 31, 2013 and 2012

30. Ikatan dan perjanjian-perjanjian penting yang signifikan (lanjutan)

30. Significant commitments and agreements (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Perseroan memiliki komitmen pembelian barang dan jasa yang terkait dengan biaya operasi dan biaya capital dengan pemasok pihak ketiga, yang harus dilunasi dalam periode sebagai berikut:

As at December 31, 2013 and 2012, the Company had purchase commitments for goods and services related to operating expenses and capital expenses with third party suppliers, which are payable within the periods as shown below:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Tidak lebih dari 1 tahun	137,992	292,653	No later than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	38,170	71,576	Later than 1 year and no later than 5 years
Lebih dari 5 tahun	405	1,314	Later than 5 years
Jumlah	176,567	365,543	Total

31. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi

31. Related party information

Perseroan berada di bawah pengendalian Vale Canada Limited. Perusahaan pengendali utama Perseroan adalah Vale S.A. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The Company is controlled by Vale Canada Limited. The ultimate parent company is Vale S.A. Transactions with related parties are as follows:

a. Pendapatan

a. Revenue

Seluruh penjualan Perseroan dilakukan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS, di mana harga ditentukan dengan formula yang didasarkan atas harga tunai nikel di Pasar Bursa Logam London ("the London Metal Exchange" atau "LME") dan harga realisasi rata-rata nikel Vale Canada Limited. Pasal 6 dari Kontrak Karya 1968 menyatakan bahwa Perseroan harus menjual hasil produksinya dengan harga dan syarat-syarat yang sesuai dengan keadaan pasar dunia. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa Pemerintah berhak untuk meninjau setiap perubahan atas perumusan harga. Semua penjualan merupakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

The Company's sales are made based on long-term, "must take", US Dollar-denominated sales contracts, with prices determined by a formula that is based on the London Metal Exchange ("LME") cash price for nickel and Vale Canada Limited's average net realized price for nickel. Article 6 of the 1968 Contract states that the Company is obliged to sell its product at prices and on terms compatible with world market conditions. The article also states that the Government has the right to review adjustments in the pricing formula. All amounts represent sales to related parties.

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 terdiri dari:

Revenue for the years ended December 31, 2013 and 2012 consist of:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Penjualan kepada Vale Canada Limited	737,258	773,119	Sales to Vale Canada Limited
Penjualan kepada Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	184,380	194,208	Sales to Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Jumlah	921,638	967,327	Total
(Persentase penjualan kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan)	100%	100%	(Related party sales as a percentage of total revenue)

b. Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi

b. Compensation of the Boards of Commissioners and Directors

Dewan Komisaris dan Direksi adalah personil manajemen kunci Perseroan.

The Boards of Commissioners and Directors are the key management personnel of the Company.

Kompensasi yang dibayar atau terutang kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

The compensation paid or payable to the Board of Commissioners and Directors is shown below:

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013/ For the year ended December 31, 2013			
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
(Dalam ribuan Dolar AS) / (US Dollars, in thousands)	% ¹⁾	Amount	% ¹⁾	Amount
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	0.32%	338	0.97%	1,015
Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	-	-	1.62%	1,686
Pembayaran berbasis saham/ Share-based payments	-	-	-	-
	0.32%	338	2.59%	2,701

¹⁾ % terhadap jumlah biaya karyawan / % of total employee costs

31. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

31. Related party information (continued)

b. Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

b. Compensation of the Boards of Commissioners and Directors (continued)

(Dalam ribuan Dolar AS) / (US Dollars, in thousands)	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012/ For the year ended December 31, 2012			
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
	% ¹⁾	Amount	% ¹⁾	Amount
Gaji dan imbalan pekerjaan jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	0.23	257	1.24%	1,392
Imbalan pascakerja/ Post-employment benefits	-	-	2.08%	2,336
Pembayaran berbasis saham/ Share-based payments	-	-	0.16%	182
	0.23	257	3.48%	3,910

¹⁾% terhadap jumlah biaya karyawan/% of total employee costs

Perseroan juga memberi opsi kepada personil manajemen kunci untuk membeli "opsi setara saham" Perseroan dengan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu. "Opsi setara saham" mempunyai nilai yang sama dengan saham Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pengekskusi opsi biasanya dilakukan dengan pembayaran kas. Opsi yang dieksekusi dicatat sebagai biaya karyawan. Opsi yang dieksekusi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah nil. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 biaya kompensasi setara saham adalah nihil.

The Company has also awarded key management personnel options to purchase "share option equivalents" of the Company at a predetermined exercise price. A "share option equivalent" has the same value as a common share of the Company traded on the Indonesia Stock Exchange. The exercise of such options is usually settled in cash. Options exercised are included in employee costs. Options exercised for the year ended December 31, 2013 and 2012 were nil. For the years ended December 31, 2013 and 2012, share equivalent compensation costs were nil.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, terdapat opsi yang belum dilaksanakan untuk membeli 127.000 setara saham, dengan harga yang ditentukan terlebih dahulu berkisar antara IDR1,804 sampai dengan IDR7,350 dalam nilai penuh. Pada tanggal 31 Desember 2013 and 2012, kewajiban Perseroan sehubungan dengan imbalan ini adalah nihil.

As at December 31, 2013 and 2012, there were outstanding options to purchase an aggregate of 127,000 share equivalents with predetermined prices ranging from IDR1,804 to IDR7,350 in full amount. As at December 31, 2013 and 2012, the Company's obligation relating to this benefit were nil.

c. Beban Jasa Manajemen, Lisensi dan Royalti

c. Management Service, License and Royalty fees

Di tahun 2013, Perseroan telah melakukan pembaharuan atas perjanjian bantuan manajemen dan teknis yang merupakan bantuan Vale Canada Limited untuk merealisasikan proyek-proyek Perseroan, mekanisme pembiayaannya, konstruksi dan operasi dari fasilitas Perseroan, dan pemasaran produk Perseroan. Pembaharuan perjanjian ini dilakukan untuk mencerminkan kondisi praktik bisnis yang umum digunakan saat ini untuk jasa-jasa yang sifatnya serupa. Perjanjian bantuan manajemen dan teknis dengan Vale Canada Limited diganti dengan perjanjian jasa manajemen dan perjanjian lisensi dan royalti yang secara substansi mengatur jenis dan ruang lingkup yang sama.

In 2013, the Company decided to amend the management and technical assistance agreements which previously represented Vale Canada Limited's assistance for realisation of the Company's projects, its financing scheme, the construction and operation of the Company's facilities, and the marketing of the Company's products. The amendment is applied to reflect the prevailing business practice for these types of service arrangement. The management and technical assistance agreement with Vale Canada Limited was changed with the management service agreement and license and royalty agreement which substantively sets a similar type and scope of work.

Beban untuk jasa manajemen dan lisensi dan royalti digolongkan sebagai beban usaha (lihat Catatan 24) di dalam laporan laba rugi. Berdasarkan pembaharuan perjanjian, beban jasa manajemen dihitung dari biaya aktual ditambah biaya jasa 10%, sementara beban lisensi dan royalti dihitung dari 0,8% dari nilai pendapatan kotor. Formula perhitungan ini merupakan pembaharuan dari formula beban bantuan manajemen dan teknis berdasarkan perjanjian terdahulu yang dihitung dari nilai terendah antara 1,8% dari nilai pendapatan bersih atau 4% dari laba kena pajak, tetapi dengan syarat jumlah terutang per kuartal tidak kurang dari ASS25.000 (nilai penuh).

Management service, license and royalty fees are classified as operating expenses (refer to Note 24) in the profit or loss. Based on the amendment, the management service fee is calculated at actual cost plus a service fee of 10%, while the license and royalty fee is calculated at 0.8% of gross proceeds. These formulas replace the previous management and technical assistance agreement in which the management and technical assistance fees are calculated as the lower of 1.8% of net revenue or 4% of net taxable income, provided that the amount payable for each quarter should not be less than US\$25,000 (full amount).

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) Vale Canada Limited	8,760	4,658	Vale Canada Limited
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban usaha)	67.17%	36.93%	(As a percentage of total operating expenses)

(US Dollars, in thousands)

31. Informasi mengenai pihak berelasi (lanjutan)

31. Related party information (continued)

d. Beban lainnya

d. Other costs

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Vale Europe Limited	36	368	Vale Europe Limited
Vale Japan Limited	77	918	Vale Japan Limited
Jumlah	113	1,286	Total
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan)	0.01%	0.16%	(As a percentage of total cost of revenue)

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Vale Technology Development (Canada) Limited	860	4,200	Vale Technology Development (Canada) Limited
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban pengembangan proyek)	2.36%	10.85%	(As a percentage of total project development costs)

e. Aset

e. Assets

i) Piutang usaha

i) Trade receivables

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Vale Canada Limited	52,295	76,587	Vale Canada Limited
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	13,607	36,053	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Jumlah	65,902	112,640	Total
(Sebagai persentase terhadap piutang usaha)	100%	100%	(As a percentage of trade receivables)

ii) Aset keuangan lancar lainnya

ii) Other current financial assets

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Pinjaman kepada personil manajemen kunci diatas IDR1 milyar*)	307	148	Loans to key management personnel above IDR1 billion*)
Pinjaman kepada personil manajemen kunci dibawah IDR1 milyar	81	-	Loans to key management personnel below IDR1 billion
Jumlah pinjaman kepada personil manajemen kunci	388	148	Total loans to key management personnel
Dikurangi: Bagian jangka panjang	(305)	(111)	Less: Non-current portion
Bagian jangka pendek	83	37	Current portion
(Sebagai persentase terhadap aset keuangan lancar lainnya)	1.06%	0.35%	(As a percentage of other current financial assets)

*) Personil manajemen kunci yang mempunyai saldo pinjaman lebih dari IDR1 milyar per 31 Desember 2013 hanyalah Febrany Eddy (2012: Bernardus Imanto).

*) Key management personnel with a loan balance of more than IDR1 billion as at December 31, 2013 is only Febrany Eddy (2012: Bernardus Imanto).

31. Informasi mengenai pihak berelasi (lanjutan)

31. Related party information (continued)

e. Aset (lanjutan)

e. Assets (continued)

iii) Piutang pihak berelasi non-usaha

iii) Non-trade receivables from related parties

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Pinjaman kepada personil manajemen kunci – jangka panjang	305	111	Loans to key management personnel – non-current
(Sebagai persentase terhadap piutang pihak berelasi non-usaha)	100%	100%	(As a percentage of non-trade receivables from related parties)
Jumlah aset yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	66,290	112,788	Total assets associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah aset)	2.91%	4.83%	(As a percentage of total assets)

f. Liabilitas

f. Liabilities

i) Utang usaha

i) Trade payables

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Vale Canada Limited	9,367	6,754	Vale Canada Limited
Vale Technology Development (Canada) Limited	1,800	3,836	Vale Technology Development (Canada) Limited
Vale Japan Limited	30	20	Vale Japan Limited
Vale Europe Limited	14	278	Vale Europe Limited
Jumlah	11,211	10,888	Total
(Sebagai persentase terhadap jumlah utang usaha)	14.85%	13.77%	(As a percentage of total trade payables)

ii) Akruai

ii) Accruals

Berkaitan dengan SEFA (lihat Catatan 17), Perseroan dan Vale S.A., entitas pengendali utama dari Perseroan, melakukan perjanjian jaminan dimana Vale S.A. setuju untuk menjamin AS\$300 juta fasilitas utang yang diterima Perseroan. Biaya jaminan sebesar 1,5% per tahun dari setiap jumlah pinjaman yang diambil oleh Perseroan dari SEFA akan terhutang kepada Vale S.A. Selanjutnya, biaya sebesar 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman yang belum dilunasi harus dibayar sepanjang umur pinjaman. Biaya tersebut akan terhutang oleh Perseroan pada setiap tanggal pembayaran bunga (tanggal pembayaran bunga pertama adalah hari kerja terakhir pada Februari 2010, dan selanjutnya pada hari kerja terakhir pada Agustus dan Februari).

In connection with the SEFA (refer to Note 17), the Company and Vale S.A., the ultimate parent entity of the Company, entered into a loan guarantee agreement whereby Vale S.A. has agreed to guarantee a US\$300 million debt facility obtained by the Company. A guarantee fee of 1.5% per annum on each loan drawdown made by the Company under the SEFA is payable to Vale S.A. Subsequently, the fee of 1.5% per annum on the outstanding loan amount is to be paid over the life of the loan. The fee is payable by the Company on each interest payment date (the first interest payment date was the last business day in February 2010, and thereafter the last business day of each August and February).

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Biaya garansi yang masih harus dibayar	1,163	1,334	Accrued guarantee fee
(Sebagai persentase terhadap jumlah akrual)	3.88%	4.22%	(As a percentage of total accrual)

iii) Liabilitas atas pembayaran berbasis saham

iii) Share-based payment liabilities

31 Desember	2013	2012	December 31
(US Dollars, in thousands)			
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham			Share-based payment liabilities
Diatas IDR1 milyar*	-	-	Above IDR1 billion*
Dibawah IDR1 milyar	15	14	Below IDR1 billion
Jumlah	15	14	Total
(Sebagai persentase terhadap liabilitas atas pembayaran berbasis saham)	3.49%	100%	(As a percentage of share-based payment liabilities)
Jumlah liabilitas yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	12,389	12,236	Total liabilities associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas)	2.19%	2.00%	(As a percentage of total liabilities)

* Pembayaran berbasis saham telah diberikan kepada beberapa karyawan kunci (lihat Catatan 31b). Tidak ada pihak yang mempunyai saldo pembayaran berbasis saham dengan nilai pasar lebih dari IDR1 milyar (nilai penuh) per 31 Desember 2013 dan 2012.

* Share based payments have been provided to certain key personnel (refer to Note 31b). There is no individual with a balance of share based payments with a market value of more than IDR1 billion (full amount) at December 31, 2013 and 2012.

31. Informasi mengenai pihak berelasi (lanjutan)

31. Related party information (continued)

g. Pihak-pihak berelasi

g. Related parties

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi/ <i>Nature of relationship with the related parties</i>	Transaksi/ <i>Transaction</i>
Vale S.A.	Entitas pengendali utama/ <i>Ultimate parent entity</i>	Penjamin dari pinjaman Perseroan dengan kompensasi biaya jaminan/ <i>Guarantor of loans of the Company in return for guarantee fee</i>
Vale Canada Limited	Perusahaan induk/ <i>Parent entity</i>	Penjualan barang jadi; Jasa profesional; Jasa manajemen, lisensi dan royalti/ <i>Sale of finished goods; Professional services; Management service, license and royalty fees</i>
Vale Europe Limited	Perusahaan Afiliasi/ <i>Affiliated Company</i>	Tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan/ <i>Expense reimbursement of the Company</i>
Vale Japan Limited	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan/ <i>Expense reimbursement of the Company</i>
Vale Australia Pty Ltd	Perusahaan Afiliasi/ <i>Affiliated Company</i>	Tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan/ <i>Expense reimbursement of the Company</i>
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Penjualan barang jadi/ <i>Sale of finished goods</i>
Vale Technology Development (Canada) Limited	Perusahaan Afiliasi/ <i>Affiliated Company</i>	Jasa teknis/ <i>Technical services</i>
Dana Pensiun Internasional Nickel Indonesia	Dana pensiun pemberi kerja sebelumnya untuk karyawan Perseroan/ <i>Former trustee administered pension fund for Company employees</i>	Pendanaan program pensiun pada tahun 2012/ <i>Funding of pension plan in 2012</i>
Manajemen kunci/ <i>Key management</i>	Personil manajemen kunci dari Perseroan/ <i>Key management personnel of the Company</i>	Kompensasi dan remunerasi; pinjaman rumah dan pinjaman pribadi; opsi setara saham/ <i>Compensation and remuneration; housing and personal loans; share option equivalents</i>

Kebijakan Perseroan terkait penetapan harga untuk transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The Company's pricing policies related to the transactions with related parties are as follows:

- Penjualan barang jadi:
Berdasarkan kontrak-kontrak penjualan "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS dengan penentuan harga jual berdasarkan harga tunai nikel di Pasar Bursa Logam London (*"the London Metal Exchange"*) dan harga realisasi rata-rata nikel Vale Canada Limited (lihat Catatan 31a).
- Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti:
Pembayaran jasa manajemen dihitung dari biaya aktual ditambah jasa 10%. Untuk lisensi dan royalti dihitung dari 0.8% dari penjualan kotor (lihat Catatan 31c).
- Pembayaran jasa teknis, dihitung dari biaya aktual ditambah 10% jasa, sedangkan tagihan atas beban yang dibayarkan atas nama Perseroan dibayarkan sesuai biaya aktualnya.
- Biaya jaminan terhadap pinjaman jangka panjang sebesar A\$300 juta dihitung dari 1,5% dari setiap utang yang diambil oleh Perseroan berdasarkan perjanjian jaminan pinjaman antara Perseroan dan Vale S.A. (lihat Catatan 31f).
- Sale of finished goods:
Based on long-term, "must take" US Dollar denominated sales contracts, with price determined based on the London Metal Exchange cash price for nickel and Vale Canada Limited's average net realized price for nickel (refer to Note 31a).
- Management service, license and royalty fees:
The fee for management service fee is calculated at actual cost plus a service fee of 10%. The license and royalty fee is calculated at 0.8% of gross proceeds (refer to Note 31c).
- The fee for technical service is calculated at actual cost plus a service fee of 10%, while reimbursement of expenses and expenditures on the Company's behalf are charged at cost.
- Guarantee fee on US\$300 million long-term borrowings is 1.5% of each loan drawdown by the Company based on a loan guarantee agreement between the Company and Vale S.A. (refer to Note 31f).

32. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Rupiah pada 31 Desember 2013 telah dikonversikan ke dalam mata uang Dolar AS dengan menggunakan kurs AS\$1 (nilai penuh) = IDR12.198.

Pada 26 Februari 2014 kurs bergerak dari AS\$1 (nilai penuh) = IDR12.198 menjadi AS\$1 (nilai penuh) = IDR11.681. Ada kemungkinan bahwa Rupiah akan makin berfluktuasi di masa yang akan datang, dan mungkin akan terdepresiasi atau terapresiasi secara signifikan.

Tidak terdapat pergerakan aset moneter bersih dalam mata uang asing yang signifikan apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal 26 Februari 2014.

32. Monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars

As at December 31, 2013 monetary assets and liabilities denominated in Rupiah have been translated into US Dollars using an exchange rate of US\$1 (full amount) = IDR12,198.

As at February 26, 2014 the exchange rate has moved from US\$1 (full amount) = IDR12,198 to US\$1 (full amount) = IDR11,681. It is possible that the Indonesian Rupiah may become more volatile in the future, and may depreciate or appreciate significantly.

There is no significant movement in net foreign currency monetary assets if assets and liabilities in foreign currency as at December 31, 2013 was translated using the exchange rate at February 26, 2014.

31 Desember	2013		December 31	
	Mata Uang Asing (Jutaan/ Foreign Currencies (Millions)	Setara AS\$ (Ribuan/ US\$ Equivalent (Thousands)		
Aset				Assets
Kas dan setara kas	IDR	112,343	9,210	Cash and cash equivalents
Aset keuangan lancar lainnya	IDR	84,080	6,893	Other current financial assets
Pajak dibayar dimuka	IDR	691,884	56,721	Prepaid taxes
Piutang pihak berelasi non-usaha	IDR	3,720	305	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	IDR	163,635	13,415	Other non-current financial assets
Jumlah aset moneter dalam mata uang asing			86,544	Total monetary assets in foreign currencies
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	IDR	(79,238)	(6,496)	Third parties
	EUR	(2)	(3,063)	
	AUD	(1)	(1,035)	
	Others	(4)	(2,034)	
Pihak-pihak berelasi	JPY	(3)	(30)	Related parties
Utang pajak	IDR	(84,231)	(6,905)	Taxes payable
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	IDR	(203,095)	(16,650)	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	IDR	(15,164)	(1,242)	Other current financial liabilities
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing			(37,455)	Total monetary liabilities in foreign currencies
Aset moneter bersih dalam mata uang asing			49,089	Net monetary assets in foreign currencies

Perseroan tidak melakukan lindung nilai atas risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah karena seluruh penjualan dan sebagian besar biaya Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami (lihat Catatan 35).

33. Informasi segmen

Perseroan beroperasi hanya dalam satu segmen usaha dan geografis, yaitu penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Seluruh produk Perseroan dijual berdasarkan kontrak penjualan jangka panjang (lihat Catatan 31a).

The Company does not hedge the risk of fluctuations in the exchange rate of Rupiah since all sales and most of the Company's expenses are carried out in US Dollars which indirectly represents a natural hedge (refer to Note 35).

33. Segment information

The Company operates in only one business and geographical segment: nickel mining and processing in Indonesia. All of the Company's products are delivered under long-term sales contracts (refer to Note 31a).

34. Aset dan liabilitas keuangan

Informasi di bawah ini berkaitan dengan aset dan liabilitas keuangan berdasarkan kategori akun:

34. Financial assets and liabilities

The information given below relates to the Company's financial assets and liabilities by category:

31 Desember 2013	Jumlah/ Total	Pinjaman dan piutang/ Loans and receivables	Nilai wajar diakui pada laba-rugi/ Fair value through profit or loss	Aset keuangan lainnya/ Other financial assets	December 31, 2013
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US Dollars, in thousands)
Aset keuangan:					Financial assets:
Kas dan setara kas	200,020	200,020	-	-	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	16,723	16,723	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	65,902	65,902	-	-	Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	7,804	7,804	-	-	Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	305	305	-	-	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	13,415	13,415	-	-	Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	304,169	304,169	-	-	Total financial assets

31 Desember 2012	Jumlah/ Total	Pinjaman dan piutang/ Loans and receivables	Nilai wajar diakui pada laba-rugi/ Fair value through profit or loss	Aset keuangan lainnya/ Other financial assets	December 31, 2012
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US Dollars, in thousands)
Aset keuangan:					Financial assets:
Kas dan setara kas	172,239	172,239	-	-	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	17,333	17,333	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	112,640	112,640	-	-	Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	10,548	10,548	-	-	Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	111	111	-	-	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	16,623	16,623	-	-	Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	329,494	329,494	-	-	Total financial assets

31 Desember 2013	Jumlah/ Total	Nilai wajar diakui pada laba-rugi/ Fair value through profit or loss	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	December 31, 2013	
(Dalam ribuan Dolar AS)					(US Dollars, in thousands)
Liabilitas keuangan:					Financial liabilities:
Utang usaha	(75,515)	-	(75,515)	Trade payables	
Akrua	(29,972)	-	(29,972)	Accruals	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(16,650)	-	(16,650)	Short-term employee benefit liabilities	
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(3,220)	-	(3,220)	Other current financial liabilities	
Pinjaman bank	(219,115)	-	(219,115)	Bank borrowings	
Jumlah liabilitas keuangan	(344,472)	-	(344,472)	Total financial liabilities	

34. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

34. Financial assets and liabilities (continued)

31 Desember 2012	Jumlah/ Total	Nilai wajar diakui pada laba-rugi/ Fair value through profit or loss	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	December 31, 2012
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Liabilitas keuangan:				Financial liabilities:
Utang usaha	(79,059)	-	(79,059)	Trade payables
Akrual	(31,614)	-	(31,614)	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(12,914)	-	(12,914)	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(1,422)	-	(1,422)	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(255,634)	-	(255,634)	Bank borrowings
Jumlah liabilitas keuangan	(380,643)	-	(380,643)	Total financial liabilities

35. Pengelolaan risiko keuangan

35. Financial risk management

Aktivitas Perseroan terpengaruh oleh berbagai jenis risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar, risiko harga dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara umum, program pengelolaan risiko keuangan Perseroan berfokus kepada ketidakpastian pasar keuangan dan berusaha meminimalkan efek tidak wajar terhadap kinerja keuangan Perseroan.

The Company's activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk, price risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company's overall financial risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the financial performance of the Company.

Pengelolaan risiko dilakukan oleh Direksi Perseroan. Direksi mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatur risiko keuangan, sesuai keperluan. Direksi menyediakan prinsip-prinsip keseluruhan untuk pengelolaan risiko, termasuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risk management is carried out by the Company's Board of Directors. The Board identifies, evaluates and manages financial risks, where considered appropriate. The Board of Directors provides principles for overall risk management, including market risk, credit risk and liquidity risks.

Manajemen risiko permodalan

Capital risk management

Tujuan Perseroan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal dan mengurangi untuk mengurangi biaya modal.

The Company's objective when maintaining capital is to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Konsisten dengan entitas lain dalam industri yang sama, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan rasio *gearing*. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah utang neto dengan jumlah modal. Utang neto dihitung dari jumlah pinjaman dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung dari "ekuitas" seperti yang ada pada laporan posisi keuangan ditambah utang neto.

Consistent with others in the industry, the Company monitors capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt divided by total capital. Net debt is calculated as total borrowings as shown in the statements of financial position less cash and cash equivalents excluding restricted cash. Total capital is calculated as "equity" as shown in the statements of financial position plus net debt.

Strategi Perseroan selama tahun 2013 dan 2012 adalah mempertahankan rasio *gearing* berkisar di atas 15%. Rasio *gearing* pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The Company's strategy, during 2013 and 2012, was to maintain the gearing ratio within up to 15%. The gearing ratios as at December 31, 2013 and 2012 were as follows:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pinjaman bank (Catatan 17)	219,115	255,634	Bank borrowings (Note 17)
Dikurangi:			Less:
Kas dan setara kas (Catatan 5)	(200,020)	(172,239)	Cash and cash equivalents (Note 5)
Utang neto	19,095	83,395	Net debt
Jumlah ekuitas	1,714,266	1,721,434	Total equity
Jumlah modal	1,733,361	1,804,829	Total capital
Rasio <i>gearing</i>	1%	5%	Gearing ratio

Perubahan atas rasio *gearing* selama 2013 terutama dikarenakan kenaikan kas dan setara kas dan pengurangan pada pinjaman yang mengakibatkan perubahan dalam utang neto.

The change in the gearing ratio during 2013 resulted primarily from the increase in cash and cash equivalents and reduction in borrowings which resulted in the change in net debt.

35. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

35. Financial risk management (continued)

Risiko pasar

Market risk

(i) Risiko nilai tukar

(i) Foreign exchange risk

Penjualan, pendanaan dan mayoritas pengeluaran operasional Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga Perseroan tidak terekspos secara signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar.

The Company's sales, financing and the majority of its operating expenditures are denominated in US Dollars, and as such the Company does not have a significant exposure to fluctuations in foreign exchange rates.

Pada 31 Desember 2013, jika mata uang Dolar AS melemah/menguat sebesar 3% dibandingkan dengan mata uang Rupiah dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba sesudah pajak untuk tahun berjalan akan menjadi ASS0,9 juta (2012: ASS1,6 juta) (nilai penuh) lebih rendah/tinggi, terutama disebabkan oleh penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang Rupiah seperti dijelaskan pada Catatan 32.

As at December 31, 2013, if the US Dollar had weakened/strengthened by 3% against the Rupiah with all other variables held constant, post-tax profit for the year would have been US\$0.9 million (2012: US\$1.6 million) (full amount) lower/higher, mainly as a result of foreign exchange gains/losses on translation of the Rupiah denominated monetary assets and liabilities as detailed in Note 32.

(ii) Risiko harga

(ii) Price risk

Perseroan terpengaruh oleh fluktuasi dalam harga nikel dan bahan bakar. Operasi dan kinerja keuangan dapat terpengaruh negatif dari harga nikel, dimana akan ditentukan lebih lanjut oleh permintaan dan penawaran nikel dunia, harga minyak dan faktor lainnya seperti curah hujan yang cukup untuk menjamin keberlanjutan operasi PLTA. Perseroan mengelola secara aktif risiko-risiko ini dengan melakukan penyesuaian seperlunya atas jadwal dan operasi pertambangan untuk mengurangi dampak fluktuasi.

The Company is exposed to fluctuations in nickel and fuel prices. The operations and financial performance may be adversely affected by the price of nickel, which in turn will be determined by worldwide nickel supply and demand, oil price and other factors such as sufficient rainfall to maintain hydroelectric operations. The Company actively manages these risks by adjusting production schedules and mining operations as necessary to reduce the impact of volatility.

Pada tanggal 31 Desember 2013, harga rata-rata nikel meningkat/menurun sebesar 10%, dengan semua variabel lain tetap, pendapatan Perseroan meningkat/menurun sebesar ASS92,2 juta (2012: ASS96,7 juta) (nilai penuh).

As at December 31, 2013, if the average price of nickel had increased/decreased by 10%, with all variables held constant, the Company's revenue would have increased/decreased by US\$92.2 million (2012: US\$96.7 million) (full amount).

Pada 31 Desember 2013 dan 2012, tidak terdapat instrumen keuangan yang nilainya terkait langsung dengan pergerakan harga nikel dunia. Sehingga, fluktuasi harga nikel dunia tidak akan berdampak terhadap nilai buku dari instrumen keuangan Perseroan.

At December 31, 2013 and 2012, there was no financial instrument whose value was directly linked to movement of the world nickel price. Therefore, fluctuation of world nickel price will have no impact on the carrying amount of the Company's financial instruments.

(iii) Risiko suku bunga

(iii) Interest rate risk

Paparan suku bunga dimonitor untuk meminimalkan akibat negatifnya terhadap Perseroan. Pinjaman yang diterima pada suku bunga variabel membuat arus kas Perseroan terpengaruh oleh risiko suku bunga.

Interest rate exposure is monitored to minimize any negative impact to the Company. Borrowings issued at variable rates expose the Company to cash flow interest rate risk.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang terpengaruh oleh suku bunga.

The following table presents a breakdown of the Company's financial assets and liabilities which are impacted by interest rates.

31 Desember/December 31, 2013						
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Tidak terikat bunga/ <i>Non interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>		
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Aset						Assets
Kas dan setara kas	84,272	-	115,740	-	8	200,020 Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	-	16,723	16,723 Restricted cash
Piutang usaha	-	-	-	-	65,902	65,902 Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	-	-	-	-	7,804	7,804 Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	-	-	-	-	305	305 Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	-	-	-	13,415	13,415 Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	84,272	-	115,740	-	104,157	304,169 Total financial assets

35. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

35. Financial risk management (continued)

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

(iii) Risiko suku bunga (lanjutan)

(iii) Interest rate risk (continued)

31 Desember/December 31, 2013						
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Tidak terikat bunga/ <i>Non interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>		
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	-	-	-	-	(75,515)	(75,515) Trade payables
Akrua	-	-	-	-	(29,972)	(29,972) Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	-	-	-	(16,650)	(16,650) Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	-	-	-	-	(3,220)	(3,220) Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(35,863)	(183,252)	-	-	-	(219,115) Bank borrowings
Jumlah liabilitas keuangan	(35,863)	(183,252)	-	-	(125,357)	(344,472) Total financial liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2013 jika suku bunga lebih tinggi/rendah 0,25% dengan semua variabel lain tetap, maka laba tahun berjalan akan menjadi lebih tinggi/rendah AS\$677 ribu (2012: AS\$785 ribu) (nilai penuh) yang timbul sebagai akibat beban bunga yang lebih tinggi/rendah atas pinjaman jangka panjang.

As at December 31, 2013, if the interest rates had been 0.25% higher/lower with all variables held constant, profit for the year would have been US\$677 thousand (2012: US\$785 thousand) (full amount) lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest expense on borrowings.

Risiko kredit

Risiko kredit cukup rendah karena produk nikel dalam *matte* Perseroan, yang merupakan produk setengah jadi, dijual di pasar ekspor menggunakan kontrak "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS dengan Vale Canada Limited (induk Perseroan) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. yang merupakan salah satu pemegang saham mayoritas Perseroan. Risiko kredit juga muncul dari kas dan selera kas, terutama kas di bank dan deposito berjangka. Untuk bank, Perseroan hanya menyimpan dana di bank lokal maupun internasional yang bereputasi bagus untuk memperbaiki risiko kredit (lihat Catatan 5a).

Credit risk

Credit risk is minimal as the Company's nickel in *matte*, an intermediate product, is sold in export markets pursuant to long-term, US Dollar denominated "must take" contracts with Vale Canada Limited (parent company) and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., one of the Company's major shareholders. Credit risk also arises from cash and cash equivalents, specifically from cash in banks and time deposits. The Company has a policy to select reputable local and overseas banks to minimize credit risk (refer to Note 5a).

Tidak terdapat piutang yang melebihi batasan kredit selama tahun pelaporan ini dan manajemen percaya tidak terdapat kerugian dari buruknya kinerja pelanggan.

There are no receivables exceeding their credit limit during the reporting period, and management does not expect any losses from non-performance by these counterparties.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Piutang dagang:			Trade receivables:
Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal:			Counterparties with external credit rating:
Fitch			Fitch
BBB+	52,295	76,587	BBB+
Japan Credit Rating Agency			Japan Credit Rating Agency
AA- (Sebelumnya A+)	13,607	36,053	AA- (Previously A+)
Berperingkat	65,902	112,640	Rated

35. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

35. Financial risk management (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Bank dan deposito berjangka (Moody's):			Cash in bank and time deposits (Moody's):
P-1	197,608	119,507	P-1
P-2	-	22,426	P-2
P-3	2,404	29,871	P-3
Berperingkat	200,012	171,804	Rated
Tidak berperingkat	-	409	Not rated

Risiko likuiditas

Liquidity risk

Risiko likuiditas muncul dalam situasi dimana Perseroan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Pengelolaan risiko likuiditas dengan kehati-hatian mengimpikasikan pemeliharaan kecukupan kas dan setara kas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan melakukan pengawasan berkala atas arus kas yang direncanakan dan arus kas aktual dan memasangkan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan langgal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang disajikan adalah arus kas kontraktual dan tidak didiskonkakan.

The table below analyses the Company's financial liabilities into relevant maturity grouping based on the remaining period to the contractual maturity date. The amount disclosed in the table is the contractual undiscounted cash flow.

31 Desember 2013	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ Between 3 months and 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	December 31, 2013
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)				
Utang usaha	(75,515)	-	-	-	-	Trade payables
Akrual	(29,972)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(12,337)	(4,313)	-	-	-	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(3,220)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(430)	-	-	-	-	Share-based payment liabilities
Pinjaman bank	(18,750)	(18,750)	(37,500)	(112,500)	(37,500)	Bank borrowings
31 Desember 2012		December 31, 2012				
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)				
Utang usaha	(79,059)	-	-	-	-	Trade payables
Akrual	(31,614)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(9,056)	(3,858)	-	-	-	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(1,422)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(14)	-	-	-	-	Share-based payment liabilities
Pinjaman bank	(18,750)	(18,750)	(37,500)	(112,500)	(75,000)	Bank borrowings

Estimasi nilai wajar

Fair value estimation

Nilai wajar adalah nilai dimana aset dapat dipertukarkan atau liabilitas dibayarkan antara pihak-pihak mengetahui dan ikut serta dalam transaksi pada tingkat yang wajar.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arms's length transaction.

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajar pada 31 Desember 2013.

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at December 31, 2013.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi

a. Perihal lingkungan hidup

Kehutanan

Pada tanggal 4 Februari 2008, Peraturan Pemerintah No. 2/2008 ("PP No. 2/2008") mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dikeluarkan. Penerimaan negara bukan pajak tersebut dihitung berdasarkan suatu formula tertentu atas tarif-tarif tergantung pada maksud, rencana, penggunaan dan jenis kawasan hutan yang digunakan dikalikan dengan luasnya kawasan hutan yang digunakan. Tarif tersebut berkisar antara IDR1,2 sampai IDR3 juta per hektar per tahun. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008, (yang digantikan dengan Peraturan No. P. 16/Menhut-II/2011 tanggal 4 April 2011, diubah dengan Peraturan No. P. 38/Menhut-II/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dan terakhir diubah dengan Peraturan No. P. 14/Menhut-II/2013 tanggal 25 Februari 2013), mewajibkan 13 pemegang ijin atau perjanjian pertambangan perusahaan tambang (termasuk Perseroan) untuk mengajukan ijin pinjam pakai. Oleh karena itu, Perseroan telah mengajukan permohonan ijin pinjam pakai bagi kawasan hutan di dalam wilayah Kontrak Karya Perseroan, tetapi dengan penegasan bahwa hak-hak Perseroan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Karya Perseroan tidak diabaikan. Kontrak Karya telah memberikan Perseroan semua lisensi dan ijin yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan perusahaannya serta kewenangan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas pertambangan di dalam area yang tercakup dalam Kontrak Karya.

Perseroan belum menerima ijin pinjam-pakai kawasan hutan di wilayah Kontrak Karya Perseroan. Perseroan telah menerima ijin pinjam-pakai hanya untuk kawasan hutan untuk Proyek Karebbe di luar wilayah Kontrak Karya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.299/Menhut-II/2007 (yang diperpanjang dengan Surat Keputusan SK.436/Menhut-II/2013). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.02/2009 tanggal 8 Mei 2009 penerimaan negara bukan pajak terhutang berdasarkan area hutan yang tercantum dalam ijin pinjam-pakai. Oleh karena itu per tanggal 31 Desember 2012, Perseroan telah melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak untuk kawasan hutan yang terganggu di wilayah proyek Karebbe sebesar IDR277 juta (setara dengan ASS29 ribu) (nilai penuh) untuk periode bulan Agustus 2012 – Agustus 2013. Per Tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak untuk kawasan hutan yang terganggu di wilayah proyek Karebbe sebesar IDR278 juta (setara dengan ASS27 ribu) untuk periode bulan Juni 2013 – Juni 2014. Belum terdapat akrual atas pembayaran untuk pendapatan negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam PP No. 2/2008 untuk area dalam wilayah Kontrak Karya dikarenakan ijin pinjam pakai untuk area tersebut belum dikeluarkan. Hal ini konsisten dengan perlakuan yang diterapkan pada kebanyakan perusahaan tambang yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisa, Perseroan berkeyakinan bahwa pendapatan negara bukan pajak tahunan untuk area hutan yang ijin pinjam pakainya belum diterbitkan adalah sekitar ASS2 juta per tahun (nilai penuh).

Pada tanggal 1 Februari 2010, Peraturan Pemerintah No. 24/2010 ("PP No. 24/2010") terkait dengan penggunaan area kehutanan diterbitkan, yang telah diubah melalui PP No. 61/2012. Peraturan tersebut mengatur penggunaan area kehutanan (baik untuk tujuan komersial maupun non komersial) harus dilakukan berdasarkan ijin pinjam pakai. Untuk penggunaan kawasan dimana luas kawasan hutan adalah 30% atau kurang, pemegang ijin pinjam pakai diharuskan untuk menyediakan kompensasi lahan dengan rasio 1:1 untuk tujuan non komersial dan 1:2 untuk tujuan komersial. Untuk penggunaan kawasan dimana luas kawasan hutannya adalah lebih dari 30%, pemegang ijin pinjam pakai diharuskan membayar pendapatan negara bukan pajak dan melakukan rehabilitasi untuk area yang terganggu dengan rasio 1:1 untuk tujuan non komersial dan sedikitnya 1:1 untuk tujuan komersial. Pemegang ijin pinjam pakai dapat melakukan aktivitas pembukaan lahan namun, selain itu, harus membayar kompensasi dalam bentuk iuran tetap, provisi sumber daya hutan dan /atau dana reboisasi.

36. Contingent assets and liabilities

a. Environmental matters

Forestry

On February 4, 2008 Government Regulation No. 2/2008 ("GR No. 2/2008") regarding the type and tariff of non-tax state revenue from the use of forestry land for non-forestry development was issued. The non-tax state revenue is calculated based on a specific formula of fixed tariff depending on the purpose of the proposed use and type of forest area being used, multiplied by the size of forest area being used. The tariffs range from IDR1.2 to IDR3 million per hectare per annum. Regulation of the Minister of Forestry No. P.43/Menhut-II/2008 dated July 10, 2008, (which was replaced by Regulation No. P.16/Menhut-II/2011 dated April 4, 2011, amended by Regulation No. P.38/Menhut-II/2012 dated October 2, 2012 and lastly amended by Regulation No. P.14/Menhut-II/2013 dated February 25, 2013), requires 13 holders of permits or contract mining companies (including the Company) to apply for a lend-use permit. Therefore, the Company has applied for a lend-use permit for forest areas within its CoW area, but with strong reservation that its rights as provided in the CoW are not abrogated. The CoW provides the Company with all licenses and permits to construct and operate the enterprise as well as all authorizations needed to conduct mining activities in the areas covered by the CoW.

The Company has not yet received a lend-use permit for the forest areas within the Company's CoW area. The Company has received a lend-use permit only for the forestry areas for the Karebbe Project that are outside of the CoW area under Decision Letter of the Minister of Forestry No. SK.299/Menhut-II/2007 (which further extended under Decision Letter SK.436/Menhut-II/2013). Based on Regulation of the Minister of Finance No. 91/PMK.02/2009 dated May 8, 2009 the non-tax state revenue is payable for forest areas covered by a valid lend-use permit. Therefore as at December 31, 2012, the Company made the payment of non-tax state revenue for the affected area in the Karebbe Project in the amount of IDR 277 million (equivalent to US\$29 thousand) (full amount) for the August 2012 – August 2013 period. As at December 31, 2013, the Company made the payment of non-tax state revenue for the affected area in the Karebbe Project in the amount of IDR 278 million (equivalent to US\$27 thousand) for the June 2013 – June 2014 period. No accrual has been made for the non-tax state revenue regulated by GR No. 2/2008 for areas within the CoW area, as lend-use permits have not been issued. This is consistent with the treatment being adopted by most mining companies in Indonesia.

Based on the result of the analysis, the Company believes the annual non-tax state revenue payable for forest areas for which lend-use permits have not yet been issued would be approximately US\$2 million per annum (full amount).

On February 1, 2010, Government Regulation No. 24/2010 ("GR No. 24/2010") regarding the use of forestry areas was issued, as amended by GR No. 61/2012. The regulation requires that any use of forestry areas (whether it is for commercial or non-commercial usage) must be based on a lend-use permit. For the use of an area where 30% or less is covered by forest, the holder of a lend-use permit is required to provide land compensation in a ratio of 1:1 for non commercial use and 1:2 for commercial use. For the use of an area with more than 30% covered by forest, the holder of a lend-use permit is required to pay non-tax state revenue and perform rehabilitation of the affected area in a ratio of 1:1 for non-commercial use and at least 1:1 for commercial use. The holder of a lend-use permit may perform deforestation activities but, in addition, must pay compensation in the form of a fixed fee, a charge for forest resources and/or reforestation funds.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

Kehutanan (lanjutan)

Oleh karena Perseroan telah menerima ijin pinjam pakai hanya untuk kawasan hutan di wilayah Proyek Karebbe (yang sebagian areanya berada diluar wilayah Kontrak Karya), Perseroan telah membayar sebesar ASS\$62 ribu dalam bentuk dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan ("PSDH") untuk wilayah hutan yang terganggu sebesar IDR157 juta (setara dengan ASS\$16,8 ribu) (nilai penuh) pada tanggal 28 Juni 2006 ketika Perseroan pertama kali memperoleh ijin pinjam pakai per langgal laporan keuangan ini, belum terdapat akrual dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan untuk wilayah hutan yang terganggu dalam wilayah Kontrak Karya Perseroan karena ijin pinjam pakai belum dikeluarkan untuk wilayah ini.

Peraturan pelaksanaan PP No. 24/2010 dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 4 April 2011, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 ("PerMen P.18/2011") (yang mencabut P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008), yang mengatur mengenai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pada dasarnya PerMen P.18/2011 mengatur tentang prosedur ijin pinjam pakai secara umum dan jangka waktu mendapatkan ijin pinjam pakai, termasuk untuk 13 perusahaan-perusahaan tambang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004. Suatu ijin pinjam pakai dapat diberikan untuk tahap eksplorasi atau tahap eksploitasi (produksi). Apabila untuk tahap eksplorasi (kecuali untuk contoh ruah), persyaratan-persyaratannya lebih lunak, dimana Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL") dan gambar satelit tidak diwajibkan. Durasinya juga lebih pendek, yakni dua tahun, namun dapat diperpanjang. Untuk tahap eksploitasi (produksi), durasinya adalah lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan durasi pemegang ijin untuk beroperasi (misalnya Kontrak Karya).

Pada 2 Oktober 2012, PerMen P.18/2011 diubah dengan Peraturan No. P.38/Menhut-II/2012 ("PerMen P.38/2012"). PerMen P.38/2012 menambahkan beberapa kewajiban kepada pemegang ijin pinjam pakai, termasuk untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar area pinjam pakai.

Pada 25 Februari 2013, PerMen P.18/2011 kembali diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2013 ("PerMen P.14/2013"). Berdasarkan PerMen P.14/2013, masa berlaku ijin pinjam pakai untuk kegiatan operasi produksi adalah sama dengan jangka waktu perizinan operasionalnya.

Salah satu dokumen penting yang disyaratkan oleh pihak Kementerian untuk mengeluarkan ijin pinjam pakai adalah surat rekomendasi dari Gubernur dari lokasi area Kontrak Karya. Perseroan sudah memperoleh surat rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tengah (pada Februari 2013) dan Gubernur Sulawesi Selatan (pada Januari 2013), dan juga dari Gubernur Sulawesi Tenggara (pada Mei 2013).

Dituar dari hal diatas, pemegang ijin pinjam pakai diharuskan untuk melakukan reboisasi atas area aliran sungai (watershed). Kewajiban ini diatur melalui Ketentuan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2011 mengenai petunjuk reboisasi untuk pemegang ijin pinjam pakai dalam kerangka rehabilitasi dari daerah aliran sungai ("PerMen P.63/2011"), yang diterbitkan tanggal 5 September 2011 untuk menerapkan GR No. 24/2010. PerMen P.63/2011 menentukan lokasi dan prosedur untuk reboisasi. Luas wilayah reboisasi ditentukan berdasarkan ijin pinjam pakai tersebut digunakan untuk keperluan komersial atau non komersial. Untuk keperluan non komersial, luas wilayah minimum adalah dengan rasio minimum 1:1. Untuk keperluan komersial, luas yang diwajibkan adalah dengan rasio minimum 1:1 ditambah dengan area yang terkena dampak dari kategori L3 (area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi).

Melihat kondisi di atas, Perseroan berkeyakinan bahwa kewajiban keuangan belum jatuh tempo karena ijin pinjam pakai untuk area hutan dalam wilayah Kontrak Karya belum diterbitkan.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

a. Environmental matters (continued)

Forestry (continued)

As the Company has received a lend-use permit only for the forestry areas for the Karebbe Project (half of the area being located outside the CoW area), the Company paid US\$62 thousand in reforestation funds and a charge for forest resources for the affected forest area in the amount of IDR157 million (equivalent to US\$16.8 thousand) (full amount) on June 28, 2006 when the Company first obtained the lend-use permit. As at the date of these financial statements, no accrual has been made for the reforestation funds and a charge for forest resources for the affected forest area within the Company's CoW area as lend-use permits have not yet been issued for these areas.

An implementing regulation for GR No. 24/2010 was issued by the Minister of Forestry on April 4, 2011, i.e. Regulation of the Minister of Forestry No. P.18/Menhut-II/2011 ("Reg P.18/2011") (which revoked P.43/Menhut-II/2008 dated July 10, 2008), regulating the use of forest areas for non-forestry development purposes and timeline of obtaining the lend-use permit. Reg P.18/2011 basically regulates the general lend-use permit procedure, including for the holders of 13 mining licenses stipulated under Presidential Decree No. 41 of 2004. A lend-use permit can be given for the exploration phase or the exploitation (production) phase. If for the exploration phase (except for bulk sampling), the requirements are more lenient, an Environmental Impact Assessment ("AMDAL") and satellite imaging are not required. The duration is also shorter, namely two years, but is extendable. For the exploitation (production) phase, the duration is five years and can be extended in accordance with the duration of the holder's permit to operate (e.g. a CoW).

On October 2, 2012, Reg P.18/2011 was amended by Regulation No. P.38/Menhut-II/2012 ("Reg P.38/2012"). Reg P.38/2012 adds more obligations to lend-use permit holders, including conducting empowerment of the community surrounding the lend-use permit area.

On February 25, 2013, Reg P.18/2011 was further amended by Minister of Forestry Regulation No. P.14/Menhut-II/2013 ("Reg P.14/2013"). Based on Reg P.14/2013, the validity of the lend-use permit for production is in accordance with the terms of the operational license.

One of the critical documents required by the Ministry to issue a lend-use permit is a recommendation letter from the Governor of the province where the CoW area is located. The Company obtained a recommendation letter from the Governor of Central Sulawesi (in February 2013) and the Governor of South Sulawesi (in January 2013) and also a letter from the Governor of South East Sulawesi (in May 2013).

Apart from the above, the holder of a lend-use permit is required to conduct forestation of river flow areas (watershed). This requirement is governed under the Minister of Forestry Regulation No. P.63/Menhut-II/2011 regarding forestation guidelines for the holders of lend-use permits in the framework of the rehabilitation of watershed ("Reg P.63/2011"), which was issued on September 5, 2011 to implement GR No. 24/2010. Reg P.63/2011 determines locations and forestation procedures. The size of the area of forestation depends on whether the permit held is for commercial or non-commercial purposes. For non-commercial purposes, the size is in a minimum ratio of 1:1. For non-commercial use, the size is in a minimum ratio of 1:1 plus the planned affected area of L3 category (disturbed area due to permanent usage of the forestry area which technically is not possible for reclamation).

Given the above conditions, the Company believes that the financial obligations have not yet come due as the lend-use permits for the forestry within the CoW area have not yet been issued.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

Kehutanan (lanjutan)

Pada 14 Mei 2012, Kementerian Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 2626/Menhut-V/PHL/2012 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai atas nama Perseroan. Surat Keputusan ini diterbitkan untuk menetapkan area rehabilitasi daerah aliran sungai atas ijin pinjam pakai Karebbe. Luas area rehabilitasi berdasarkan keputusan ini ditetapkan seluas 250 hektar (Ha). Perseroan akan mengeluarkan IDR15 juta/Ha untuk memenuhi kewajiban reboisasi ini (setara dengan perkiraan AS\$0,4 juta).

Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Ijin Lingkungan dikeluarkan pada bulan Februari 2012 sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan baru ini, seluruh perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Ijin Lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh ijin usaha.

Perseroan telah memperoleh persetujuan AMDAL dari Pemerintah mencakup seluruh area yang saat ini diusahakannya di wilayah Sorowako. Oleh karena persetujuan AMDAL tersebut diperoleh sebelum peraturan baru ini berlaku, AMDAL tersebut akan dengan sendirinya dianggap sebagai Ijin Lingkungan bagi Perseroan. Perseroan tidak perlu mengajukan permohonan akan hal tersebut. Pada September 2013, Perseroan memperoleh AMDAL dan Ijin Lingkungan untuk area Bahodopi. Perseroan telah mulai melakukan studi AMDAL untuk mencakup pengembangan operasional di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah ("Growth AMDAL"). Perseroan juga dalam proses melakukan studi AMDAL untuk wilayah Pomalaa. Target diperolehnya persetujuan untuk Growth AMDAL dan Pomalaa AMDAL adalah tahun 2014.

b. Reklamasi tambang dan penutupan tambang

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah mengumumkan peraturan pelaksanaan bagi UU Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4/2009 ("UU Pertambangan 2009"), yaitu Peraturan Pemerintah No. 78/2010 ("PP No. 78") yang mengatur reklamasi dan kegiatan pasca penambangan baik untuk pemegang Ijin Usaha Pertambangan-Eksplorasi ("IUP")-Eksplorasi maupun Ijin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi ("IUP-Operasi Produksi"). Peraturan ini memperbaharui Peraturan Menteri No. 18/2008 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM") pada tanggal 29 Mei 2008. Pemegang IUP-Eksplorasi diwajibkan antara lain untuk menyertakan rencana reklamasi dalam rencana kerja dan anggaran eksplorasi dan menyediakan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi diwajibkan antara lain untuk mempersiapkan (1) rencana reklamasi lima tahun; (2) rencana pasca tambang; (3) jaminan reklamasi yang dapat dalam bentuk rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi atau cadangan akuntansi (jika memenuhi syarat); dan (4) garansi pasca tambang dalam bentuk deposito berjangka pada bank milik pemerintah. Kewajiban untuk menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak membebaskan pemegang IUP dari kewajiban untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Provisi transisi dalam PP No. 78 menetapkan bahwa pemegang Kontrak Karya juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan ini.

Penempatan (deposito) tersebut tidak disebutkan atau dipersyaratkan dalam Kontrak Karya. Berkaitan dengan hal ini, Perseroan telah atau akan mengambil tindakan-tindakan berikut:

- Untuk reklamasi tambang, Perseroan telah membentuk cadangan akuntansi sesuai dengan surat keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (lihat Catatan 22a).

36. Contingent assets and liabilities (continued)

a. Environmental matters (continued)

Forestry (continued)

On May 14, 2012, the Ministry of Forestry issued Decree No. 2626/Menhut-V/PHL/2012 regarding stipulation on Forestation Location in the Framework of Watershed Rehabilitation under the name of the Company. This Decree is issued to determine the watershed forestation area with respect to the Karebbe land-use permit. The size of the forestation area based on this decree is 250 hectares (Ha). The Company shall incur IDR15 million/Ha to fulfil this forestation obligation (equivalent to approximately US\$0.4 million).

Government Regulation No. 27/2012 on Environmental Licenses was issued in February 2012 as an implementation from Law No. 32/2009 on Environmental Management and Protection. Under the new regulation, all companies are required to obtain an Environmental License as a prerequisite for their business license.

The Company already has an approved AMDAL from the Government covering its existing activities in the Sorowako area. As the approval pre-dates the new Government Regulation, this AMDAL is automatically deemed as the Company Environmental License. No formal action is required by the Company for this matter. In September 2013, the Company obtained an AMDAL approval and Environmental License for the Bahodopi area. The Company has started the AMDAL study which covers its operational expansions in South Sulawesi and Central Sulawesi ("Growth AMDAL"). The Company is also in the process of preparing an AMDAL study for the Pomalaa area. The target for obtaining approvals for both the Growth AMDAL and Pomalaa AMDAL is 2014.

b. Mine reclamation and mine closure

On December 20, 2010, the Government released an implementing regulation for Law No. 4/2009 on Mineral and Coal Mining ("2009 Mining Law"), i.e. Government Regulation No. 78/2010 ("GR 78") that deals with reclamation and post-mining activities for both "Ijin Usaha Pertambangan" ("IUP")-Exploration and "Ijin Usaha Pertambangan" ("IUP")-Production Operation holders. This regulation updates Ministerial Regulation No. 18/2008 issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources ("MEMR") on May 29, 2008. An IUP-Exploration holder, among other requirements, must include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state-owned bank.

An IUP-Production Operation holder, among other requirements, must (1) prepare a five-year reclamation plan; (2) prepare a post-mining plan; (3) provide a reclamation guarantee which may be in the form of a joint account or time deposit placed at a state-owned bank, a bank guarantee or an accounting reserve (if eligible); and (4) provide a post-mine guarantee in the form of a time deposit at a state-owned bank. The requirement to provide reclamation and post-mine guarantees does not release the IUP holder from the requirement to perform reclamation and post-mine activities. The transitional provisions in GR 78 make it clear that CoW holders are also required to comply with this regulation.

No such placement (deposit) is contemplated or required under the CoW. In view of the foregoing, the Company has taken, or will take, the following actions:

- For mining reclamation, the Company has established an accounting reserve through decision letters from Directorate General of Minerals and Coal (refer to Note 22a).

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

b. Reklamasi tambang dan penutupan tambang (lanjutan)

- Untuk penutupan tambang, Perseroan telah beberapa kali berkorespondensi dengan KESDM untuk membahas revisi rencana penutupan tambang. Menyusul keputusan KESDM berdasarkan surat tanggal 13 Oktober 2009, Perseroan harus membentuk deposito berjangka untuk penyediaan penutupan tambang. Sesuai ketentuan tersebut, setelah beberapa korespondensi, pada awal Juli 2011 Perseroan mengajukan rencana revisi rencana pasca penutupan tambang yang meliputi jaminan pasca penutupan tambang yang diusulkan untuk persetujuan KESDM tersebut.
- Pada tanggal 10 Oktober 2013, Perusahaan menerima surat keputusan mengenai pembentukan cadangan jaminan reklamasi untuk area Sorowako periode 2013 hingga 2017 dan area Pomalaa periode 2013 hingga 2017. Berdasarkan surat-surat tersebut, Perusahaan telah memindahkan ASS28 juta dari laba ditahan ke cadangan jaminan reklamasi.

Manajemen percaya bahwa tidak akan ada dampak material atas ketentuan rehabilitasi atau penutupan tambang yang disebabkan oleh revisi terhadap rencana. Selain itu, kewajiban mengadakan deposito berjangka tidak akan berdampak signifikan terhadap sumber kas atau posisi keuangan Perseroan.

c. Kesanggupan Kontrak Karya

Umum

Berdasarkan Kontrak Karya, Perseroan menyanggupi untuk membangun pabrik produksi di Pomalaa (Sulawesi Tenggara) dan Bahodopi (Sulawesi Tengah), bergantung pada kelayakan ekonomis dan teknis. Kontrak Karya menyebutkan bahwa pabrik pertama akan beroperasi sekitar tahun 2005 dan pabrik kedua sekitar tahun 2010 (namun Kontrak Karya tidak menyebutkan pabrik mana yang harus pertama dibangun). Sampai dengan tanggal dibuatnya laporan ini, Perseroan belum melakukan pembangunan pabrik produksi di Pomalaa ataupun di Bahodopi, karena hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan pabrik tidak layak secara ekonomis.

Sesuai dengan Pasal 171 dari UU Pertambangan 2009, Perseroan menyampaikan Rencana Kerja Jangka Panjang ("RKJP") pada tahun 2010. RKJP tersebut menjelaskan rencana kegiatan Perseroan didalam wilayah Kontrak Karya sampai dengan periode 2045 (sampai lebih dari masa berakhirnya Kontrak Karya pada Desember 2025), termasuk penjelasan mengenai rencana kegiatan di wilayah Bahodopi. Kegiatan yang dijelaskan dalam RKJP Perseroan terkait dengan Bahodopi secara material berbeda dengan apa yang dimuat dalam Kontrak Karya.

Pada April 2011, Perseroan mempresentasikan rencana strategis 5 tahun yang berbeda dengan RKJP Perseroan and kesanggupan Kontrak Karya. Pada Mei 2011, KESDM menyampaikan tanggapan atas rencana strategis 5 tahun; yang pada akhirnya, KESDM meminta informasi tambahan dan menyampaikan catatannya atas beberapa aspek tertentu dari proyek.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

b. Mine reclamation and mine closure (continued)

- For mine closure, the Company has corresponded with MEMR on several occasions for discussion of the revised mine closure plan. Following the decision of the MEMR, based on the letter dated October 13, 2009, the Company should establish a time deposit for the mine closure provision. In compliance thereof, after several correspondences, in early July 2011 the Company submitted a revised post mine closure plan which includes the proposed post mine closure guarantee for the MEMR's approval.
- On October 10, 2013 the Company received a decision letter regarding the establishment of a reclamation guarantee reserve for the Sorowako area for the period from 2013 to 2017 and also for the Pomata area for the period from 2012 to 2016. Based on those letters, the Company transferred US\$28 million from retained earnings to the reclamation guarantee reserve.

Management believes that there will be no material impact on rehabilitation or mine closure provisions as a result of revisions to the plan. Further, the requirement to establish a time deposit will not significantly impact the Company's cash resources or financial position.

c. Contract of Work undertaking

Genera

Based on the CoW, the Company undertakes to construct production plants in Pomalaa (Southeast Sulawesi) and Bahodopi (Central Sulawesi), subject to economical and technical feasibility. The CoW provides that the first plant would be in operation by about 2005 and the second plant by about 2010 (but the CoW does not specify which plant was to be constructed first). Until the date of this report, the Company has not constructed a production plant in Pomalaa or Bahodopi, as the results of the studies showed that the plant constructions are not economically feasible.

In accordance with Article 171 of the 2009 Mining Law, the Company submitted its Long-Term Plan (the "LTP") in 2010. The LTP sets out the Company's planned activity in the CoW Area covering the period up to 2045 (beyond the expiration of the CoW in December 2025), including a discussion of activity planned for the Bahodopi area. The activities set out in the Company's LTP relating to Bahodopi are materially different than those set forth in the CoW.

In April 2011, the Company presented its 5-year strategic plan to the MEMR, which is different from the Company's LTP submission and the CoW undertakings. In May 2011, the MEMR responded to the Company's 5-year strategic plan; essentially, the MEMR requested more information and expressed concern on certain aspects of projects.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

c. Kesanggupan Kontrak Karya (lanjutan)

Umum (lanjutan)

Pada Juli 2012, Perseroan menyampaikan strategi pengembangan yang telah direvisi untuk pembangunan dan investasi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara ("Proposal Tumbuh Bersama 2012"). Pada Juni 2013, Perseroan menyampaikan proposal strategi pertumbuhan yang direvisi, yang menjelaskan strategi pertumbuhan dan investasi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara ("Proposal Tumbuh Bersama 2013"). Strategi pertumbuhan Perseroan sehubungan dengan Pomalaa dan Bahodopi, sebagaimana dijelaskan dalam Proposal Tumbuh Bersama 2013, mencakup pembangunan antara lain, potensi pembangunan proyek HPAL melalui *joint venture* di Pomalaa dan potensi pembangunan fasilitas pengolahan hilir dan fasilitas pengolahan utama di Bahodopi. Studi sehubungan dengan proyek HPAL saat ini sedang dilakukan, begitu pula dengan studi sehubungan dengan opsi Bahodopi untuk penambangan, pengolahan, pemurnian dan infrastruktur. Diskusi dengan Pemerintah sehubungan dengan strategi pertumbuhan Perseroan saat ini masih berlangsung. Apabila Proposal Tumbuh Bersama 2013 diterima oleh Pemerintah (dalam hal ini, KESDM), Perseroan berencana untuk menyampaikan revisi RKJP berdasarkan Pasal 171 UU Pertambangan (yang akan menggantikan kesanggupan dalam Kontrak Karya, RKJP 2010, rencana strategis 5 tahun yang dipresentasikan pada tahun 2011, dan Proposal Tumbuh Bersama 2012 dan 2013).

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya laporan ini, KESDM belum secara formal menyetujui maupun menolak rencana jangka panjang yang telah disampaikan oleh para pemegang kontrak karya berdasarkan Pasal 171 UU Pertambangan 2009 (termasuk RKJP Perseroan).

Wilayah Pomalaa

Pada 3 Februari 2003, Pemerintah mengindikasikan bahwa pelaksanaan kesanggupan Perseroan untuk membangun pabrik pengolahan di Pomalaa sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Perparjangan dianggap telah terpenuhi sampai dengan yang lebih akhir antara tanggal 31 Desember 2008 atau pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama Sumberdaya dengan PT Antam (Persero) Tbk., dimana setelahnya Perseroan diharuskan untuk melaporkan kepada Pemerintah evaluasi keekonomian dan kelayakan teknis pembangunan pabrik pengolahan tersebut. Dengan telah tidak dilanjutkannya Perjanjian Kerjasama Sumberdaya, Perseroan diwajibkan untuk menyiapkan laporan tersebut.

Berdasarkan surat bulan Februari 2003 tersebut, Perseroan mempunyai kesempatan selama 120 hari waktu tunggu terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008 untuk melaporkan evaluasi keekonomian dan kelayakan pembangunan pabrik pengolahan di Pomalaa.

Pada bulan April 2009, Perseroan telah menyampaikan laporan studi kelayakan pembangunan pabrik di Pomalaa kepada KESDM yang menjelaskan bahwa pembangunan pabrik pengolahan di Pomalaa belum layak secara ekonomis untuk kondisi saat itu. Perseroan meminta waktu dua tahun untuk mengoptimalkan hasil studi kelayakan dimaksud. Akan tetapi, KESDM meminta Perseroan untuk melaporkan hasil studi kelayakan terbaru paling lambat pada akhir tahun 2009. Pemerintah daerah, di sisi lain, memberikan waktu kepada Perseroan untuk mengoptimalkan studi kelayakan hingga 1 Juli 2010.

Sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah daerah, pada tanggal 1 Juli 2010, Perseroan mengirimkan revisi studi kelayakan terbaru ke KESDM menjelaskan bahwa pembangunan pabrik pengolahan di Pomalaa belum layak secara ekonomis untuk saat ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Belum cukupnya bukti dari tempat lain atas keberhasilan proyek sejenis dengan yang diusulkan;
- Potensi harga nikel jangka panjang yang mungkin kurang menguntungkan akibat potensi kelebihan pasokan;
- Ketidakpastian di sektor pertambangan sehubungan penerapan UU Pertambangan 2009 (lihat Catatan 36e dibawah ini).

Namun demikian, Perseroan masih berkomitmen untuk mengembangkan tambang dan membangun pabrik pengolahan di Pomalaa sepanjang didukung oleh kelayakan ekonomisnya.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

c. Contract of Work undertaking (continued)

General (continued)

In July 2012, the Company submitted its revised growth strategy for development and investment in South Sulawesi, Central Sulawesi and Southeast Sulawesi (the "2012 Growing Together Proposal"). In June 2013, the Company submitted a revised growth strategy proposal which details the Company's growth strategy for development and investment in South Sulawesi, Central Sulawesi and Southeast Sulawesi (the "2013 Growing Together Proposal"). The Company's growth strategy with respect to Pomalaa and Bahodopi, as outlined in the 2013 Growing Together Proposal, provides for, among other items, the potential joint venture development of an HPAL project in Pomalaa and the potential construction of a downstream processing facility and primary processing facility in Bahodopi. Studies in relation to the HPAL project are ongoing as are studies in relation to the Bahodopi options of mining, processing, refinery and infrastructure. Discussions with the Government relating to the Company's current growth strategy are ongoing. If the 2013 Growing Together Proposal is accepted by the Government (in this regard, the MEMR), the Company plans to submit a revised LTP under Article 171 of the 2009 Mining Law (which would replace the CoW undertakings, the 2010 LTP submission, the 5-year strategic plan presented in 2011, and the 2012 and 2013 Growing Together Proposal).

Until the date of this report, the MEMR has not formally approved or rejected any long term plans that have been submitted by contract of work holders under Article 171 of the 2009 Mining Law (including the Company's LTP).

Pomalaa area

On February 3, 2003, the Government indicated that the Company's undertaking to construct a production plant in Pomalaa, as stipulated in the Extension Agreement, will be deemed satisfied until the later of December 31, 2008 or upon the termination of the Cooperative Resources Agreement ("CRA") with PT Antam (Persero) Tbk., following which the Company will be obliged to report to the Government on the economic and technical feasibility of constructing such a production plant. As the CRA has been discontinued, the Company was required to prepare such a report.

Based on the February 2003 letter, there is a 120 day waiting period from December 31, 2008 for the Company to submit a report evaluating the economic and technical feasibility of constructing a production plant in Pomalaa.

In April 2009, the Company submitted the feasibility report to the MEMR, explaining that the construction of a production plant in Pomalaa is not currently economically feasible. The Company requested a two-year waiting period for an optimization of feasibility study. The MEMR requested that the Company submit a new study by the end of 2009. The local governments, on the other hand, gave the Company a waiting period for the optimization of feasibility study until July 1, 2010.

In accordance with the timeline given by the local governments, on July 1, 2010, the Company submitted the revised study to the MEMR which concluded that the construction of a production plant in Pomalaa is not currently economically viable, emphasizing the following considerations:

- There is not enough evidence about the success of a similar project elsewhere;
- Potential for long-term unfavourable nickel price due to potential nickel over supply; and
- Uncertainty in the mining sector due to implementation of the 2009 Mining Law (refer to Note 36e below).

However, the Company is committed to developing the mine and to constructing a production plant in Pomalaa subject to economic feasibility of the project.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

c. Kesanggupan Kontrak Karya (lanjutan)

Wilayah Pomalaa (lanjutan)

Perseroan menerima tiga surat resmi dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 2 dan 26 Nopember 2010 dan 15 Desember 2010 yang mengharuskan adanya tindakan segera untuk mendirikan fasilitas produksi di Pomalaa atau langkah-langkah hukum akan dilakukan dengan tujuan agar Perseroan melepaskan area Pomalaa. Beberapa pertemuan dengan aparat provinsi telah dilakukan, beberapa diantaranya pada tanggal 21 Desember 2010 dan 31 Januari 2011, dimana diskusi lebih lanjut telah dimulai untuk penyelesaian secara damai.

Perseroan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Gubernur Sulawesi Tenggara yang meliputi konsep umum kerjasama potensial dalam mengembangkan area Pomalaa. Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut, Perseroan sedang melakukan pembahasan berlanjut dengan Gubernur, untuk mengembangkan lebih lanjut konsep kerjasama yang bersangkutan untuk dapat diimplementasikan dengan investor yang direkomendasikan dan difasilitasi oleh Gubernur.

Pada 14 Juni 2012, Perseroan, Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. menandatangani Nota Kesepahaman, dimana para pihak secara bersama-sama akan melaksanakan studi untuk mengetahui potensi pengembangan, konstruksi dan operasional fasilitas pabrik HPAL di Pomalaa (dalam area Kontrak Karya) untuk menghasilkan ~40ktpy nikel dan juga cobalt, dalam produk setengah jadi (seperti *Mixed Sulfide Precipitate*), serta pemasaran produk, termasuk kepada para pihak tersebut di atas.

Karena tidak terdapat aset yang berkaitan dengan Pomalaa yang tercatat di laporan keuangan 31 Desember 2013, kondisi ini tidak mempengaruhi secara material posisi keuangan Perseroan per 31 Desember 2013.

Wilayah Bahodopi

Perseroan merencanakan untuk menambang bijih nikel saprolitik di Bahodopi. Bijih dari Bahodopi akan digabungkan dengan bijih dari Sorowako untuk menjadi pengumpan/bahan baku bagi fasilitas pengolahan pyrometalurgi di Sorowako. Perseroan mengkaji berbagai opsi sehubungan dengan pembangunan fasilitas pengolahan di Bahodopi. Perseroan juga sedang mengevaluasi pembangunan jalan dari Bahodopi ke Sorowako.

Rencana tambang jangka menengahnya adalah sebagai berikut:

- Pembangunan jalan dari Bahodopi ke Sorowako yang juga terbuka untuk digunakan umum;
- Pembukaan tambang di wilayah Bahodopi; dan
- Pembangunan infrastruktur terkait.

Perseroan sedang mengajukan permohonan ijin kepada Pemerintah untuk memulai pembangunan jalan.

d. Tumpang tindih IUP

Berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan menetapkan bahwa terdapat IUP pihak ketiga atau kegiatan pertambangan yang tumpang tindih didalam wilayah Kontrak Karya Perseroan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Untuk mengatasi masalah perambahan di dalam wilayah Kontrak Karya Perseroan, Perseroan terus bekerja dengan instansi pemerintah terkait, termasuk dengan Kementerian ESDM, Kementerian Negara Lingkungan Hidup ("KLH") dan pemerintah daerah (misalnya, Gubernur dan Bupati). Perseroan ini siap untuk mengambil tindakan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada, mengajukan laporan polisi, mengajukan gugatan perdata dan pengajuan gugatan tata usaha negara.

Berkenaan dengan masalah tumpang tindih IUP dalam wilayah Kontrak Karya di Sulawesi Tengah, pada 26 Juli 2012, Perseroan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali. Salah satu poin penting dari Nota Kesepahaman adalah bahwa Bupati bertanggung jawab atas penyelesaian masalah tumpang tindih IUP di Kabupaten Morowali. Namun demikian, sampai dengan saat ini, komitmen Bupati berdasarkan Nota Kesepahaman untuk menyelesaikan masalah perambahan ini belum dipenuhi.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

c. Contract of Work undertaking (continued)

Pomalaa area (continued)

The Company received three official letters from the Governor of the Province of Southeast Sulawesi on November 2 and 26, 2010 and December 15, 2010 which required immediate action to construct a production plant in Pomalaa or legal action will be initiated towards a relinquishment by the Company of the Pomalaa area. There have been several meetings with Provincial Officials, among others, on December 21, 2010 and January 31, 2011, where further discussions were commenced for an amicable resolution.

The Company has signed a Memorandum of Understanding ("MoU") with the Governor of Southeast Sulawesi which covers the general concept of potential cooperation in developing the Pomalaa area. As a follow-up to the MoU, the Company is currently having continuing discussions with the Governor, to develop the concept for cooperation which can be used with an investor recommended and facilitated by the Governor.

On June 14, 2012, the Company, Vale Canada Limited and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. signed a Memorandum of Understanding, in which the parties agreed to jointly undertake a study for the purposes of determining the viability of developing, constructing and operating a HPAL-based processing facility in Pomalaa (within the CoW) to produce ~40ktpy of nickel as well as cobalt, in an intermediate product (likely Mixed Sulfide Precipitate), as well as to market the product, including to the parties mentioned above.

As there are no assets related to Pomalaa recorded in the financial statements as at December 31, 2013, this situation does not materially impact the Company's financial position as at December 31, 2013.

Bahodopi area

In Bahodopi, the Company plans to mine a saprolitic nickel ore body. Ore from Bahodopi would be combined with ore from the Sorowako area to feed the existing pyrometallurgical processing facility in Sorowako. The Company is studying various options with respect to constructing a processing facility in Bahodopi. The Company is also evaluating the construction of a road from Bahodopi to Sorowako.

Medium-term plans are as follows:

- Construction of a road from Bahodopi to Sorowako open for public use;
- Open a mine in Bahodopi area; and
- Construction of related infrastructure.

The Company is seeking Government permits to begin the road construction.

d. Overlapping IUP

Based on the Company's field verifications, the Company determined that there are third party IUPs or mining activities that overlap the Company's CoW area in Central Sulawesi and Southeast Sulawesi. To address the issue of encroachment inside of the Company's CoW area, the Company continues to work with the relevant government institutions, including the MEMR, the State Ministry of Environment (the "SMOE") and local governments (e.g., Governors and Regents). The Company is prepared to take legal action including, but not limited to, filing a police report, filing a civil tort claim and filing an administrative court claim.

With regard to the issue of overlapping IUPs within the CoW areas in Central Sulawesi, on July 26, 2012, the Company signed a MoU with the Governor of Central Sulawesi and the Regent of Morowali. One of the key points of the MoU is that the Regent shall be responsible for settlement of the IUP overlapping issues in the Morowali Regency. To date, however, the local Regent's commitment under the MoU to settle the encroachment issue has not been fulfilled.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

d. Tumpang tindih IUP (lanjutan)

Tidak terdapat perambahan pertambangan pihak ketiga di Pomalaa namun, mungkin terdapat beberapa masyarakat atau perambahan individu. Pada saat ini, perambahan tidak menimbulkan risiko material terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan dengan strategi pertumbuhan di Sulawesi Tenggara.

Pada 31 Desember 2013, Perseroan terus bekerja dengan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk mengatasi masalah perambahan ini. Selain itu, beberapa pihak berwenang telah memulai penyelidikan mengenai hal ini. Perseroan terus memantau perkembangan di lapangan dan mempersiapkan tindakan hukum yang tepat apabila dianggap perlu.

e. UU Pertambangan 2009

Pada tanggal 16 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara ("Undang-undang"), yang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 12 Januari 2009 dan menjadi UU Pertambangan 2009. UU Pertambangan 2009 tersebut mengindikasikan bahwa walaupun Kontrak Karya yang ada sekarang, seperti yang dimiliki oleh Perseroan, akan tetap berlaku namun ketentuan peralihan dalam Undang-undang memuat substansi yang tidak jelas. Ada beberapa hal yang sedang dikaji oleh para pemegang Kontrak Karya, termasuk oleh Perseroan, antara lain:

- Ketentuan peralihan sehubungan dengan Kontrak Karya. UU Pertambangan 2009 menyatakan bahwa Kontrak Karya yang ada pada saat ini akan tetap berlaku hingga akhir masa berlakunya. Namun UU Pertambangan 2009 juga menyatakan bahwa Kontrak Karya harus disesuaikan dalam jangka waktu satu tahun dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (selain dari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Penerimaan Negara – yang tidak dijelaskan, tetapi mungkin termasuk royalti dan pajak). Pada tanggal 16 Juni 2009, Perseroan bersama-sama dengan perusahaan tambang lainnya menghadiri rapat yang diadakan oleh KESDM dimana KESDM untuk pertama kalinya tentang rancangan usulan penyesuaian atas struktur Kontrak Karya yang berlaku saat ini pada seluruh pemegang Kontrak Karya. Perseroan telah mengirimkan tanggapan resminya ke Kementerian yang menjelaskan maksudnya untuk berdialog lebih lanjut mengenai rancangan usulan penyesuaian dimaksud. Diskusi renegotiasi Kontrak Karya terus berlangsung secara intensif mulai sejak September 2013 sampai dengan saat ini sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dibawah;
- Kewajiban para pemegang Kontrak Karya yang telah memulai aktivitasnya, dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya UU Pertambangan 2009, untuk menyerahkan rencana aktivitas penambangannya di seluruh wilayah Kontrak. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka wilayah kontrak karyanya akan disesuaikan, sesuai dengan UU Pertambangan 2009 (yang tidak dijelaskan lebih lanjut). Pemenuhan persyaratan oleh Perseroan telah didiskusikan diatas (lihat Catatan 36c).

Terdapat kemungkinan bahwa hal ini akan dibawa ke tingkat arbitrase jika Pemerintah memaksakan kehendaknya untuk merubah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kontrak Karya tanpa persetujuan dari para pemegang kontrak terkait. Perseroan sedang menganalisa dampak dari Undang-undang baru ini, dan berkeyakinan bahwa dalam waktu dekat ini tidak akan ada dampak yang signifikan, karena para pelaku industri dan Pemerintah kini sedang berusaha untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah ini.

Pada tanggal 4 Januari 2010, Perseroan menyerahkan rencana aktivitas penambangannya kepada KESDM dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut diatas. Pada tanggal 1 Juli 2010, Perseroan menyerahkan revisi rencana aktivitas penambangan kepada KESDM.

Perseroan telah mempresentasikan rencana bisnis strategis 5-tahunan kepada KESDM di bulan April 2011, dan telah ditanggapi oleh KESDM pada bulan Mei 2011 yang mengklarifikasi beberapa hal tertentu. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, belum ada persetujuan resmi dari KESDM mengenai rencana bisnis strategis 5-tahunan Perseroan ini.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

d. Overlapping IUP (continued)

There is no third party mining encroachment in Pomalaa, however, there may be some community or individual encroachment. At this time, the encroachment does not pose any material risk to the Company's ability to proceed with its growth strategy in Southeast Sulawesi.

As of December 31, 2013, the Company continues to work with the local governments in Central Sulawesi to have the encroachment issue resolved. Furthermore, some authorities have started investigations on this matter. The Company is monitoring the developments on the field and preparing for appropriate legal actions should they be deemed necessary.

e. The 2009 Mining Law

On December 16, 2008, the Indonesian Parliament passed a Law on Mineral and Coal Mining (the "Law"), which received the assent of the President on January 12, 2009, becoming the 2009 Mining Law. While the 2009 Mining Law indicates that existing CoWs, such as the Company's, will be honoured, the transitional provisions contain areas that are unclear. There are a number of issues that existing CoW holders, including the Company, are currently analyzing. Among others these are:

- The transitional provisions related to CoWs. The 2009 Mining Law notes that existing CoWs will be honoured until their expiration. However, it also states that existing CoWs must be adjusted within one year to conform with the provisions of the 2009 Mining Law (other than terms related to State Revenue – which is not defined, but presumably includes royalties and taxes). On June 16, 2009 the Company, together with other mining companies, attended a meeting held by the MEMR in which the Ministry for the first time announced the proposed adjustments to the current CoW structure applicable to all CoW holders. The Company has submitted a formal response to the Ministry explaining its intention to conduct further dialogue to discuss the best solution in response to the proposed changes. Discussions of CoW renegotiation continued intensively since September 2013 up to the present as further described below;
- The requirement for CoW holders that have already commenced some form of activity to, within one year of enactment of the 2009 Mining Law, submit a mining activity plan for the entire contract area. If this plan is not fulfilled, the contract area may be adjusted in accordance with the 2009 Mining Law (which is not further explained). The Company's fulfillment of the requirement is discussed above (refer to Note 36c).

It is possible that the arbitration provisions of the CoWs will be invoked if the Government attempts to force changes in CoW terms without the agreement of the CoW holders. The Company is analyzing the impact of this situation on its operations, and believes that there will be no significant impact in the near term, as the industry and Government work towards a consensus on these issues.

On January 4, 2010, the Company submitted a mining activity plan to the MEMR in order to satisfy the requirement noted above. On July 1, 2010, the Company submitted a revised mining activity plan.

The Company presented to the MEMR its 5 year business strategic plans in April 2011. The MEMR responded in May 2011 and asked for some items to be clarified. As at the date of these financial statements, there has been no official approval from the MEMR of the Company's 5 year business strategic plans.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

e. UU Pertambangan 2009 (lanjutan)

Lebih lanjut, pada tanggal 1 Februari 2010, Presiden Republik Indonesia menandatangani dua Peraturan Pemerintah ("PP"), yaitu PP No. 22/2010 dan PP No. 23/2010, yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan baru ini (telah diubah melalui PP No. 24/2012). PP No. 22/2010 pada dasarnya mengatur tentang pembentukan area pertambangan di Indonesia. PP No. 23/2010 menjelaskan lebih rinci beragam tipe perijinan pertambangan yang dapat diperoleh dalam hubungannya dengan Undang-undang ini, dan menjelaskan syarat dan kondisi yang wajib dipenuhi oleh pihak yang mengajukan maupun pihak berwenang mengeluarkan ijin pertambangan. Pada tanggal 5 Juli 2010, PP No. 55/2010 dikeluarkan. PP ini mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2010, PP No. 78/2010 dikeluarkan. PP ini mengatur mengenai reklamasi dan pasca-lambang.

Pada tanggal 10 Januari 2012, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 3/2012 yang secara resmi membentuk tim evaluasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") yang ada, untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang baru yang disahkan di Januari 2009. Undang-undang mengharuskan semua Kontrak Karya dan PKP2B yang ada agar diubah dan diharmonisasikan sesuai dengan Undang-undang per 12 Januari 2010 (yang batas waktunya telah berlalu). Tugas dari tim ini adalah sampai dengan Desember 2013, meskipun diskusi masih terus berlangsung pada saat tanggal laporan ini.

Pada tahun 2012, rapat format renegotiasi Kontrak Karya Perseoran dilakukan pada tanggal 11 September 2012. Pemerintah Pusat menekankan enam butir renegotiasi dalam rapat tersebut untuk didiskusikan lebih lanjut, sebagai berikut: (1) luas wilayah Kontrak Karya; (2) jangka waktu dan bentuk perpanjangan; (3) kewajiban keuangan (royalti dan pajak); (4) kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri; (5) kewajiban divestasi (51%); dan (6) kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Rapat renegotiasi telah dilanjutkan dengan beberapa rapat untuk mendiskusikan hal-hal teknis, mayoritas dari rapat lanjutan tersebut adalah untuk mendiskusikan mengenai kewajiban keuangan dan luas wilayah Kontrak Karya. Perseoran dan Pemerintah telah mencapai beberapa kemajuan dalam proses renegotiasi Kontrak Karya dan Perseoran berharap bahwa renegotiasi dapat selesai dalam waktu dekat. Sampai dengan proses renegotiasi selesai, Perseoran belum dapat menentukan sepenuhnya sejauh apa dampak renegotiasi terhadap Kontrak Karya.

Disisi lain Perseoran terus memonitor perkembangan dalam peraturan pelaksanaan dari UU Pertambangan 2009 ini dan mengkaji pengaruhnya terhadap operasional Perseoran.

f. Peraturan Menteri No. 17/2010

Pada tanggal 23 September 2010, Peraturan KESDM No. 17 tahun 2010 telah disahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan ini, terdapat kewajiban dari seluruh pemegang Ijin Usaha Pertambangan ("IUP")/Ijin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") untuk menggunakan harga patokan dalam penjualan mineral (atau batubara), baik penjualan kepada pasar domestik maupun ekspor, termasuk kepada afiliasi. Dalam peraturan peralihan, semua pemegang Kontrak Karya diwajibkan untuk mentaati peraturan ini dan persyaratan kontrak yang sudah ada sebelum diimplementasikannya peraturan ini harus disesuaikan agar memenuhi persyaratan peraturan ini (sebagai contoh, formula harga jual) dalam waktu 12 bulan.

Selain itu, sebagai kewajiban berkelanjutan dalam peraturan ini, penerapan harga dalam persyaratan kontrak harus disesuaikan setiap 12 bulan. Karena formula harga yang digunakan Perseoran telah sesuai dengan peraturan KESDM ini (LME dapat dikualifikasikan sebagai "pasar internasional"), Perseoran berpendapat bahwa tidak diperlukan penyesuaian terhadap kontrak penjualan jangka panjang Perseoran terhadap ketentuan ini. Meskipun demikian, peraturan ini tidak mengecualikan kontrak penjualan jangka panjang Perseoran dari lingkup keberlakuan peraturan ini.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

e. The 2009 Mining Law (continued)

Furthermore, on February 1, 2010, the President of the Republic of Indonesia signed two implementing regulations for the new Law, i.e. Government Regulation ("GR") No. 22/2010 and GR No. 23/2010 (as amended by GR No. 24/2012). GR No. 22/2010 deals with the establishment of mining areas in Indonesia. GR No. 23/2010 offers further details of different types of mining licenses which may be made available under this Law, and sets out the basic terms and conditions which need to be satisfied by license applicants and issuing authorities. On July 5, 2010, GR No. 55/2010 was issued. This GR regulates the guidance and supervision of mineral and coal mining business in Indonesia. On December 20, 2010, GR No. 78/2010 was issued. This GR regulates the reclamation and post-mining.

On January 10, 2012, the Indonesian Government issued Presidential Decree No. 3/2012 formally establishing a team tasked with evaluating existing mineral CoWs and Coal Contracts of Work ("CCoWs"), to bring them into line with the provisions of the new Law passed in January 2009. The Law requires all existing CoWs and CCoWs to be amended to harmonize them with the Law by January 12, 2010 (a deadline which has passed). The team's assignment is valid up to December 2013, although discussions still continue as at the date of this report.

In 2012, the Company's first formal CoW renegotiation meeting was held on September 11, 2012. The Central Government emphasized six points of renegotiation during this meeting for further discussions, as follows: (1) size of the CoW area; (2) term and form of CoW extension; (3) financial obligations (royalty and taxes); (4) domestic processing and refining; (5) mandatory divestment (51%); and (6) priority use of domestic goods and services. The renegotiation meeting has been followed-up by a number of technical meetings, most of which were to discuss financial obligations and the size of CoW area issues. The Company and the Government have made some progress on the CoW renegotiation process and the Company expects that the renegotiation can be concluded soon. Until the renegotiation process is completed, the Company is unable to fully determine to what extent the CoW will be affected.

On the other hand, The Company is closely monitoring the progress of the implementing regulations for the 2009 Mining Law and is currently assessing the impact on its operations.

f. Ministerial Regulation No. 17/2010

On September 23, 2010, MEMR Regulation No. 17 of 2010 was issued. Pursuant to this regulation, there is an obligation on all "Ijin Usaha Pertambangan" ("IUP")/"Ijin Usaha Pertambangan Khusus" ("IUPK") holders to refer to prescribed benchmark prices for the sale of minerals (or coal), whether sales are being made to domestic users or are for export, including to affiliates. Under the transitional provision, all CoW holders are obligated to comply with the regulation and any term contracts existing prior to the implementation of this regulation must be adjusted to comply with the terms (i.e., the selling price formula) of this regulation within 12 months.

In addition, as an ongoing obligation under the regulation, pricing in term contracts must be adjusted every 12 months. As the Company's selling price formula is in line with the MEMR regulation (LME qualifies as an "international market"), the Company does not believe that any adjustment will be necessary to the Company's long-term sales agreements under either provision. Notwithstanding the foregoing, the regulation does not grandfather the Company's long-term sales contracts.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

f. Peraturan Menteri No. 17/2010 (lanjutan)

Harga patokan akan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar atau sejalan dengan harga yang berlaku pada pasar internasional. Harga patokan untuk mineral logam (misalnya nikel dalam *matte*) akan ditentukan oleh Direktur Jenderal setiap bulannya. Peraturan ini mengharuskan harga patokan digunakan sebagai referensi penjualan.

Harga patokan akan didasarkan pada basis "free on board". Formula untuk harga patokan akan diatur oleh peraturan Direktur Jenderal yang belum ditetapkan saat ini. Perlu dicatat bahwa yang mengalami perubahan setiap bulannya adalah harga patokan, dan bukan formulanya.

Penyesuaian harga yang diatur di dalam peraturan ini termasuk biaya angkutan dengan menggunakan tongkang, biaya surveyor, biaya perpindahan kapal, biaya pengolahan, biaya pemurnian, biaya logam terhutang dan/atau biaya asuransi. Referensi metal terhutang mengacu kepada harga yang akan dibayar oleh pembeli berdasarkan kandungan metal dalam produk; terdapat kesan adanya pengakuan harga pasar internasional untuk produk nikel setengah jadi (berupa persentase harga LME).

Penilaian awal Perseroan adalah bahwa peraturan ini mengakui atau memperbolehkan penyesuaian terhadap standar harga pasar internasional (misalnya sejumlah persentase tertentu dari harga LME). Saat ini, pada level minimum, peraturan ini akan menggunakan harga LME sebagai referensi dalam menghitung harga patokan. Peraturan Direktur Jenderal yang menetapkan mengenai rentang penyesuaian harga masih belum ditetapkan dan perlu dipastikan bahwa harga patokan aktual yang diatur oleh Direktorat Jenderal akan sejalan dengan formula harga yang digunakan Perseroan. Manajemen belum akan mengetahui lebih jauh mengenai hal ini hingga Peraturan Direktur Jenderal dikeluarkan.

g. Peraturan KESDM mengenai Peningkatan Nilai Tambah

Pada tanggal 6 Februari 2012, KESDM mengeluarkan Peraturan No. 07 tahun 2012 mengenai Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Pengolahan Mineral dan Proses Pemurnian ("PerMen No. 7/2012"). Peraturan ini dikeluarkan untuk penerapan Pasal 96 dan 111 dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 23/2010, telah diubah melalui PP No. 24/2012").

Berdasarkan PP No. 23/2010 dan PerMen No. 7/2012, logam mineral tertentu, termasuk nikel, dianggap sebagai komoditas pertambangan, nilai yang dapat ditambahkan melalui pengolahan dan/atau kegiatan pemurnian. Dengan demikian, nikel harus diproses dan/atau dimurnikan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum yang ditetapkan dalam PerMen No. 7/2012.

Pemegang Kontrak Karya yang telah melakukan produksi sebelum Peraturan ini diterbitkan diwajibkan untuk :

- melakukan penyesuaian terhadap batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan batas yang ditentukan diatas dalam waktu 5 tahun setelah UU Pertambangan 2009 ini dikeluarkan;
- dan menyampaikan laporan berkala mengenai penyesuaian terhadap batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian kepada Direktur Jenderal Batubara dan Pertambangan untuk evaluasi.

Dalam hal pemegang Kontrak Karya tidak dapat membuat penyesuaian tersebut di atas atau tidak dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, mereka harus berkonsultasi dengan Direktur Jenderal.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

f. Ministerial Regulation No. 17/2010 (continued)

Benchmark prices will be determined pursuant to market mechanisms or in accordance with prices generally applicable in the international market. Benchmark price for metal minerals (e.g. nickel in *matte*) will be established by the Director General on a monthly basis. The regulation requires that the benchmark prices be used as a reference for sales.

The benchmark price will be on a "free on board" basis. The formula for the benchmark prices will be regulated by a Director General regulation, which is yet to be issued. Note that it is the benchmark price that will change monthly, not the formula.

The "cost adjustments" set out in the regulation include barging cost, surveyor cost, transshipment cost, treatment cost, refinery cost, metal payable and/or insurance cost. The reference to "metal payable" refers to the price which the customer will pay on the contained metal of the product; it arguably recognizes the international market price practice for nickel intermediate products (i.e., a percentage of LME price).

Management's initial assessment is that, this regulation recognizes or permits adjustments to the international market price standard (e.g. a percentage of LME price). At the present time, at a minimum, it appears that the regulation will set LME price as a reference point in calculating the benchmark price. What remains is the outstanding regulation of the Director General on the methods of determining the quantum for the cost adjustments and to make sure that the actual benchmark price posted by the Director General is in line with the Company's pricing formula. Management will not know this until the Director General regulation is issued.

g. MEMR Regulation on Domestic Value-Add

On February 6, 2012, the MEMR issued Regulation No. 07 of 2012 on Increase in Value-Add from Minerals through Mineral Processing and Refining ("Reg No. 7/2012"). This Regulation was issued to further implement Articles 96 and 111 of Government Regulation No. 23 of 2010 on the Implementation of Mineral and Coal Mining Activities ("GR No. 23/2010, as amended by GR No. 24/2012").

Pursuant to GR No. 23/2010 and Reg No. 7/2012, certain metal minerals, including nickel, are regarded as mining commodities, the value of which can be added to through processing and/or refining activities. As such, nickel must be processed and/or refined within the country in accordance with the minimum threshold provided in Reg No. 7/2012.

CoW holders that have been producing prior to the issuance of the Regulation must:

- make adjustment to the processing and/or refining minimum threshold plan to be in accordance with the limit set out above within 5 years of the issuance of the 2009 Mining Law; and
- submit periodic reports on the development of the adjustment to the processing and/or refining minimum limit plan to the Director General of Minerals and Coal for evaluation.

In the event that CoW holders cannot make the above mentioned adjustment or cannot do so through cooperation with other parties, they must consult with the Director General.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

Pada 16 Mei 2012, KESDM menerbitkan Peraturan No. 11 Tahun 2012 ("PerMen No. 11/2012") yang merupakan amandemen atas PerMen No. 7/2012. PerMen No. 11/2012 ini menegaskan bahwa pemegang IUP dan Ijin Pertambangan Rakyat ("IPR") dapat melakukan ekspor bijih/bahan mentah setelah memperoleh rekomendasi dari KESDM, apabila telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Direktur Jenderal Batubara dan Pertambangan akan menerbitkan peraturan-peraturan lebih lanjut terkait dengan implementasi PerMen No. 11/2012 ini.

Pada 12 September 2012, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian dari tuntutan *judicial review* yang diajukan oleh anggota dari Asosiasi Nikel Indonesia yang menentang PerMen No. 7/2012. Keputusan Mahkamah Agung membatalkan empat pasal dari PerMen No. 7/2012, termasuk ketentuan yang melarang ekspor mineral mentah sejak 6 Mei 2012. Perseroan berpendapat bahwa Keputusan tersebut tidak memiliki pengaruh langsung terhadap Perseroan.

Pada 6 Agustus 2013, KESDM menerbitkan Peraturan No. 20 Tahun 2013 ("PerMen No. 20/2013") yang merupakan amandemen atas PerMen No. 7/2012. PerMen No. 20/2013 ini menegaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan kerjasama dengan pihak lainnya yang memiliki ijin usaha dengan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, gubernur, bupati atau walikota. Di samping itu, pemegang IUP dan IPR dapat melakukan ekspor bijih/bahan mentah setelah memperoleh ijin ekspor dari Menteri Perdagangan.

Pada bulan Nopember 2013, putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2012 tentang pencabutan atas PerMen No. 7/2012 ("Putusan") dipublikasikan, meskipun Putusan tersebut telah dibacakan pada bulan April 2013. Meskipun gugatan yang diajukan hanya terkait Pasal 21 PerMen No. 7/2012, Putusan menetapkan pembatalan terhadap keseluruhan peraturan dan memerintahkan Kementerian ESDM untuk mencabut peraturan tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa produk Perseroan telah memenuhi ketentuan ini. Namun, Perseroan masih mengevaluasi dampak dari ketentuan ini terhadap kegiatan operasinya.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan terkait bea ekspor, yaitu, antara lain, Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 of 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan, Peraturan Direktur Jenderal Batubara dan Pertambangan No. 574.K/30/DJB/2012 tentang Ketentuan Tata Cara dan Persyaratan Ekspor Produk Pertambangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar. Manajemen berpendapat bahwa secara keseluruhan peraturan-peraturan ini tidak berdampak terhadap Perseroan. Produk Ni dalam Matte yang dihasilkan oleh Perseroan masuk dalam kategori HS 7501.10.00.00 (tidak termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut).

h. PP No. 24/2012

PP No. 24/2012 yang menggantikan PP No. 23/2010 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada 21 Februari 2012. PP No. 24/2012 mengharuskan pemegang IUP dan IUPK melakukan divestasi bertahap, sehingga paling tidak 51% saham dimiliki oleh investor Indonesia pada tahun ke-10 semenjak produksi berlangsung. PP No. 24/2012 juga memberikan konfirmasi bahwa perpanjangan Kontrak Karya adalah dalam bentuk IUP dan dibawah wewenang KESDM. Manajemen berkeyakinan bahwa kewajiban divestasi ini tidak berdampak pada pemegang Kontrak Karya, dan akan tetap menegosiasikan hal ini dengan KESDM dalam rapat renegosiasi Kontrak Karya.

36. Contingent assets and liabilities (continued)

On May 16, 2012, Regulation No. 11 of 2012 ("Reg No. 11/2012") was issued by the MEMR to amend Reg No. 7/2012. Under this Reg No. 11/2012, IUP and "Ijin Pertambangan Rakyat" ("IPR") holders may export ore/raw materials after obtaining recommendation from the MEMR, subject to certain requirements being fulfilled by the IUP and IPR holders. Certain Director General regulations shall be issued to further implement this regulation.

On September 12, 2012, the Supreme Court granted parts of a judicial review challenge filed by members of the Indonesian Nickel Association which contested Reg No. 7/2012. The Supreme Court decision nullified four articles of the Reg No. 7/2012, including the provision banning the exports of raw minerals since May 5, 2012. The Company believes that the Decision does not have any direct impact to the Company.

On August 6, 2013, the MEMR issued Regulation No. 20 of 2013 ("Reg No. 20/2013") to further amend Reg No. 7/2012. Under this Reg No. 20/2013, IUP and IUPK holders may cooperate with other IUP and IUPK holders with approval from Minister of Energy and Mineral Resources, governor, regent or mayor. In addition, IUP and IPR holders may export ore/raw materials after obtaining export permit from Minister of Trade.

In November 2013, a Supreme Court decision No. 13 P/HUM/2012 on the revocation of Reg. No. 7/2012 ("Decision") was published, though the Decision was read out in April 2013. Although the lawsuit was only about Article 21 of Reg No. 7/2012, the Decision declares an annulment of the entire regulation and ordered the MEMR to revoke it.

Management believes that the Company's products have satisfied the requirement. However, the Company is currently assessing any further impacts on its operations.

The Government has issued an export duty regulations package, consisting of, amongst others, the Minister of Trade Regulation No. 29 of 2012 on Export Control and Clearance Scheme, Director General of Minerals and Coal Regulation No. 574.K/30/DJB/2012 on Procedures and Requirements for Mining Product Export Recommendation, and Minister of Finance Regulation No. 75/PMK.011/2012 on Stipulation of Export Products which are Subject to Export Duty and Tarif. Overall, the management believes that these regulations should not be applicable to the Company. The Company's Nickel in Matte product is HS 7501.10.00.00 (i.e., different from what is covered in the regulations).

h. GR No. 24/2012

GR No. 24/2012 which amends GR No. 23/2010 was signed by the President of the Republic of Indonesia on February 21, 2012. GR No. 24/2012 requires a gradual divestment scheme applicable for IUP and IUPK holders, such that in the tenth year from their production commissioning at least 51% of their shares shall be owned by Indonesian participant(s). GR No. 24/2012 also provides confirmation that an extension of a CoW in the form of an IUP is under the authority of the MEMR. Management believes that the divestment requirement will not apply to CoW holders, and continues negotiating this matter with the MEMR through the ongoing CoW renegotiation meetings.

36. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

i. Peraturan KESDM tentang Divestasi

Pada 13 September 2012, KESDM menerbitkan Peraturan No. 27 Tahun 2013 ("PerMen No. 27/2013"). PerMen No. 27/2013, yang merupakan salah satu peraturan pelaksana terpenting dari PP No. 23/2010 dan PP No. 24/2012, menjelaskan tata cara dan penetapan harga divestasi saham, serta perubahan penanaman modal di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara.

PerMen No. 27/2013 menjelaskan bahwa seluruh pemegang Kontrak karya wajib mengikuti tata cara divestasi, tata cara pembayaran, dan mekanisme penetapan harga yang diatur dalam PerMen No. 27/2013 sejak tanggal berlakunya peraturan ini. Perseoran masih menganalisa dampak PerMen No. 27/2013 terhadap Perseroan. Mengingat bahwa divestasi merupakan salah satu butir dalam negosiasi Kontrak Karya, Perseroan akan terus mendiskusikan hal ini bersama Pemerintah.

j. Peristiwa setelah tanggal neraca

Pada tanggal 11 Januari 2014, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 sebagai perubahan kedua atas PP No. 23/2010, telah diubah melalui PP No. 24/2012 ("PP No. 1/2014"). Untuk melaksanakan PP No. 1/2014, pada tanggal yang sama, Menteri ESDM juga mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2014 ("PerMen ESDM 1/2014") untuk menggantikan PerMen No. 7/2012 dan PerMen No. 20/2013. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, pada prinsipnya, setiap bijih mentah tidak diperbolehkan untuk diekspor terhitung sejak 12 Januari 2014. Konsentrat didefinisikan sebagai produk olahan. Berdasarkan PerMen ESDM 1/2014, pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan pemegang IUP Operasi Produksi non-logam harus melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri sesuai dengan batas minimum sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan tersebut. Sebagai bagian dari peraturan larangan ekspor, produk Perseroan saat ini, yaitu *nickel in matte*, memenuhi batas minimum yang ditetapkan dalam PerMen ESDM 1/2014.

Selain itu, Menteri Keuangan menerbitkan pajak ekspor produk mineral melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014 tanggal 11 Januari 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Peraturan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Pajak dan Tarif Pajak. Tarif ekspor ini hanya berlaku untuk konsentrat. Konsentrat didefinisikan sebagai produk olahan.

Untuk memperjelas ketentuan dalam PP No. 1/2014 dan PerMen ESDM 1/2014 yang menyatakan "jumlah tertentu", terdapat juga Peraturan Menteri No. 04/M-DAG/PER/1/2014 yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan. Peraturan tersebut mengatur kewajiban untuk memverifikasi klasifikasi dari produk mineral, kewajiban untuk mendaftar sebagai eksportir resmi pada Kementerian Perdagangan dan kewajiban untuk memperoleh persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan. Persyaratan ini berlaku untuk konsentrat.

Bagi Perseroan, yang produknya termasuk dalam Lampiran 1 dari Peraturan Menteri Perdagangan ini, kewajiban tambahannya adalah untuk melakukan verifikasi atas klasifikasi produk Perseroan dan untuk mendaftar sebagai eksportir resmi. Kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Perdagangan tidak berlaku bagi Perseroan. Manajemen saat ini bekerja sama dengan kantor kepatuhan untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Perseroan terus memantau setiap perkembangan yang relevan dan menilai setiap dampak lebih lanjut terhadap operasinya, apabila ada.

Pada tanggal 18 Februari 2014, Perseroan telah memperoleh surat pengakuan dari Menteri Perdagangan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sesuai surat No. 5/DAGLU/ET-PPHPP/2/2014.

37. Informasi tambahan untuk Laporan Arus Kas

Kegiatan signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas:

31 Desember	2013	2012	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pembelian aset tetap yang dibiayai melalui utang	(1,110)	(3,853)	Acquisition of fixed assets through incurring of payables

36. Contingent assets and liabilities (continued)

i. MEMR Regulation on Divestment

On September 13, 2013, MEMR issued Regulation No. 27 of 2013 ("Reg No. 27/2013"). Reg No. 27/2013, which is one of the most important implementing regulations of GR No. 23/2010 and GR No. 24/2012, outlining the procedures and determination of share divestment prices and also changes of investment particulars in the mineral and coal mining business.

Reg No. 27/2013 provides that all CoW holders must follow the divestment procedure, payment procedure, and pricing mechanism provided in Reg No. 27/2013 from its issuance date. The Company is analyzing the impact of Reg No. 27/2013 to the Company. As divestment is one of the CoW renegotiation items, the Company shall continue to discuss this matter with the Government.

j. Subsequent events

On January 11, 2014, the Government issued Government Regulation No. 1 of 2014 as the second amendment to GR No.23 as amended by GR No.24/2012 ("GR No. 1/2014"). To implement GR No.1/2014, on the same date, the MEMR also issued Regulation No. 1 of 2014 ("MEMR Reg 1/2014") to replace Reg No. 7/2012 and Reg No. 20/2013. Based on these regulations, in principle, any raw material is prohibited to be exported as from January 12, 2014. Concentrate is defined as processed product. Under MEMR Reg 1/2014, metal mineral IUP Operation Production holders and non-metal mineral IUP Operation Production holders must conduct domestic processing and refining in accordance with the minimum threshold as provided in the attachment to this regulation. As part of the export ban regulations, the Company's current product, i.e. nickel in matte, satisfies the minimum thresholds set out in the MEMR Reg 1/2014.

In addition, the Minister of Finance issued an export tax of mineral products through Minister of Finance Regulation No. 6/PMK.011/2014 dated 11 January 2014 on the Second Amendment to the Minister of Finance Regulation No. 75/PMK.011/2012 on the Stipulation of Export Goods Subject to Tax and Tax Tariff. This export tariff only applies to concentrate. Concentrate is defined as processed product.

To clarify provisions in GR No. 1/2014 and MEMR Reg 1/2014 stating "certain amount", there is also Ministerial Regulation No. 04/M-DAG/PER/1/2014 issued by the Minister of Trade. It regulates obligations to verify classification of mineral products, obligation to register as an official exporter and obligations to obtain export approval from the Minister of Trade. These requirements apply to concentrate.

For the Company, whose product falls under Attachment 1 of the Trade Ministerial regulation, the additional obligations are to verify the classification of the Company's product and to register as an official exporter. The obligation to obtain approval from the Minister of Trade does not apply to the Company. Management is working together with the customs office to pursue the compliance. The Company continues to monitor any relevant development and assess any further impacts on its operations, if any.

On February 18, 2014, the Company has already obtained the recognition letter from the Minister of Trade as a Registered Exporter for Processed and Refined Mining Products as stated in its letter No. 5/DAGLU/ET-PPHPP/2/2014.

37. Supplementary information for Statement of Cash Flows

Significant activities not affecting cash flows: